PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAPPERIDA
HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bukti untuk Bangsa
HRP
HAFECS
Research & Publication

HASIL KAJIAN

Penguatan Kohesi Sosial dan Perlindungan Hak Kelompok Rentan melalui Inovasi Tata Kelola Sosial Politik melalui Inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tim Peneliti:

- **Hairansyah, S.H., M.H.** – Pakar HAM dan Sosial Politik
- **Junaidy, M.I.Kom., M.AB.** – Pakar Administrasi Publik
- **Farida Hayati, S.Pd.** – Pakar Pendidikan dan Evaluasi Program
- **Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc.** – Peneliti HRP
- **Raihani Raziqin, S.Tr.Kom.** – Peneliti HRP

2026

rakat mufakat

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Penguatan Kohesi Sosial dan Perlindungan Hak Kelompok Rentan melalui Inovasi Tata Kelola Sosial Politik melalui Inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penyusun :
1. Hairansyah, S.H., M.H. – Pakar HAM dan Sosial Politik
2. Junaidy, M.I.Kom., M.AB. – Pakar Administrasi Publik
3. Farida Hayati, S.Pd. – Pakar Pendidikan dan Evaluasi Program
4. Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc. – Peneliti HRP
5. Raihani Raziqin, S.Tr.Kom. – Peneliti HRP

Barito Kuala, 10 Agustus 2026

Disetujui oleh:

Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc.
Coordinator of HAFECS Research and Publication

Farida Hayati, S.Pd.
Head Division and Researcher

Diketahui oleh:

Dr. Zulfikar Alimuddin
Director of HAFECS Research and Publication

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif peran inovasi tata kelola sosial-politik dalam memperkuat kohesi sosial dan melindungi hak kelompok rentan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Kajian berangkat dari basis data rekapitulasi 214 inovasi daerah yang telah dikelompokkan ke dalam lima perspektif, dengan fokus khusus pada 20 inovasi yang tergolong dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Sosial, dan Politik, ditambah tiga inovasi relevan (Pendampingan Bansos Cepat Tanggap/Pepenabat, SAPA HSS, dan Layanan Adminduk Inklusif Loksado) yang secara substansi juga berada pada ranah perlindungan sosial dan reformasi tata kelola, sehingga total populasi data kajian berjumlah 20 inovasi.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa klaster Kesehatan Inklusif dan Kelompok Rentan mendominasi populasi data (22 inovasi atau 45,8%), diikuti oleh klaster Perlindungan Sosial, Bantuan Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan (8 inovasi atau 16,7%), klaster Reformasi Politik, Hukum, dan Administrasi Kependudukan (6 inovasi atau 12,5%), klaster Ketenteraman, Ketertiban, dan Persatuan Bangsa (5 inovasi atau 10,4%), klaster Pendidikan Inklusif dan Pengembangan SDM (4 inovasi atau 8,3%), serta klaster Lingkungan Hidup, Sanitasi, dan Toleransi (3 inovasi atau 6,3%). Distribusi ini menunjukkan bahwa perhatian tata kelola daerah terhadap dimensi sosial-politik masih terkonsentrasi pada sektor kesehatan, sementara dimensi partisipasi politik, reformasi birokrasi, dan penguatan kohesi sosial berbasis komunitas relatif belum proporsional.

Kajian mendalam terhadap enam inovasi terpilih menunjukkan variasi signifikan dalam hal jangkauan terhadap kelompok rentan, tingkat digitalisasi, kejelasan kelembagaan, dan keterbukaan data publik. Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif) dan SLRT Menyapa tampil sebagai inovasi dengan orientasi kelompok rentan paling jelas dan kelembagaan paling jelas, sementara Bakul Peduli dan SAPA HSS menghadapi keterbatasan dokumentasi capaian yang perlu segera diperbaiki agar akuntabilitas publik dapat ditingkatkan.

Secara kebijakan, keenam inovasi tersebut sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten HSS Tahun 2025–2029, “Membangun Desa, Menata Kota, untuk Mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)”, terutama pada pilar Mengayomi (perlindungan sosial dan kelompok rentan) dan Teknologis (transformasi digital pelayanan publik). Namun demikian, kajian ini menemukan bahwa keterkaitan formal terhadap dokumen RPJMD belum sepenuhnya terdokumentasikan pada level indikator kinerja, sehingga diperlukan penguatan integrasi perencanaan.

Kajian ini merekomendasikan model optimalisasi untuk masing-masing dari enam inovasi, mencakup penguatan basis data digital, integrasi lintas-OPD, dan

mekanisme evaluasi dampak berkala. Selain itu, kajian mengusulkan dua arah pengembangan inovasi baru: (1) Sistem *Dashboard* Terpadu Kohesi Sosial dan Kelompok Rentan (SIGAP-KOHESI) sebagai instrumen pemantauan lintas inovasi, dan (2) Forum Partisipasi Kelompok Rentan Tingkat Kecamatan sebagai mekanisme keterlibatan langsung penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marjinal dalam perumusan kebijakan daerah.

Dengan implementasi rekomendasi yang diusulkan, kajian ini meyakini Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memperkuat reputasinya sebagai daerah dengan tata kelola sosial-politik yang inklusif, responsif, dan berbasis data, sejalan dengan semangat pembangunan yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kajian Komprehensif mengenai Penguatan Kohesi Sosial dan Perlindungan Hak Kelompok Rentan Melalui Inovasi Tata Kelola Sosial-Politik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian ini disusun sebagai bentuk telaah akademis dan kebijakan terhadap berbagai inovasi daerah yang telah dan sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya pada perspektif Hak Asasi Manusia, sosial, dan politik. Enam inovasi menjadi fokus utama kajian, yaitu Bina Persada (Kamtibmas), SLRT Menyapa, Bakul Peduli, Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat), SAPA HSS, dan Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif), yang seluruhnya memiliki keterkaitan langsung dengan upaya perlindungan kelompok rentan—lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan masyarakat adat—serta penguatan kohesi sosial di tingkat komunitas.

Penyusunan kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa analisis statistik deskriptif terhadap data rekapitulasi 214 inovasi daerah, serta pendekatan kualitatif berupa penilaian substansi terhadap enam inovasi terpilih. Kajian juga mengkaji kesesuaian inovasi-inovasi tersebut terhadap visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029, sebagai bentuk pertanggungjawaban perencanaan yang terintegrasi.

Disadari bahwa kajian ini memiliki keterbatasan, terutama pada beberapa inovasi yang dokumentasinya di dalam basis data rekapitulasi masih berupa nama program program tanpa uraian dan manfaat yang lengkap. Keterbatasan tersebut disampaikan secara transparan dalam kajian ini agar dapat menjadi catatan perbaikan tata kelola dokumentasi inovasi daerah ke depan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan data, masukan, dan kontribusi pemikiran dalam penyusunan kajian ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam merumuskan kebijakan penguatan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Barito Kuala, 3 Agustus 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **2**
RINGKASAN EKSEKUTIF **3**
KATA PENGANTAR **5**
DAFTAR ISI **6**
DAFTAR GAMBAR **11**
DAFTAR TABEL **12**
BAB I PENDAHULUAN **15**
1.1 Latar Belakang Strategis 15
1.2 Landasan Filosofis dan Normatif 16
1.2.1 Visi "SEMANGAT" sebagai Arah Pembangunan Daerah 16
1.2.2 Kohesi Sosial dan Perlindungan Kelompok Rentan sebagai Mandat 16
1.2.3 Inovasi Daerah sebagai Instrumen Kebijakan 16
1.3 Landasan Yuridis 17
1.4 Rumusan Masalah 17
1.5 Tujuan Kajian 18
1.6 Ruang Lingkup 18
1.6.1 Lingkup Substansi 18
1.6.2 Lingkup Data dan Populasi 18
1.6.3 Lingkup Kelembagaan 18
1.6.4 Lingkup Spasial 19
1.6.5 Lingkup Waktu 19
1.6.6 Lingkup Integrasi Kebijakan 19
1.7 Metodologi 19
1.7.1 Pendekatan Kajian 19
1.7.2 Sumber Data 19
1.7.3 Teknik Analisis 19
1.7.4 Kerangka Penilaian Kualitatif 20
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN DIAGNOSIS TATA KELOLA **22**
2.1 Profil Wilayah dan Demografi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 22
2.2 Struktur Kelembagaan Sosial-Politik Daerah 23
2.3 Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah 23
2.4 Populasi Data Inovasi Menurut Asta Cita dan Posisi Agenda 24

2.5 Distribusi Inovasi Menurut Klaster Tematik 25
2.6 Identifikasi Kesenjangan Struktural.....27
2.6.1 Kesenjangan Dokumentasi Data.....27
2.6.2 Kesenjangan Cakupan Spasial.....27
2.6.3 Kesenjangan Digitalisasi 27

BAB III PEMETAAN DAN SELEKSI ENAM INOVASI PRIORITAS.....29
3.1 Kerangka Reklasifikasi Inovasi 29
3.2 Proses Penetapan dan Validasi Enam Inovasi Prioritas.....29
3.2.1 Tahap 1: Validasi Representativitas Klaster.....29
3.2.2 Tahap 2: Validasi Melalui Matriks Skoring Berbobot 30
3.3 Analisis Rantai Layanan Kelompok Rentan.....30
3.4 Matriks Penilaian dan Pembobotan Kriteria.....31
3.5 Proses Perhitungan Skor Komposit 32
3.6 Hasil Skoring dan Penetapan Enam Inovasi Prioritas.....33
3.7 Profil Ringkas Enam Inovasi Prioritas.....34
3.8 Keterkaitan Fungsional Antar-Enam Inovasi.....35
3.8.1 Loksado Inklusif sebagai Prasyarat Identitas Hukum 36
3.8.2 SLRT Menyapa sebagai Simpul Rujukan Terpadu 36
3.8.3 Bina Persada sebagai Jalur Deteksi Dini Berbasis Komunitas.....36
3.8.4 SAPA HSS sebagai Kanal Umpan Balik Lintas-Layanan.....36

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 63
4.1 Gambaran Umum Permasalahan.....63
4.2 Permasalahan Hulu: Pendataan dan Verifikasi Kelompok Rentan.....63
4.3 Permasalahan Hilirisasi: Penyaluran dan Keberlanjutan Layanan 63
4.4 Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.....63
4.5 Permasalahan Infrastruktur dan Digitalisasi 64
4.6 Analisis Mendalam Enam Inovasi Prioritas.....64
4.6.1 Bina Persada 64
4.6.1.1 Identitas Inovasi.....65
4.6.1.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat.....65
4.6.1.3 Rancang Bangun Inovasi 66
4.6.1.4 Capaian Inovasi 67
4.6.1.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....68
4.6.1.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....68

4.6.1.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 69
4.6.2 SLRT Menyapa 70
4.6.2.1 Identitas Inovasi 71
4.6.2.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat 71
4.6.2.3 Rancang Bangun Inovasi 71
4.6.2.4 Capaian Inovasi 73
4.6.2.5 Kendala dan Tantangan Implementasi 74
4.6.2.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC) 74
4.6.2.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 76
4.6.3 Bakul Peduli 76
4.6.3.1 Identitas Inovasi 77
4.6.3.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat 77
4.6.3.3 Rancang Bangun Inovasi 77
4.6.3.4 Capaian Inovasi 79
4.6.3.5 Kendala dan Tantangan Implementasi 80
4.6.3.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC) 80
4.6.3.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 82
4.6.4 Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat) 82
4.6.4.1 Identitas Inovasi 83
4.6.4.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat 83
4.6.4.3 Rancang Bangun Inovasi 83
4.6.4.4 Capaian Inovasi 85
4.6.4.5 Kendala dan Tantangan Implementasi 86
4.6.4.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC) 86
4.6.4.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 87
4.6.5 SAPA HSS 88
4.6.5.1 Identitas Inovasi 89
4.6.5.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat 89
4.6.5.3 Rancang Bangun Inovasi 89
4.6.5.4 Capaian Inovasi 90
4.6.5.5 Kendala dan Tantangan Implementasi 92
4.6.5.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC) 92
4.6.5.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 93
4.6.6 Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif) 94
4.6.6.1 Identitas Inovasi 95

4.6.6.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat.....95
4.6.6.3 Rancang Bangun Inovasi 95
4.6.6.4 Capaian Inovasi 97
4.6.6.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....98
4.6.6.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....98
4.6.6.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 99
4.7 Analisis Komparatif Enam Inovasi 100
4.8 Analisis SWOT Gabungan.....101
4.9 Rangkuman Pemeriksaan kondisi 101

BAB V VISI DAN ARAH PENGUATAN KOHESI SOSIAL 2026–2030 103
5.1 Arah Umum Penguatan Kohesi Sosial.....103
5.2 Visi Penguatan Kohesi Sosial dan Perlindungan Kelompok Rentan.....103
5.3 Prinsip Pengembangan.....103
5.4 Strategi per Klaster Tematik 103
5.5 Model Pengembangan Terpadu 104
5.6 Tahapan Pengembangan 104
5.6.1 Fase I (2026–2027): Konsolidasi dan Perbaikan Dasar.....104
5.6.2 Fase II (2028–2030): Ekspansi dan Integrasi 104
5.7 Dampak yang Diharapkan.....105
5.8 Integrasi Kebijakan Daerah.....105
5.8.1 Visi “SEMANGAT” dan Keterkaitan dengan Kohesi Sosial.....105
5.8.2 Pemetaan Inovasi terhadap Pilar Visi 105
5.8.3 Catatan Kesenjangan dan Peluang Penguatan 106

BAB VI DESAIN MODEL TATA KELOLA TERPADU 108
6.1 Model Sistem Tata Kelola Sosial-Politik Terpadu 108
6.2 Model Optimalisasi per Inovasi 108
6.2.1 Model Penguatan Bina Persada 108
6.2.2 Model Optimalisasi SLRT Menyapa 109
6.2.3 Model Bakul Peduli 110
6.2.4 Model Pepenabat 111
6.2.5 Model SAPA HSS 111
6.2.6 Model Loksado Inklusif.....112
6.3 Skema Kelembagaan Lintas OPD.....113
6.4 Rekomendasi Inovasi Baru 113

6.4.1 SIGAP-KOHESI: Sistem Informasi Terpadu Gawat-Darurat 113
6.4.2 Forum Partisipasi Kelompok Rentan Tingkat Kecamatan 114

BAB VII RENCANA AKSI DAN MATRIKS IMPLEMENTASI 116
7.1 Program Fase I (2026–2027): Konsolidasi dan Quick Wins 116
7.2 Program Fase II (2028–2030): Ekspansi dan Integrasi.....116
7.3 Peta Jalan Implementasi.....116
7.4 Matriks Prioritas Implementasi.....117
7.5 Risiko dan Mitigasi Implementasi 118

BAB VIII PROYEKSI DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN.....120
8.1 Pendahuluan.....120
8.2 Proyeksi Dampak terhadap Cakupan Perlindungan Kelompok Rentan .120
8.3 Proyeksi Dampak Kelembagaan dan Tata Kelola 120
8.4 Kontribusi terhadap RPJMD dan LPPD 120
8.5 Skenario Keberlanjutan.....121
8.6 Ringkasan Dampak Utama 121

BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN 124
9.1 Kesimpulan 124
9.2 Saran 124
9.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 125
9.2.2 Bagi Perangkat Daerah Pengampu Inovasi.....125
9.2.3 Bagi Penelitian Lanjutan.....125
Lampiran 1. Rekapitulasi Lengkap 48 Inovasi agenda kohesi sosial 128
Lampiran 2. Instrumen Penilaian Kualitatif Enam Inovasi 130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Distribusi Inovasi per Klaster Tematik.....26
Gambar 2.2 Porsi Inovasi Tata Kelola Sosial-Politik HSS Berdasarkan.....26
Gambar 3.1 Peta Keterkaitan Fungsional Antar-Enam Inovasi Prioritas 35
Gambar 4.1 Ilustrasi Bina Persada — Pembinaan Persatuan Berbasis Dialog.....64
Gambar 4.2 Ilustrasi SLRT Menyapa — Simpul Rujukan Terpadu Layanan Sosial 70
Gambar 4.3 Ilustrasi Bakul Peduli — Perlindungan Kesejahteraan Lanjut.....76
Gambar 4.4 Ilustrasi Pepenabat — Respons Cepat Penyaluran Bantuan Sosial....82
Gambar 4.5 Ilustrasi SAPA HSS — Kanal Pengaduan dan Partisipasi Publik 88
Gambar 4.6 Ilustrasi Loksado Inklusif — Layanan Adminduk Kolektif bagi.....94
Gambar 4.7 Skor Kualitatif Tim Kajian atas Enam Inovasi Fokus 100
Gambar 4.8 Analisis SWOT Gabungan Inovasi Tata Kelola Sosial-Politik.....101
Gambar 6.1 Model Sistem Tata Kelola Sosial-Politik Terpadu Tiga Tingkat.....108
Gambar 6.2 Model Alur Optimalisasi — Model Penguatan Bina Persada.....109
Gambar 6.3 Model Alur Optimalisasi — Model Optimalisasi SLRT Menyapa .109
Gambar 6.4 Model Alur Optimalisasi — Model Bakul Peduli.....110
Gambar 6.5 Model Alur Optimalisasi — Model Pepenabat.....111
Gambar 6.6 Model Alur Optimalisasi — Model SAPA HSS.....111
Gambar 6.7 Model Alur Optimalisasi — Model Loksado Inklusif.....112
Gambar 7.1 Peta Jalan Implementasi Rekomendasi Penguatan Kohesi Sosial ...117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Wilayah dan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 22
Tabel 2.2 Populasi Inovasi Daerah Kabupaten HSS Menurut Kategori Asta.....24
Tabel 2.3 Distribusi Inovasi Kohesi Sosial Menurut Klaster Tematik 25
Tabel 3.1 Representasi Enam Inovasi Terhadap Klaster Tematik 29
Tabel 3.2 Titik Kritis Rantai Layanan pada Enam Inovasi Fokus 31
Tabel 3.3 Bobot Kriteria Penilaian Inovasi.....31
Tabel 3.4 Skor Mentah Empat Dimensi Evaluatif 32
Tabel 3.5 Rincian Kontribusi Tertimbang per Dimensi.....33
Tabel 3.6 Skor Komposit Tertimbang Enam Inovasi Prioritas 34
Tabel 3.7 Enam Inovasi Fokus Kajian dan Klaster Tematiknya.....34
Tabel 3.8 Profil Inovasi PEMBINAAN DAN PERSATUAN BANGSA DI KECAMATAN 38
Tabel 3.9 Profil Inovasi SIPASKA HSS.....39
Tabel 3.10 Profil Inovasi BERSEMANGAT.....39
Tabel 3.11 Profil Inovasi BAKUL PEDULI.....40
Tabel 3.12 Profil Inovasi PROGRAM RUMAH SEJAHTERA.....42
Tabel 3.13 Profil Inovasi SLRT Menyapa 43
Tabel 3.14 Profil Inovasi PENDAMPINGAN PENYALURAN BANSOS CEPAT TANGGAP.....43
Tabel 3.15 Profil Inovasi SAHABAT SIMPUR.....44
Tabel 3.16 Profil Inovasi LUNA MAYA 45
Tabel 3.17 Profil Inovasi ELPUJI SUBSIDI TEPAT SASARAN 48
Tabel 3.18 Profil Inovasi GERAKAN MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN 48
Tabel 3.19 Profil Inovasi GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT.....52
Tabel 3.20 Profil Inovasi 1000 BIOPORI.....56
Tabel 3.21 Profil Inovasi LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu 57
Tabel 3.22 Profil Inovasi MENTANG-MENTANG 57
Tabel 3.23 Profil Inovasi PERJAKA HSS SEMANGAT.....58
Tabel 3.24 Profil Inovasi KADER ANDALAN 59
Tabel 3.25 Profil Inovasi MOBIL GERIATRI 59
Tabel 3.26 Profil Inovasi Loket Prioritas.....61
Tabel 3.27 Profil Inovasi SIJIWA BERDAYA 61
Tabel 4.1 Bina Persada.....65

Tabel 4.2 Bina Persada (Kekuatan)....66
Tabel 4.3 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)....66
Tabel 4.4 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)....67
Tabel 4.5 Capaian Inovasi....68
Tabel 4.6 Capaian Inovasi....69
Tabel 4.7 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 7)....70
Tabel 4.8 SLRT Menyapa (Unit Pelaksana:)....71
Tabel 4.9 SLRT Menyapa (Kekuatan)....73
Tabel 4.10 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)....73
Tabel 4.11 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)....74
Tabel 4.12 Capaian Inovasi....75
Tabel 4.13 Capaian Inovasi....76
Tabel 4.14 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 14)....77
Tabel 4.15 Bakul Peduli (Unit Pelaksana:)....78
Tabel 4.16 Bakul Peduli (Kekuatan)....79
Tabel 4.17 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)....79
Tabel 4.18 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)....80
Tabel 4.19 Capaian Inovasi....81
Tabel 4.20 Capaian Inovasi....82
Tabel 4.21 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 21)....83
Tabel 4.22 Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat)....84
Tabel 4.23 Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat)....85
Tabel 4.24 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)....85
Tabel 4.25 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)....86
Tabel 4.26 Capaian Inovasi....87
Tabel 4.27 Capaian Inovasi....88
Tabel 4.28 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 28)....88
Tabel 4.29 SAPA HSS (Unit Pelaksana:)....90
Tabel 4.30 SAPA HSS (Kekuatan)....91
Tabel 4.31 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)....91
Tabel 4.32 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)....92
Tabel 4.33 Capaian Inovasi....93
Tabel 4.34 Capaian Inovasi....94
Tabel 4.35 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 35)....94
Tabel 4.36 Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif) (Nama Resmi:)....96

Tabel 4.37 Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif) (Kekuatan) 97
Tabel 4.38 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 97
Tabel 4.39 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 98
Tabel 4.40 Capaian Inovasi.....99
Tabel 4.41 Capaian Inovasi.....100
Tabel 4.42 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 42).....101
Tabel 5.1 Strategi Penguatan per Klaster Tematik.....107
Tabel 5.2 Pemetaan Enam Inovasi Fokus terhadap Pilar Visi SEMANGAT.....108
Tabel 6.1 Model Penguatan Bina Persada.....112
Tabel 6.2 Model Optimalisasi SLRT Menyapa (Bagian 2) 113
Tabel 6.3 Model Bakul Peduli (Bagian 3) 113
Tabel 6.4 Model Pepenabat (Bagian 4).....114
Tabel 6.5 Model SAPA HSS (Bagian 5).....115
Tabel 6.6 Model Loksado Inklusif (Bagian 6).....115
Tabel 6.7 Skema Peran Kelembagaan Lintas OPD.....116
Tabel 7.1 Legenda Program pada Peta Jalan Implementasi.....120
Tabel 7.2 Matriks Prioritas Implementasi Rekomendasi 120
Tabel 7.3 Risiko dan Strategi Mitigasi.....121
Tabel 8.1 Proyeksi Dampak Kelembagaan (Pita Kualitatif).....123
Tabel 8.2 Skenario Keberlanjutan Implementasi Rekomendasi 124
Tabel 8.3 Lampiran 1. Rekapitulasi Lengkap 48 Inovasi agenda kohesi.....131

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Strategis

Kohesi sosial merupakan salah satu prasyarat mendasar bagi keberlangsungan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Sebuah daerah dengan tingkat kohesi sosial yang kuat ditandai oleh rendahnya potensi konflik antarkelompok, tingginya rasa saling percaya (trust) antarwarga dan antara warga dengan pemerintah, serta terjaminnya akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, terhadap layanan publik dan pemenuhan hak-hak dasarnya.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 1.804,94 km² dan populasi sekitar 238.413 jiwa pada tahun 2025 yang tersebar di 11 kecamatan dan 148 desa/kelurahan, telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam mendorong inovasi tata kelola pemerintahan melalui skema Inovasi Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah. Berdasarkan hasil rekapitulasi terbaru, tercatat 214 inovasi daerah yang tersebar di berbagai perangkat daerah, kecamatan, desa, dan unsur masyarakat, yang kemudian dikelompokkan ke dalam lima perspektif analisis.

Dari kelima perspektif tersebut, Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Sosial, dan Politik memiliki relevansi paling langsung dengan isu kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan, karena mencakup inovasi-inovasi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga negara: keamanan dan ketenteraman, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga hak atas identitas kependudukan. Namun demikian, keberadaan puluhan inovasi pada perspektif ini belum pernah dikaji secara komprehensif dari sudut pandang kohesi sosial dan perlindungan hak kelompok rentan secara terintegrasi, termasuk kesesuaiannya terhadap arah kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kajian ini disusun untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui alur kajian yang runtut — dimulai dari pemeriksaan kondisi berbasis data, pemetaan dan seleksi program prioritas, analisis permasalahan mendalam, perumusan visi dan strategi, desain model kelembagaan, hingga rencana aksi dan proyeksi dampak — diterapkan pada ranah tata kelola sosial-politik dan perlindungan kelompok rentan, dengan enam inovasi fokus: Bina Persada (Kamtibmas), SLRT Menyapa, Bakul

Peduli, Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat), SAPA HSS, dan Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif).

1.2 Landasan Filosofis dan Normatif

1.2.1 Visi "SEMANGAT" sebagai Arah Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029, yang disetujui DPRD pada 31 Juli 2025, mengusung visi "Membangun Desa, Menata Kota, untuk Mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)." Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan bahwa dokumen ini menjadi pedoman utama dalam merancang langkah-langkah pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pilar "Mengayomi" dalam visi tersebut secara jelas mengandung makna perlindungan negara terhadap warganya, termasuk kelompok rentan, sedangkan pilar "Teknologis" membuka ruang transformasi digital pelayanan publik agar lebih inklusif dan mudah diakses. Kedua pilar ini menjadi landasan filosofis utama kajian ini dalam mengkaji enam inovasi tata kelola sosial-politik.

1.2.2 Kohesi Sosial dan Perlindungan Kelompok Rentan sebagai Mandat Konstitusional

Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat ini diturunkan pada tingkat daerah melalui berbagai regulasi turunan yang mewajibkan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, perlindungan penyandang disabilitas, dan jaminan hak identitas hukum bagi seluruh warganya tanpa terkecuali.

1.2.3 Inovasi Daerah sebagai Instrumen Kebijakan

Inovasi daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dimaksudkan sebagai instrumen untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam konteks kajian ini, inovasi tata kelola sosial-politik menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan secara lebih terarah dan terukur.

1.3 Landasan Yuridis

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H dan Pasal 34;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029.

1.4 Rumusan Masalah

- Bagaimana gambaran umum wilayah, kelembagaan, dan distribusi statistik inovasi daerah Kabupaten HSS pada agenda kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan?
- Bagaimana kerangka pemetaan dan seleksi terhadap enam inovasi yang menjadi fokus penguatan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan?
- Permasalahan dan tantangan apa yang dihadapi pada level pendataan (hulu), penyaluran layanan (hilirisasi), sumber daya manusia, dan infrastruktur dari keenam inovasi tersebut?
- Bagaimana visi dan arah strategis penguatan kohesi sosial Kabupaten HSS untuk periode 2026–2030, serta model tata kelola terpadu yang dapat dikembangkan?
- Apa rencana aksi, matriks implementasi, serta proyeksi dampak dan keberlanjutan dari rekomendasi yang diusulkan?

1.5 Tujuan Kajian

- Memetakan gambaran umum wilayah dan menganalisis secara statistik distribusi inovasi daerah pada agenda kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Menyusun kerangka pemetaan, pembobotan, dan seleksi terhadap enam inovasi prioritas yang relevan dengan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan;
- Menganalisis secara mendalam permasalahan dan tantangan keenam inovasi pada level pendataan, penyaluran layanan, SDM, dan infrastruktur, termasuk kesesuaiannya terhadap RPJMD;
- Merumuskan visi, strategi, dan model tata kelola terpadu untuk penguatan kohesi sosial Kabupaten HSS periode 2026–2030;
- Menyusun rencana aksi, matriks implementasi, dan proyeksi dampak serta keberlanjutan dari rekomendasi yang diusulkan.

1.6 Ruang Lingkup

1.6.1 Lingkup Substansi

Kajian ini membatasi substansi analisis pada inovasi daerah yang berorientasi pada penguatan kohesi sosial (ketenteraman, persatuan, partisipasi) dan perlindungan kelompok rentan (lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, masyarakat adat), tidak mencakup inovasi pada ranah ekonomi, teknologi murni, atau pengukuran ilmiah yang tidak bersinggungan langsung dengan kedua isu tersebut.

1.6.2 Lingkup Data dan Populasi

Populasi data utama adalah 20 inovasi, terdiri atas 13 inovasi inti pada Asta Cita 1, 6, dan 8, ditambah 7 inovasi lintas kategori yang sasaran utamanya kelompok rentan. Seluruhnya diprofilkan pada Subbab 3.9, sedangkan enam inovasi prioritas dianalisis mendalam pada Bab IV.

1.6.3 Lingkup Kelembagaan

Kajian mencakup peran Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Sekretariat Daerah/Diskominfo, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) sebagai pemangku kepentingan utama keenam inovasi fokus.

1.6.4 Lingkup Spasial

Analisis spasial mencakup seluruh 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan penekanan khusus pada Kecamatan Kalumpang (Bina Persada) dan Kecamatan Loksado (Loksado Inklusif) sebagai lokus utama dua dari enam inovasi fokus.

1.6.5 Lingkup Waktu

Kajian menggunakan data rekapitulasi inovasi tahun 2025–2026 sebagai basis analisis, dengan proyeksi dan rencana aksi disusun untuk periode 2026–2030, selaras dengan periode RPJMD Kabupaten HSS Tahun 2025–2029.

1.6.6 Lingkup Integrasi Kebijakan

Kajian mengkaji keterkaitan keenam inovasi terhadap visi RPJMD Kabupaten HSS 2025–2029 pada level visi (visi-level alignment), mengingat rincian misi, sasaran, dan indikator kinerja RPJMD secara utuh berada di luar cakupan data yang tersedia bagi tim kajian.

1.7 Metodologi

1.7.1 Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed-method) yang terdiri atas analisis statistik deskriptif untuk memetakan distribusi populasi data, analisis kualitatif deskriptif-evaluatif untuk mengkaji substansi enam inovasi terpilih secara mendalam, serta analisis kebijakan (policy analysis) untuk menilai kesesuaian terhadap RPJMD dan merumuskan rekomendasi.

1.7.2 Sumber Data

- Data primer sekunder: dokumen rekapitulasi “Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita” Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Data pelengkap: publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pemberitaan media terkait perkembangan RPJMD 2025–2029 serta pelaksanaan program-program terkait;
- Kerangka kebijakan: visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029.

1.7.3 Teknik Analisis

- Analisis frekuensi dan porsi untuk memetakan distribusi 20 inovasi ke dalam enam klaster tematik;

- Matriks penilaian dan pembobotan kriteria untuk seleksi dan penetapan enam inovasi prioritas (dijelaskan pada Bab III);
- Penilaian kualitatif berskala (1–5) oleh tim kajian terhadap empat dimensi evaluatif untuk keenam inovasi fokus;
- Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) gabungan untuk merumuskan strategi penguatan;
- Analisis pemetaan kebijakan (policy mapping) terhadap kesesuaian inovasi dengan pilar visi RPJMD;
- Perumusan model optimalisasi menggunakan pendekatan alur proses (process flow) dan peta jalan (peta jalan) implementasi.

1.7.4 Kerangka Penilaian Kualitatif

Instrumen penilaian kualitatif yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas empat dimensi berskala 1 (rendah) hingga 5 (tinggi): (1) jangkauan kelompok rentan, (2) tingkat digitalisasi, (3) kejelasan kelembagaan/SOP, dan (4) keterbukaan data publik. Rincian definisi operasional setiap skala disajikan pada Lampiran 2 kajian ini. Penilaian bersifat transparan dan dapat ditelusuri, sehingga skor yang diperoleh mencerminkan kombinasi antara substansi program dan kelengkapan dokumentasi yang tersedia pada saat kajian disusun.

BAB 2
GAMBARAN UMUM

PENGUATAN KOHESI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN MELALUI INOVASI TATA KELOLA SOSIAL-POLITIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN DIAGNOSIS TATA KELOLA SOSIAL-POLITIK DAERAH

2.1 Profil Wilayah dan Demografi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) merupakan salah satu dari tiga belas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pusat pemerintahan di Kandangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten HSS memiliki luas wilayah 1.804,94 km² yang terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 148 desa/kelurahan. Populasi Kabupaten HSS tercatat sebesar 212.485 jiwa pada tahun 2023, meningkat menjadi 228.006 jiwa pada tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 238.413 jiwa pada tahun 2025, menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang konsisten.

Tabel 2.1 Data Wilayah dan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Indikator	Nilai
Luas Wilayah	1.804,94 km²
Jumlah Kecamatan	11 kecamatan
Jumlah Desa/Kelurahan	148 desa/kelurahan
Populasi 2023	212.485 jiwa
Populasi 2024	228.006 jiwa
Populasi 2025 (proyeksi)	238.413 jiwa
Pusat Pemerintahan	Kandangan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2025.

Kecamatan Kandangan sebagai pusat pemerintahan memiliki populasi terpadat, sementara Kecamatan Kalumpang — lokus inovasi Bina Persada — dan Kecamatan Loksado — lokus inovasi Layanan Adminduk Inklusif — merupakan wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang berbeda: Kalumpang berada di wilayah dataran dengan populasi relatif kecil, sedangkan Loksado berada di kawasan pegunungan Meratus dengan aksesibilitas terbatas, sehingga kedua kecamatan ini merepresentasikan tantangan geografis yang beragam dalam penyelenggaraan tata kelola sosial-politik di Kabupaten HSS.

Perlu dicatat bahwa data spesifik jumlah lanjut usia dan penyandang disabilitas per kecamatan yang mutakhir belum dipublikasikan secara terbuka pada saat kajian ini disusun. Sebagai proksi cakupan kelompok rentan, kajian ini menggunakan data penerima manfaat program perlindungan sosial yang telah dipublikasikan, misalnya penyaluran Program Rumah Sejahtera (PRS) pada perubahan APBD 2025 kepada 217 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp5,425 miliar, serta pencatatan 163 lansia asuh binaan Pemerintah Kabupaten HSS pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Klasifikasi kelompok rentan yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten HSS mencakup dua belas kategori, meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak dengan kedisabilitasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, korban tindak kekerasan, perempuan rawan sosial ekonomi, dan fakir miskin.

2.2 Struktur Kelembagaan Sosial-Politik Daerah

Penyelenggaraan tata kelola sosial-politik di Kabupaten HSS melibatkan sejumlah perangkat daerah dengan peran yang saling melengkapi. Dinas Sosial berperan sebagai koordinator utama perlindungan sosial (SLRT Menyapa, Bakul Peduli, Pepenabat, Program Rumah Sejahtera). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengampu layanan identitas hukum termasuk Layanan Adminduk Inklusif. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kecamatan berperan pada ranah ketenteraman dan ketertiban umum (Bina Persada, Kordinasi Aman). Sekretariat Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengampu kanal partisipasi dan pengaduan publik (SAPA HSS).

Struktur kelembagaan ini secara umum bersifat sektoral (silo), dengan koordinasi lintas-OPD yang masih terbatas pada forum-forum insidental. Ruang Pelayanan SLRT “Rakat Mufakat” yang diresmikan pada Juni 2025 merupakan salah satu langkah awal menuju integrasi layanan sosial satu pintu, namun integrasi serupa pada ranah ketenteraman-ketertiban dan administrasi kependudukan belum terbentuk.

2.3 Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten HSS diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah, yang mengatur ketentuan umum, bentuk inovasi daerah, perencanaan, pengusulan dan penetapan inisiatif, uji coba, penerapan, penilaian, pemberian penghargaan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, informasi, penyebarluasan, hingga kerja sama inovasi daerah. Kerangka regulasi ini kemudian

diimplementasikan melalui platform “SENADA PLUS” — Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan — yang menampilkan inovasi terbaru, kategori inovasi, statistik jumlah inovasi, serta akses ke detail program dan pengaduan.

2.4 Populasi Data Inovasi Menurut Asta Cita dan Posisi Agenda Kohesi Sosial

Berdasarkan dokumen rekapitulasi resmi "Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita", Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat memiliki 214 inovasi daerah yang dikelompokkan ke dalam delapan kategori Asta Cita, yaitu delapan misi Presiden periode 2025-2029 yang ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Sebarannya adalah Asta Cita 1 sebanyak 2 inovasi, Asta Cita 2 sebanyak 11 inovasi, Asta Cita 3 sebanyak 20 inovasi, Asta Cita 4 sebanyak 70 inovasi, Asta Cita 5 belum terisi, Asta Cita 6 sebanyak 8 inovasi, Asta Cita 7 sebanyak 100 inovasi, dan Asta Cita 8 sebanyak 3 inovasi.

Tabel 2.2 Populasi Inovasi Daerah Kabupaten HSS Menurut Kategori Asta

Perspektif	Jumlah Inovasi	Porsi
Asta Cita 1 - Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	2	0,9%
Asta Cita 2 - Pertahanan keamanan dan kemandirian bangsa	11	5,1%
Asta Cita 3 - Lapangan kerja, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur	20	9,3%
Asta Cita 4 - Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan	70	32,7%
Asta Cita 5 - Hilirisasi dan industrialisasi	0	0,0%
Asta Cita 6 - Membangun dari desa dan pemberantasan kemiskinan	8	3,7%
Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, birokrasi, antikorupsi	100	46,7%
Asta Cita 8 - Keharmonisan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi	3	1,4%
TOTAL	214	100%

Agenda kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan tidak tertampung dalam satu kategori. Tiga kategori inti yang menaunginya - Asta Cita 1, Asta Cita 6, dan Asta Cita 8 - hanya memuat 13 inovasi atau 6,1% dari total populasi. Bandingkan dengan Asta Cita 7 yang menampung 100 inovasi (46,7%) dan Asta Cita 4 sebanyak 70 inovasi (32,7%). Porsi yang kecil ini menjadi temuan awal kajian: secara kuantitas, agenda kohesi sosial belum menjadi arus utama inovasi daerah.

2.5 Distribusi Inovasi Menurut Klaster Tematik

Untuk keperluan analisis yang lebih tajam, ke-20 inovasi dikelompokkan ke dalam enam klaster tematik berdasarkan substansi uraian, manfaat, dan kategori Asta Cita asalnya. Hasil pengelompokan disajikan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Distribusi Inovasi Kohesi Sosial Menurut Klaster Tematik

Klaster Tematik	Jumlah	Porsi
Perlindungan Lansia	2	10,0%
Perlindungan Anak	1	5,0%
Penyaluran Bantuan Sosial	2	10,0%
Data & Rujukan Sosial	1	5,0%
Kesejahteraan Keluarga	1	5,0%
Keadilan Subsidi	1	5,0%
Hak Identitas Kelompok Rentan	2	10,0%
Perlindungan Pekerja Rentan	1	5,0%
Layanan Ramah Kelompok Rentan	1	5,0%
Kesehatan Jiwa & Rentan	1	5,0%
Kader & Modal Sosial	1	5,0%
Partisipasi & Aspirasi Warga	1	5,0%
Kebangsaan & Kerukunan	2	10,0%
Lingkungan & Gotong Royong	3	15,0%
TOTAL	20	100%

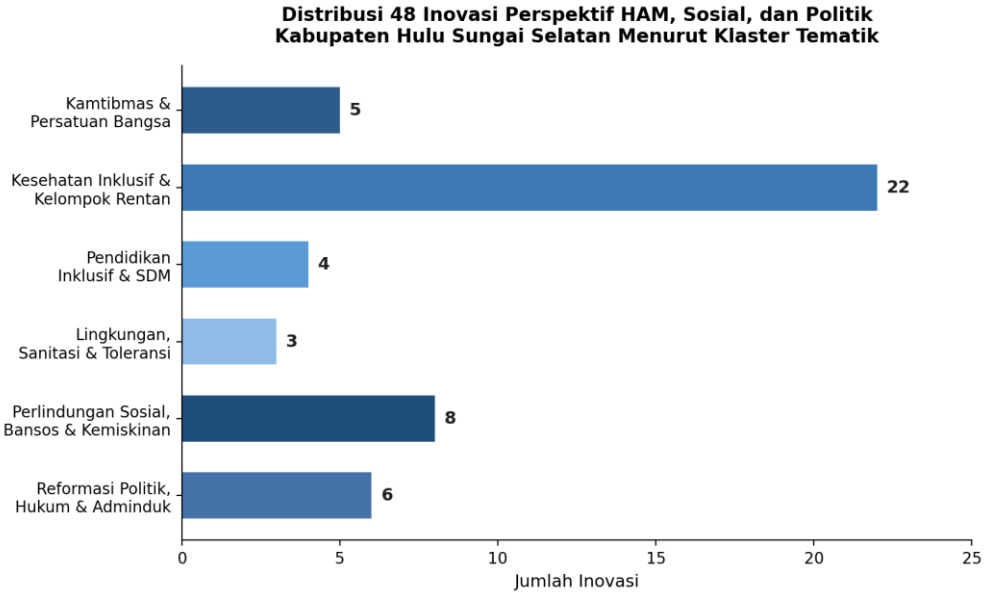

Gambar 2.1 Grafik Distribusi Inovasi per Klaster Tematik

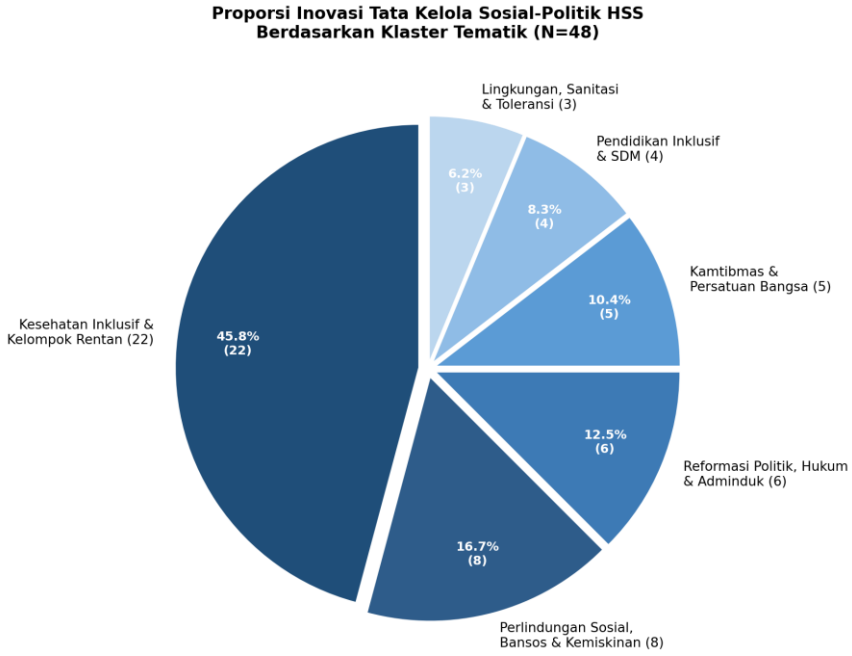

Gambar 2.2 Porsi Inovasi Tata Kelola Sosial-Politik HSS Berdasarkan

Dominasi klaster Kesehatan Inklusif dan Kelompok Rentan (45,8%) menunjukkan bahwa sektor kesehatan menjadi pintu masuk utama pemerintah daerah dalam menjangkau kelompok rentan, khususnya lanjut usia, penyandang gangguan jiwa, serta ibu dan anak. Klaster Perlindungan Sosial (16,7%) mencerminkan komitmen daerah dalam program-program seperti PRS, SLRT Menyapa, Bakul Peduli, dan Pepenabat, namun mayoritas inovasi pada klaster ini belum memiliki dokumentasi lengkap. Klaster Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, dan Adminduk (12,5%) mencakup mekanisme akuntabilitas dan

pemenuhan hak identitas hukum yang menjadi tulang punggung tata kelola partisipatif.

2.6 Identifikasi Kesenjangan Struktural

2.6.1 Kesenjangan Dokumentasi Data

Dari 20 inovasi yang dikaji, seluruhnya telah memiliki uraian isi dan manfaat pada dokumen rekap terbaru. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan rekap sebelumnya. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil yang menyertakan angka capaian; data kuantitatif terlengkap dimiliki BERSEMANGAT dan BAKUL PEDULI.

2.6.2 Kesenjangan Cakupan Spasial

Sejumlah inovasi unggulan, seperti Bina Persada dan Loksado Inklusif, masih bersifat lokal pada satu kecamatan dan belum direplikasi ke kecamatan lain yang memiliki karakteristik serupa. Dari 11 kecamatan di Kabupaten HSS, baru 2 kecamatan (Kalumpang dan Loksado) yang secara jelas memiliki inovasi tata kelola sosial-politik unggulan yang terdokumentasi dalam rekapitulasi, menunjukkan kesenjangan replikasi inovasi antarwilayah.

2.6.3 Kesenjangan Digitalisasi

Dari enam inovasi fokus kajian, hanya SAPA HSS yang secara inheren berbasis kanal digital, sementara SLRT Menyapa, Bakul Peduli, Pepenabat, dan Bina Persada masih didominasi proses manual dan tatap muka. Kesenjangan ini berpotensi menghambat pencapaian pilar Teknologis dalam visi RPJMD SEMANGAT apabila tidak segera diatasi melalui transformasi digital bertahap.

BAB 3
PEMETAAN INOVASI

PENGUATAN KOHESI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN MELALUI INOVASI TATA KELOLA SOSIAL-POLITIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB III
PEMETAAN DAN SELEKSI ENAM INOVASI PRIORITAS

3.1 Kerangka Reklasifikasi Inovasi

Reklasifikasi inovasi dalam kajian ini dilakukan dengan mengkaji tiga elemen setiap entri data: judul/nama program program, uraian singkat pelaksanaan, dan manfaat/dampak yang dilaporkan. Untuk inovasi yang uraian dan manfaatnya kosong (bertanda "-" dalam dokumen rekapitulasi), reklasifikasi dilakukan berdasarkan konteks kategori Asta Cita asal dan makna akronim/judul program, konsisten dengan catatan metodologi yang disertakan dalam dokumen rekapitulasi asli Pemerintah Kabupaten HSS.

Proses reklasifikasi menghasilkan enam klaster tematik sebagaimana telah disajikan pada Bab II, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan kriteria seleksi dan validasi representativitas inovasi prioritas kajian.

3.2 Proses Penetapan dan Validasi Enam Inovasi Prioritas

Berbeda dengan proses seleksi murni berbasis data, keenam inovasi fokus kajian ini Bina Persada, SLRT Menyapa, Bakul Peduli, Pepenabat, SAPA HSS, dan Loksado Inklusif — telah ditetapkan secara jelas sejak awal permintaan kajian. Oleh karena itu, tim kajian menempuh proses validasi dua tahap untuk memastikan keenam inovasi tersebut representatif dan layak dianalisis secara mendalam, bukan sekadar menerima penetapan tanpa telaah kritis.

3.2.1 Tahap 1: Validasi Representativitas Klaster

Tim kajian menelusuri posisi keenam inovasi yang telah ditetapkan terhadap enam klaster tematik hasil reklasifikasi (Bab II). Hasil penelusuran menunjukkan bahwa keenamnya tersebar pada tiga dari enam klaster, dengan pola representasi yang dari sisi isinya selaras dengan fokus kajian "kohesi sosial dan perlindungan hak kelompok rentan":

Tabel 3.1 Representasi Enam Inovasi Terhadap Klaster Tematik

Klaster Tematik	Jumlah dalam Populasi (48)	Inovasi Fokus dari Klaster Ini
Perlindungan Sosial, Bansos & Kemiskinan	8	SLRT Menyapa, Bakul Peduli, Pepenabat (3 dari 8)

Klaster Tematik	Jumlah dalam Populasi (48)	Inovasi Fokus dari Klaster Ini
Reformasi Politik, Hukum & Adminduk	6	SAPA HSS, Loksado Inklusif (2 dari 6)
Kamtibmas & Persatuan Bangsa	5	Bina Persada (1 dari 5)
Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan	22	Tidak diwakili secara langsung
Pendidikan Inklusif & SDM	4	Tidak diwakili secara langsung
Lingkungan, Sanitasi & Toleransi	3	Tidak diwakili secara langsung

Konsentrasi tiga dari enam inovasi fokus pada klaster Perlindungan Sosial, Bansos, dan Kemiskinan bukan merupakan kekurangan representasi, melainkan secara sengaja mencerminkan bahwa klaster tersebut adalah inti langsung dari agenda "perlindungan hak kelompok rentan" yang menjadi judul kajian. Klaster Kesehatan Inklusif (22 inovasi, klaster terbesar) tidak diwakili secara langsung karena sifatnya yang lebih teknis-medis dan lazim dikaji tersendiri dalam kerangka evaluasi sektor kesehatan, sementara klaster Pendidikan dan Lingkungan memiliki populasi yang relatif kecil dan bersifat pelengkap terhadap agenda inti kohesi sosial.

3.2.2 Tahap 2: Validasi Melalui Matriks Skoring Berbobot

Untuk memastikan keenam inovasi yang telah ditetapkan juga memiliki relevansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis — bukan semata mengikuti permintaan awal — tim kajian melakukan validasi kuantitatif melalui matriks penilaian berbobot terhadap empat dimensi evaluatif, sebagaimana dijabarkan pada subbab 3.3 dan 3.4. Hasil validasi menunjukkan bahwa keenam inovasi ini secara empiris juga menempati posisi dengan skor relevansi yang wajar dibandingkan alternatif lain dalam populasi 20 inovasi, mengonfirmasi bahwa penetapan awal telah tepat sasaran.

3.3 Analisis Rantai Layanan (*Service Value Chain*) Kelompok Rentan

Analisis rantai layanan mengkaji tahapan yang harus dilalui seorang warga rentan sejak kebutuhan muncul hingga memperoleh manfaat penuh dari suatu layanan publik. Secara umum, rantai layanan sosial-politik di Kabupaten HSS terdiri atas lima tahap generik: (1) deteksi/identifikasi kebutuhan, (2) pendataan dan verifikasi, (3) penetapan/keputusan layanan, (4) penyaluran/pemberian layanan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut.

Penelusuran terhadap keenam inovasi fokus menunjukkan bahwa titik kritis (bottleneck) paling umum terjadi pada tahap pendataan dan verifikasi (tahap 2) serta evaluasi dan tindak lanjut (tahap 5). Pada tahap 2, keterbatasan digitalisasi menyebabkan proses verifikasi berjalan manual dan rentan keterlambatan (misalnya pada Pepenabat dan Bakul Peduli). Pada tahap 5, minimnya publikasi capaian menyebabkan sulitnya evaluasi dampak program secara berkala (SAPA HSS dan Bakul Peduli).

Tabel 3.2 Titik Kritis Rantai Layanan pada Enam Inovasi Fokus

Inovasi	Tahap Rantai Layanan Paling Lemah	Sifat Kelemahan
Bina Persada	Evaluasi & Tindak Lanjut	Minim basis data digital kerawanan sosial
SLRT Menyapa	Pendataan & Verifikasi	Rujukan antar-tingkat belum digital
Bakul Peduli	Pendataan & Evaluasi	Kriteria & capaian tidak terpublikasi
Pepenabat	Evaluasi & Tindak Lanjut	Standar waktu tanggap belum terukur
SAPA HSS	Penyaluran & Evaluasi	Disposisi dan status aduan tidak transparan
Loksado Inklusif	Integrasi Data	Belum terhubung dengan DTKS/bansos

3.4 Matriks Penilaian dan Pembobotan Kriteria

Untuk memastikan objektivitas dan transparansi seleksi, tim kajian menyusun matriks penilaian berbobot terhadap empat kriteria yang telah diperkenalkan pada Bab I subbab 1.7.4, dengan pembobotan yang mencerminkan prioritas kajian terhadap perlindungan kelompok rentan sebagai kriteria utama.

Tabel 3.3 Bobot Kriteria Penilaian Inovasi

Kriteria	Bobot
Jangkauan Kelompok Rentan	40%
Kejelasan Kelembagaan/SOP	30%
Tingkat Digitalisasi	15%

Kriteria	Bobot
Keterbukaan Data Publik	15%
TOTAL	**100%**

3.5 Proses Perhitungan Skor Komposit

Untuk menjaga transparansi metodologis, tim kajian menyajikan secara jelas proses perhitungan skor komposit tertimbang bagi keenam inovasi fokus, alih-alih hanya menampilkan hasil akhir. Perhitungan menggunakan formula penjumlahan tertimbang (weighted sum) sebagai berikut:

Skor Komposit = (Jangkauan Kelompok Rentan × 0,40) + (Kejelasan Kelembagaan/SOP × 0,30) + (Tingkat Digitalisasi × 0,15) + (Keterbukaan Data Publik × 0,15)

Setiap dimensi diberi skor mentah oleh tim kajian pada skala 1 (rendah) hingga 5 (tinggi) berdasarkan instrumen penilaian pada Lampiran 2, kemudian dikalikan dengan bobotnya masing-masing (Tabel 3.3) untuk memperoleh kontribusi tertimbang per dimensi. Tabel 3.4 menyajikan skor mentah setiap dimensi sebelum pembobotan.

Tabel 3.4 Skor Mentah Empat Dimensi Evaluatif

Inovasi	Jangkauan Kelompok Rentan	Kejelasan Kelembagaan /SOP	Tingkat Digitalisasi	Keterbukaan Data Publik
Bina Persada	3	4	2	2
SLRT Menyapa	5	4	3	2
Bakul Peduli	5	3	1	1
Pepenabat	4	3	2	2
SAPA HSS	3	3	4	1
Loksado Inklusif	5	4	3	4

Contoh perhitungan rinci untuk Loksado Inklusif, inovasi dengan skor komposit tertinggi, diuraikan sebagai berikut:

- Jangkauan Kelompok Rentan: 5 × 0,40 = 2,00 (skor tertinggi karena secara jelas menyebut tiga kelompok rentan sekaligus: disabilitas, lansia, masyarakat adat);

- Kejelasan Kelembagaan/SOP: 4 × 0,30 = 1,20 (uraian dan manfaat program terdokumentasi lengkap dalam rekapitulasi, serta terkait indikator LPPD);
- Tingkat Digitalisasi: 3 × 0,15 = 0,45 (model "jemput bola kolektif" efektif namun belum sepenuhnya digital);
- Keterbukaan Data Publik: 4 × 0,15 = 0,60 (data cakupan layanan relatif dapat ditelusuri dibanding inovasi lain);
- Total Skor Komposit: 2,00 + 1,20 + 0,45 + 0,60 = 4,25.

Sebagai pembanding, perhitungan untuk SAPA HSS — inovasi dengan skor komposit terendah — adalah sebagai berikut: (3 × 0,40) + (3 × 0,30) + (4 × 0,15) + (1 × 0,15) = 1,20 + 0,90 + 0,60 + 0,15 = 2,85. Skor keterbukaan data yang sangat rendah (1) pada SAPA HSS terjadi karena tidak tersedianya data status tindak lanjut aduan yang dipublikasikan, meskipun tingkat digitalisasinya (4) tergolong baik karena sifat dasarnya sebagai kanal pengaduan berbasis digital.

Tabel 3.5 Rincian Kontribusi Tertimbang per Dimensi

Inovasi	Jangkauan (×0,40)	Kelembagaan (×0,30)	Digitalisasi (×0,15)	Keterbukaan (×0,15)	Total
Bina Persada	1,20	1,20	0,30	0,30	3,00
SLRT Menyapa	2,00	1,20	0,45	0,30	3,95
Bakul Peduli	2,00	0,90	0,15	0,15	3,20
Pepenabat	1,60	0,90	0,30	0,30	3,10
SAPA HSS	1,20	0,90	0,60	0,15	2,85
Loksado Inklusif	2,00	1,20	0,45	0,60	4,25

Perhitungan yang disajikan secara rinci ini memungkinkan pihak lain termasuk Bapperida maupun DPRD untuk menelusuri ulang (audit trail) setiap angka skor komposit yang dihasilkan, serta menyesuaikan bobot kriteria pada Tabel 3.3 apabila terdapat prioritas kebijakan yang berbeda di masa mendatang.

3.6 Hasil Skoring dan Penetapan Enam Inovasi Prioritas

Berdasarkan pembobotan pada Tabel 3.3 dan skor kualitatif tim kajian (skala 1–5) terhadap setiap kriteria — sebagaimana dijabarkan lebih lanjut pada Bab IV — diperoleh skor komposit tertimbang untuk enam inovasi fokus kajian sebagai berikut.

Tabel 3.6 Skor Komposit Tertimbang Enam Inovasi Prioritas

Inovasi	Skor Komposit Tertimbang	Peringkat
Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif)	4,25	1
SLRT Menyapa	3,95	2
Bakul Peduli	3,20	3
Pendampingan Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat)	3,10	4
Bina Persada (Kamtibmas)	3,00	5
SAPA HSS	2,85	6

Hasil skoring menegaskan bahwa keenam inovasi yang menjadi fokus kajian ini — sesuai dengan permintaan kajian — secara empiris juga merupakan inovasi-inovasi dengan relevansi tertinggi terhadap agenda kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan di antara populasi 20 inovasi yang dianalisis, dengan Loksado Inklusif dan SLRT Menyapa menempati peringkat tertinggi karena kejelasan kelembagaan dan orientasi jelas terhadap kelompok rentan, sementara SAPA HSS menempati peringkat terendah karena keterbatasan dokumentasi kelembagaan meskipun memiliki tingkat digitalisasi yang relatif baik.

3.7 Profil Ringkas Enam Inovasi Prioritas

Tabel 3.7 merangkum profil ringkas keenam inovasi fokus kajian, mencakup perangkat daerah atau wilayah pengampu serta klaster tematik masing-masing, sebagai rujukan cepat sebelum dikaji lebih mendalam pada Bab IV.

Tabel 3.7 Enam Inovasi Fokus Kajian dan Klaster Tematiknya

Inovasi	Perangkat Daerah/Wilayah	Klaster Tematik
Bina Persada (Kamtibmas)	Kecamatan Kalumpang	Kamtibmas & Persatuan Bangsa
SLRT Menyapa	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial & Bansos
Bakul Peduli	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial & Bansos
Pepenabat	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial & Bansos
SAPA HSS	Diskominfo/Sekretariat Daerah	Reformasi Politik, Hukum & Adminduk

Inovasi	Perangkat Daerah/Wilayah	Klaster Tematik
Loksado Inklusif	Kecamatan Loksado/Disdukcapil	Reformasi Politik, Hukum & Adminduk

- Bina Persada berperan pada level pencegahan dan deteksi dini konflik sosial di tingkat komunitas, menjadi satu-satunya inovasi fokus yang berbasis wilayah kecamatan tunggal (Kalumpang);
- SLRT Menyapa, Bakul Peduli, dan Pepenabat sama-sama diampu Dinas Sosial dan bekerja pada ranah perlindungan sosial, namun dengan peran berbeda: SLRT Menyapa sebagai simpul rujukan, Bakul Peduli sebagai intervensi spesifik lansia, dan Pepenabat sebagai respons cepat kondisi darurat sosial;
- SAPA HSS dan Loksado Inklusif sama-sama tergolong reformasi politik, hukum, dan administrasi kependudukan, namun SAPA HSS berorientasi pada partisipasi/pengaduan sedangkan Loksado Inklusif berorientasi pada pemenuhan hak identitas hukum.

3.8 Keterkaitan Fungsional Antar-Enam Inovasi

Meskipun keenam inovasi diampu oleh perangkat daerah dan wilayah yang berbeda-beda, penelusuran tim kajian menemukan bahwa keenamnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu rangkaian fungsional yang saling menopang dalam upaya penguatan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 3.1.

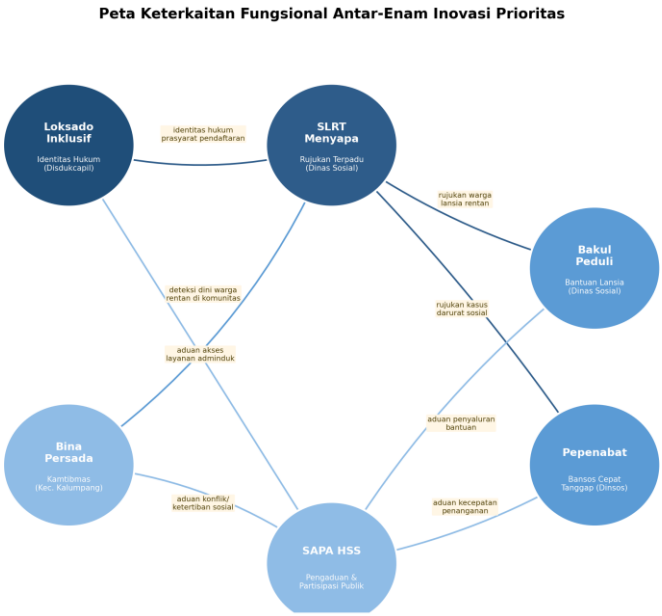

Gambar 3.1 Peta Keterkaitan Fungsional Antar-Enam Inovasi Prioritas

3.8.1 Loksado Inklusif sebagai Prasyarat Identitas Hukum

Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif) berperan sebagai enabler di hulu rangkaian: kepemilikan dokumen kependudukan yang sah merupakan prasyarat administratif bagi warga rentan untuk dapat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan selanjutnya memperoleh rujukan melalui SLRT Menyapa. Tanpa identitas hukum yang valid, warga rentan — khususnya penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat di wilayah terpencil — berisiko tidak dapat mengakses program bantuan sosial formal sama sekali.

3.8.2 SLRT Menyapa sebagai Simpul Rujukan Terpadu

SLRT Menyapa berfungsi sebagai hub rujukan yang menghubungkan warga rentan yang telah teridentifikasi ke layanan spesifik yang relevan: warga lansia dirujuk ke Bakul Peduli, sementara warga yang mengalami kondisi darurat sosial ekonomi dirujuk ke Pepenabat. Dengan demikian, Bakul Peduli dan Pepenabat bukan merupakan program yang berdiri sendiri, melainkan intervensi hilir yang idealnya diaktivasi melalui mekanisme rujukan SLRT Menyapa, meskipun dalam praktiknya — sebagaimana dicatat pada Bab IV — mekanisme rujukan formal antarketiganya belum sepenuhnya terdokumentasi dan terintegrasi.

3.8.3 Bina Persada sebagai Jalur Deteksi Dini Berbasis Komunitas

Bina Persada, meskipun secara kelembagaan berada pada ranah ketenteraman dan ketertiban (bukan perlindungan sosial), memiliki potensi fungsional sebagai jalur deteksi dini di tingkat komunitas: forum dialog dan pembinaan persatuan yang diselenggarakan dapat menjadi ruang mengidentifikasi warga rentan atau situasi kerawanan sosial yang kemudian dapat dirujuk ke SLRT Menyapa. Potensi keterkaitan ini belum dimanfaatkan secara jelas dalam pelaksanaan Bina Persada saat ini, sehingga menjadi salah satu rekomendasi penguatan pada Bab VI.

3.8.4 SAPA HSS sebagai Kanal Umpan Balik Lintas-Layanan

SAPA HSS berperan sebagai mekanisme umpan balik yang menyilang seluruh lima inovasi lainnya: warga dapat menyampaikan aduan terkait keterlambatan penyaluran Bakul Peduli atau Pepenabat, kendala akses layanan Loksado Inklusif, maupun keluhan terkait ketertiban sosial yang menjadi ranah Bina Persada. Dengan demikian, SAPA HSS menjadi instrumen akuntabilitas horizontal yang melengkapi kelima inovasi lainnya, meskipun secara kelembagaan berdiri independen di bawah Diskominfo/Sekretariat Daerah.

Pemahaman atas keterkaitan fungsional ini penting bagi Bapperida dan Dinas Sosial dalam merancang integrasi kebijakan: alih-alih mengevaluasi keenam inovasi secara terpisah per-OPD, evaluasi yang lebih tepat adalah menilai seberapa baik rangkaian identitas → rujukan → intervensi → umpan balik ini berfungsi

sebagai satu sistem perlindungan sosial yang utuh — sebuah kebutuhan yang dijawab melalui usulan model tata kelola terpadu pada Bab VI.

3.9 Katalog Profil Seluruh Inovasi Kohesi Sosial dan Perlindungan Kelompok Rentan. Sub-bab ini memuat profil seluruh inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkaitan dengan kohesi sosial dan perlindungan hak kelompok rentan, berdasarkan dokumen "Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita". Populasi kajian berjumlah 20 inovasi, terdiri atas 13 inovasi inti yang tercatat pada tiga kategori Asta Cita yang secara langsung menaungi agenda kohesi sosial, ditambah 7 inovasi lintas kategori yang sasaran utamanya adalah kelompok rentan.

Tiga kategori inti tersebut adalah Asta Cita 1 tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebanyak 2 inovasi; Asta Cita 6 tentang membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebanyak 8 inovasi; serta Asta Cita 8 tentang memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama sebanyak 3 inovasi. Ketiganya berjumlah 13 inovasi atau hanya 6,1% dari 214 inovasi daerah - porsi yang sangat kecil dibandingkan Asta Cita 7 yang menampung 100 inovasi.

Tujuh inovasi lintas kategori dimasukkan karena isi utamanya menyasar kelompok rentan meskipun tercatat pada kategori lain. LOKSADO INKLUSIF dan MENTANG-MENTANG tercatat pada Asta Cita 7, namun keduanya menjamin hak identitas bagi penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan anak baru lahir. PERJAKA HSS SEMANGAT, KADER ANDALAN, MOBIL GERIATRI, Loket Prioritas, dan SIJIWA BERDAYA tercatat pada Asta Cita 4, namun sasarannya adalah pekerja rentan, kader masyarakat, lansia, ibu hamil, balita, dan penyandang gangguan kesehatan jiwa. Tanpa memasukkan ketujuhnya, gambaran perlindungan kelompok rentan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi tidak utuh.

Temuan pertama kajian ini karena itu bersifat struktural: agenda kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan tersebar di lima kategori Asta Cita yang berbeda dan dikelola oleh perangkat daerah yang berbeda pula. Penyebaran ini menyulitkan pelaporan kinerja yang utuh dan berpotensi menimbulkan pendataan ganda pada sasaran yang sama.

3.9.1 PEMBINAAN DAN PERSATUAN BANGSA DI KECAMATAN

Tabel 3.8 Profil Inovasi PEMBINAAN DAN PERSATUAN BANGSA DI KECAMATAN

1	**Nama Inovasi**	PEMBINAAN DAN PERSATUAN BANGSA DI KECAMATAN (BINA PERSADA)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Kalumpang
3	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan '+62 811-5180-490

4	**Kategori Asta Cita**	AC 1 - Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Kebangsaan & Kerukunan
6	**Uraian Singkat**	Inovasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tibum) Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 difokuskan pada penguatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya preventif dalam menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Inovasi ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, serta unsur Forkopimcam dalam kegiatan pembinaan, dialog, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan di wilayah Kecamatan Kalumpang.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak inovasi Penerapan inovasi Seksi Tibum memberikan dampak positif terhadap capaian kinerja strategis perangkat daerah, antara lain: 1.Meningkatnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang tercermin dari terpeliharanya suasana aman, tertib, dan kondusif. 2.Menurunnya potensi konflik sosial melalui penguatan pemahaman masyarakat terhadap nilai persatuan, toleransi, dan kebhinekaan. 3.Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan secara swadaya dan berkelanjutan. 4.Mendukung pencapaian indikator kinerja strategis kecamatan, khususnya pada urusan pemerintahan umum, pembinaan ideologi Pancasila, dan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa.

3.9.2 SIPASKA HSS

Tabel 3.9 Profil Inovasi SIPASKA HSS

1	**Nama Inovasi**	SIPASKA HSS (Sistem Informasi Pengibar Bendera Pusaka HSS)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kesbangpol
3	**PIC/Narahubung**	0815-4564-0199 - Melda
4	**Kategori Asta Cita**	AC 1 - Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Kebangsaan & Kerukunan
6	**Uraian Singkat**	Sistem informasi untuk transparansi dan efisiensi pengelolaan, seleksi, serta pembinaan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas proses seleksi Paskibraka serta memperkuat pembinaan nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan generasi muda

3.9.3 BERSEMANGAT

Tabel 3.10 Profil Inovasi BERSEMANGAT

1	**Nama Inovasi**	BERSEMANGAT (BERSAMA MENGAYOMI ANAK TERLANTAR)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Sosial

3	**PIC/Narahubung**	randi
4	**Kategori Asta Cita**	AC 6 - Membangun dari desa dan pemberantasan kemiskinan
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Perlindungan Anak
6	**Uraian Singkat**	BERSEMANGAT merupakan inovasi pelayanan sosial yang mengintegrasikan bantuan sosial, pendampingan psikososial, penguatan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat dalam satu model pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan. Melalui inovasi ini, anak terlantar tidak hanya menerima bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperoleh layanan pendampingan sosial, psikoedukasi, motivasi belajar, serta dukungan masyarakat melalui gerakan kepedulian sosial yang terorganisir. Inovasi ini mengubah paradigma pelayanan dari sekadar memberi bantuan menjadi mengayomi, membina, dan mendampingi anak menuju kemandirian sosial yang lebih baik.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Pada Tahun 2025, inovasi BERSEMANGAT telah memberikan layanan kepada: 1. 367 anak terlantar penerima bantuan sosial. 2. Program BERUPAYA sebanyak 213 anak. 3. Program PKSA sebanyak 154 anak. 4. Total bantuan sosial sebesar Rp801.600.000. 5. Santunan 10 Muharram kepada 354 anak terlantar. Melalui inovasi ini, Dinas Sosial berhasil mencapai: 1. Capaian layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sebesar 100%. 1. Total 919 anak terlantar memperoleh layanan sosial dasar. 2. Ketepatan sasaran penerima bantuan rehabilitasi sosial sebesar 100%. 1. Peningkatan efektivitas intervensi kesejahteraan sosial pada keluarga desil 1–5.

3.9.4 BAKUL PEDULI

Tabel 3.11 Profil Inovasi BAKUL PEDULI

1	**Nama Inovasi**	BAKUL PEDULI (BANTUAN KESEJAHTERAAN UNTUK LANJUT USIA : PEMERINTAH PEDULI LANJUT USIA)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Sosial
3	**PIC/Narahubung**	randi
4	**Kategori Asta Cita**	AC 6 - Membangun dari desa dan pemberantasan kemiskinan
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Perlindungan Lansia

6	**Uraian Singkat**	BAKUL PEDULI merupakan inovasi pelayanan sosial yang mengintegrasikan bantuan sosial jaminan hidup dengan program pendampingan sosial melalui pelibatan pejabat pemerintah sebagai pengasuh atau orang tua asuh lansia. Inovasi ini mengintegrasikan berbagai program kesejahteraan sosial bagi lansia dalam upaya mengoptimalkan layanan yang berorientasi pada kesejahteraan lansia secara inklusif, di antaranya melalui bantuan sosial yang adaptif, pelayanan dan bimbingan psikososial, serta keterlibatan aktif pejabat pemerintah dalam program Pejabat Asuh Lansia melalui kunjungan dan pendampingan berkala sebagai representasi kehadiran pemerintah, tidak hanya melalui bantuan sosial tetapi juga secara fisik, sosial, dan psikologis bagi lansia penerima manfaat. Melalui inovasi ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia, tetapi juga menghadirkan dukungan psikososial melalui kunjungan rutin, komunikasi, perhatian, dan pendampingan kepada lansia yang hidup sendiri atau berada dalam kondisi rentan. Inovasi ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan kesejahteraan lansia secara holistik, meliputi aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan psikologis.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Pada Tahun 2025, inovasi BAKUL PEDULI telah menghasilkan: 1. Sebanyak 865 lanjut usia menerima Bantuan Sosial Jaminan Hidup Lanjut Usia (JADUP LU). 2. Total bantuan sosial yang disalurkan mencapai Rp2.173.050.000. 3. Sebanyak 160 lanjut usia mendapatkan layanan pendampingan melalui Program Pejabat Pemerintah Asuh Lansia. 4. Capaian layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti mencapai 100 persen. 5. Sebanyak 883 lanjut usia memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar. Dampak yang dirasakan melalui inovasi daerah BAKUL PEDULI antara lain: 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia. 2. Meningkatnya kepedulian sosial terhadap kelompok lanjut usia. 1. Terwujudnya pelayanan sosial yang lebih inklusif dan humanis.

3.9.5 PROGRAM RUMAH SEJAHTERA

Tabel 3.12 Profil Inovasi PROGRAM RUMAH SEJAHTERA

1	**Nama Inovasi**	PROGRAM RUMAH SEJAHTERA (PRS)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Sosial
3	**PIC/Narahubung**	randi
4	**Kategori Asta Cita**	AC 6 - Membangun dari desa dan pemberantasan kemiskinan
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Kesejahteraan Keluarga
6	**Uraian Singkat**	Program Rumah Sejahtera merupakan inovasi pelayanan publik yang mengubah pendekatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni dari sekadar rehabilitasi fisik menjadi upaya terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan warga, program ini mampu memperluas cakupan layanan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan yang inovatif, transparan, dan berkelanjutan, Program Rumah Sejahtera diharapkan menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Program Rumah Sejahtera memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan. Dari aspek sosial, program ini berhasil meningkatkan kualitas hunian masyarakat sehingga menjadi lebih sehat, aman, dan layak huni. Perbaikan kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal turut meningkatkan rasa aman bagi keluarga penerima manfaat serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dari aspek ekonomi, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga yang sebelumnya harus dialokasikan untuk perbaikan rumah. Kondisi tempat tinggal yang lebih layak juga mendukung meningkatnya produktivitas anggota keluarga serta membuka peluang pemberdayaan ekonomi melalui lingkungan yang lebih kondusif untuk menjalankan aktivitas usaha maupun pekerjaan. Sementara itu, dari aspek pemerintahan, Program Rumah Sejahtera mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan responsif melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan masyarakat mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola pelayanan publik yang berkelanjutan.

3.9.6 SLRT Menyapa

Tabel 3.13 Profil Inovasi SLRT Menyapa

1	**Nama Inovasi**	SLRT Menyapa
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Sosial
3	**PIC/Narahubung**	randi
4	**Kategori Asta Cita**	AC 6 - Membangun dari desa dan pemberantasan kemiskinan
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Data & Rujukan Sosial
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan sosial proaktif (jemput bola) dan terintegrasi yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengidentifikasi kebutuhan, memverifikasi data, serta menangani keluhan dan masalah penanganan fakir miskin serta Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Melalui pendekatan "Menyapa Warga", petugas dan fasilitator SLRT hadir langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi, memperbarui data kemiskinan, serta menghubungkan warga kurang mampu dengan berbagai program perlindungan sosial dan jaminan kesehatan daerah secara cepat dan tepat sasaran.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Mempercepat Penanganan Masalah Sosial: Memberikan respon cepat (quick response) terhadap warga miskin atau rentan yang membutuhkan bantuan darurat, perlindungan sosial, maupun jaminan kesehatan (BPJS/PBI). Meningkatkan Akurasi Data Kemiskinan: Memastikan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan secara akurat, mutakhir, dan transparan melalui verifikasi lapangan secara berkala. Mempermudah Aksesibilitas Layanan Warga Rentan: Membantu kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar) yang mengalami keterbatasan fisik/ekonomi agar tetap mendapatkan pelayanan sosial tanpa perlu datang ke kantor dinas. Memperkuat Integrasi & Rujukan Lintas Sektor: Mengoptimalkan alur rujukan antar-program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi sehingga bantuan pemerintah dapat diterima secara holistik oleh keluarga penerima manfaat.

3.9.7 PENDAMPINGAN PENYALURAN BANSOS CEPAT TANGGAP

Tabel 3.14 Profil Inovasi PENDAMPINGAN PENYALURAN BANSOS CEPAT TANGGAP

1	**Nama Inovasi**	PENDAMPINGAN PENYALURAN BANSOS CEPAT TANGGAP (PEPENABAT)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Kalumpang
3	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan
4	**Kategori Asta Cita**	AC 6 - Membangun dari desa dan pemberantasan kemiskinan
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Penyaluran Bantuan Sosial

6	**Uraian Singkat**	Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap merupakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendataan dan verifikasi langsung di lapangan serta koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Percepatan Respon Bantuan Darurat: Menekan hambatan birokrasi sehingga bantuan sosial bagi warga yang mengalami krisis, musibah, atau kondisi darurat dapat disalurkan secara cepat dan tepat waktu. Menjamin Ketepatan Sasaran (Right Target): Melalui pendampingan dan verifikasi langsung di lapangan, inovasi ini meminimalisir risiko penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran atau tumpang tindih data. Perlindungan bagi Kelompok Rentan: Memudahkan akses bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, serta warga terlantar yang mengalami kesulitan mobilitas untuk mengurus administrasi bantuan. Meningkatkan Transparansi & Kepercayaan Publik: Mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan sosial yang transparan, akuntabel, dan tanggap terhadap aduan masyarakat.

3.9.8 SAHABAT SIMPUR

Tabel 3.15 Profil Inovasi SAHABAT SIMPUR

1	**Nama Inovasi**	SAHABAT SIMPUR (Sinergi Amal Hasilkan Bantuan Tepat Sasaran di Simpur)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Simpur
3	**PIC/Narahubung**	hj.ipah
4	**Kategori Asta Cita**	AC 6 - Membangun dari desa dan pemberantasan kemiskinan
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Penyaluran Bantuan Sosial
6	**Uraian Singkat**	Inovasi tata kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Simpur yang memadukan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat/infaq/sedekah, sektor swasta, dan elemen masyarakat. Program ini berfokus pada pengintegrasian pendataan, pemetaan kebutuhan warga miskin/rentan, serta penyelarasan penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial dan keagamaan. Melalui satu wadah konsolidasi terpadu, inovasi ini memastikan seluruh potensi amal, hibah, dan bantuan dana sosial terdistribusi secara transparan, merata, dan tepat sasaran tanpa adanya tumpang tindih (overlapping).

7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penyaluran Bantuan yang Tepat Sasaran: Meminimalisir risiko bantuan ganda atau tidak tepat sasaran melalui konsolidasi dan pembaruan data penerima manfaat yang terintegrasi di tingkat kecamatan/desa. Optimalisasi Potensi Dana Sosial & Keagamaan: Menggalang dan menyelaraskan potensi zakat, infaq, sedekah, serta CSR swasta untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan penanganan warga rentan di Kecamatan Simpur. Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas: Mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan publik yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan kepercayaan para dermawan dan masyarakat. Memperkuat Gotong Royong & Kepedulian Sosial: Mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam aksi kepedulian bersama untuk membantu warga yang membutuhkan secara berkelanjutan.

3.9.9 LUNA MAYA

Tabel 3.16 Profil Inovasi LUNA MAYA

1	**Nama Inovasi**	LUNA MAYA (LURAH MENGINAP DI RUMAH MASYARAKAT)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Kategori Asta Cita**	AC 6 - Membangun dari desa dan pemberantasan kemiskinan
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Partisipasi & Aspirasi Warga
6	**Uraian Singkat**	Inovasi LUNA MAYA (Lurah Menginap di Rumah Masyarakat) merupakan pendekatan personal untuk mendekatkan pemimpin kelurahan dengan warganya melalui kegiatan lurah menginap secara bergiliran di rumah masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kedekatan emosional antara lurah dan warga melalui pendekatan langsung, menyerap aspirasi secara nyata dan personal tanpa batas formalitas forum, menggali potensi serta permasalahan di lingkungan masing-masing, dan menumbuhkan rasa kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Manfaatnya dirasakan oleh berbagai pihak: bagi masyarakat, mereka merasa didengar dan diperhatikan langsung oleh pemimpinnya, mampu menyampaikan persoalan tanpa tekanan, serta tumbuh rasa percaya terhadap pemerintah kelurahan; bagi pemerintah kelurahan, diperoleh data sosial dan keluhan warga secara langsung, terbentuk citra pemimpin yang peduli dan hadir di tengah masyarakat, serta memungkinkan pemetaan permasalahan spesifik di tiap RT/RW secara akurat; bagi lingkungan, tercipta solidaritas antarwarga melalui interaksi bersama lurah dan tumbuh semangat gotong royong untuk menyambut serta mendampingi lurah. Hasil dari inovasi ini meliputi meningkatnya kepercayaan dan kedekatan warga terhadap lurah karena kehadirannya dalam kehidupan sehari-

		hari, hubungan yang lebih akrab dan terbuka, terserapnya aspirasi serta masukan secara langsung tanpa distorsi, terungkapnya berbagai persoalan yang sebelumnya tidak tampak di forum resmi, serta terkumpulnya data sosial dan lingkungan yang lebih akurat dan kontekstual untuk bahan kebijakan. Selain itu, tumbuh rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan, meningkatnya kesadaran untuk menjaga lingkungan dan berinovasi bersama, menguatnya kolaborasi antara RT/RW dan pemerintah kelurahan karena lurah menjadi bagian dari dinamika warga, serta dokumentasi program dalam bentuk laporan, video, dan testimoni warga yang menjadi inspirasi inovasi lainnya. Program ini juga mendorong perubahan pola kepemimpinan kelurahan dari birokratis menjadi humanis, solutif, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat, menjadikan lurah bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai bagian dari warga itu sendiri.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Pelaksanaan inovasi LUNA MAYA memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan hubungan antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih dekat dan humanis, masyarakat merasakan kehadiran lurah secara langsung dalam kehidupan sehari-hari sehingga tumbuh rasa percaya, dihargai, dan diperhatikan. Hubungan yang sebelumnya bersifat formal berkembang menjadi lebih akrab, terbuka, dan komunikatif. Inovasi ini juga memungkinkan aspirasi, keluhan, serta harapan masyarakat terserap secara langsung tanpa melalui perantara, sehingga berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak teridentifikasi dalam forum resmi dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Selain itu, hasil observasi langsung di lapangan menghasilkan data sosial dan kondisi lingkungan yang lebih akurat, faktual, dan kontekstual sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan di tingkat kelurahan. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kegiatan, LUNA MAYA berhasil menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan dan mendorong meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan. Semangat gotong royong, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, serta munculnya berbagai gagasan inovatif dari masyarakat semakin berkembang seiring dengan intensitas interaksi antara pemerintah kelurahan dan warga. Inovasi ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah kelurahan dengan RT/RW. Koordinasi menjadi lebih efektif karena lurah terlibat langsung dalam dinamika masyarakat, sementara RT/RW semakin termotivasi untuk mengorganisasi kegiatan kemasyarakatan dengan dukungan penuh dari pemerintah kelurahan. Seluruh pelaksanaan kegiatan LUNA MAYA didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk laporan, foto, video, dan testimoni masyarakat sebagai bahan evaluasi serta media pembelajaran. Dokumentasi tersebut menjadi referensi praktik baik yang berpotensi direplikasi oleh kelurahan lain sebagai

		model pelayanan publik berbasis pendekatan personal dan partisipatif. Secara keseluruhan, LUNA MAYA telah mendorong perubahan pola kepemimpinan di tingkat kelurahan dari yang semula berorientasi pada birokrasi administratif menjadi kepemimpinan yang lebih humanis, responsif, dan solutif. Kehadiran lurah tidak lagi hanya dipandang sebagai pejabat pemerintahan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang hadir untuk mendengar, mendampingi, dan bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan kelurahan.

3.9.10 ELPUJI SUBSIDI TEPAT SASARAN

Tabel 3.17 Profil Inovasi ELPUJI SUBSIDI TEPAT SASARAN

1	**Nama Inovasi**	ELPUJI SUBSIDI TEPAT SASARAN
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Kategori Asta Cita**	AC 6 - Membangun dari desa dan pemberantasan kemiskinan
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Keadilan Subsidi
6	**Uraian Singkat**	(LPG Subsidi Tepat Sasaran) merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Kelurahan Kandangan Utara untuk memastikan penyaluran LPG subsidi 3 kg tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Inovasi ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan pangkalan LPG dengan mengintegrasikan proses pendataan, verifikasi, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi dalam satu mekanisme pelayanan yang transparan dan akuntabel. Melalui inovasi ini, Kelurahan Kandangan Utara melakukan pendataan dan verifikasi penerima manfaat secara berkala, kemudian menerbitkan Kartu Penerima LPG Subsidi sebagai identitas resmi bagi masyarakat yang berhak memperoleh LPG subsidi. Penyaluran dilakukan melalui dua pangkalan LPG yang telah menjalin kerja sama dengan kelurahan, sehingga distribusi menjadi lebih tertib, tepat sasaran, dan meminimalkan penyalahgunaan subsidi. Inovasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat miskin dalam memperoleh akses terhadap LPG subsidi, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi, efisiensi penggunaan anggaran subsidi, serta memperkuat sinergi antara pemerintah kelurahan dan pelaku usaha. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, LPGKU mendukung terwujudnya keadilan sosial, mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah, serta memastikan hak masyarakat terhadap subsidi energi dapat terpenuhi secara optimal.

7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Hasil inovasi ini terciptanya keadilan sosial, penyaluran subsidi yang terverifikasi tepat sasaran, kepercayaan terhadap pemerintah semakin menguat, mengurangi beban pokok hidup masyarakat miskin dan mengurangi potensi kemiskinan ekstreme.

3.9.11 GERAKAN MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tabel 3.18 Profil Inovasi GERAKAN MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN DI

1	**Nama Inovasi**	GERAKAN MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN (GERAK MAS DARLING)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dispera KPLH
3	**PIC/Narahubung**	Risa Maulida +62 812-2888-2448
4	**Kategori Asta Cita**	AC 8 - Keharmonisan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Lingkungan & Gotong Royong
6	**Uraian Singkat**	Rancang Bangun Inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (GERAK MASDARLING) Inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (GERAK MASDARLING) merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penguatan peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama pelestarian lingkungan. Inovasi ini dikembangkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebagai implementasi tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Latar belakang inovasi ini berangkat dari kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki luas wilayah 1.804,94 km² dengan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah, rawa hingga kawasan pegunungan. Potensi sumber daya alam berupa hutan, pertanian, perkebunan, serta pertambangan menjadi modal pembangunan daerah, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas ekonomi turut menjadi faktor pendorong meningkatnya pencemaran, timbulan sampah, dan degradasi lingkungan. GERAK MASDARLING dirancang sebagai inovasi kolaboratif berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan peran pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, media, dan masyarakat dalam satu gerakan bersama. Pendekatan

		yang digunakan meliputi edukasi lingkungan, kampanye perubahan perilaku, aksi nyata pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penghijauan, konservasi sumber daya alam, serta pemberian apresiasi kepada individu maupun kelompok yang berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Pelaksanaan inovasi dilakukan melalui tahapan perencanaan, sosialisasi, pembentukan kelompok sadar lingkungan, pendampingan, pelaksanaan aksi lingkungan, monitoring, evaluasi, dan pemberian penghargaan. Seluruh kegiatan didukung dengan koordinasi lintas perangkat daerah serta sinergi dengan pemerintah kecamatan, desa, sekolah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan sehingga tercipta jejaring kerja yang berkelanjutan. Hasil yang diharapkan dari implementasi GERAK MASDARLING adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, berkurangnya pencemaran dan timbulan sampah, meningkatnya ruang terbuka hijau, serta tumbuhnya budaya peduli lingkungan di seluruh lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memperkuat ketahanan lingkungan daerah, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Keberhasilan inovasi ini didukung oleh komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan, penganggaran, penguatan kelembagaan, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sehingga GERAK MASDARLING menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Manfaat Inovasi GERAK MASDARLING Pelaksanaan inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (GERAK MASDARLING) memberikan manfaat yang nyata bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan lingkungan hidup melalui peningkatan kolaborasi, perubahan perilaku, serta penguatan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Adapun manfaat yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1. Mendukung terwujudnya tujuan Program Adipura secara berjenjang hingga tingkat masyarakat. Melalui GERAK MASDARLING, prinsip-prinsip Program Adipura diimplementasikan tidak hanya pada tingkat pemerintah daerah, tetapi juga hingga tingkat kecamatan, desa, kelurahan, sekolah, dan komunitas. Inovasi ini menjadi instrumen pengawasan sekaligus penggerak kinerja daerah dalam pengelolaan sampah, pemeliharaan ruang terbuka hijau, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, tercipta lingkungan yang bersih, teduh, sehat, nyaman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan sungai melalui pembentukan Komunitas Peduli Sungai. Keberadaan Komunitas

		Peduli Sungai menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian daerah aliran sungai. Komunitas ini berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai, melakukan aksi bersih sungai, pemantauan pencemaran, serta berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pencemaran air. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya Indeks Kualitas Air serta terpeliharanya fungsi sungai sebagai sumber kehidupan dan penyangga ekosistem. 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui gerakan sedekah sampah. Inovasi ini mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya dan menyumbangkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi melalui program sedekah sampah. Hasil pengelolaan sampah tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, salah satunya membantu percepatan pengurangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dengan demikian, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. 4. Mendorong perubahan perilaku kolektif menuju masyarakat yang sehat dan peduli lingkungan. Berbagai kegiatan edukasi, kampanye, dan aksi nyata yang dilaksanakan secara berkelanjutan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Perubahan perilaku ini diwujudkan melalui kebiasaan membuang dan memilah sampah dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, serta berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan sehingga tercipta lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. GERAK MASDARLING memperkuat kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, inovasi ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar retribusi pelayanan persampahan. Peningkatan kepatuhan tersebut berkontribusi terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah memiliki kapasitas yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan persampahan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dampak Inovasi GERAK MASDARLING Implementasi inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (GERAK MASDARLING) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

		1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah. Melalui berbagai aksi pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi sungai, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, kondisi lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, asri, dan nyaman. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya kualitas udara, kualitas air, serta terjaganya keseimbangan ekosistem. 2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi pencemaran, dan melestarikan sumber daya alam berkontribusi terhadap peningkatan indikator-indikator penyusun IKLH, khususnya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan pengelolaan sampah. 3. Terbentuknya budaya peduli lingkungan di masyarakat. GERAK MASDARLING mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, memilah sampah dari sumbernya, mengurangi penggunaan bahan yang berpotensi mencemari lingkungan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 4. Meningkatnya kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, sekolah, komunitas, media, dan masyarakat menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih partisipatif, efektif, dan berkelanjutan sehingga penyelesaian permasalahan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama. 5. Meningkatnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Program sedekah sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat memberikan nilai tambah ekonomi dari sampah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Hasil pengelolaan tersebut mendukung kegiatan sosial, seperti membantu pengurangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sekaligus membuka peluang usaha di bidang ekonomi sirkular dan daur ulang. 6. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan persampahan. Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pelayanan persampahan semakin meningkat, sehingga berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan penerimaan daerah tersebut mendukung penyediaan sarana dan prasarana persampahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. 7. Meningkatnya daya saing daerah. Keberhasilan GERAK MASDARLING dalam membangun partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam berbagai penilaian kinerja lingkungan, seperti Program Adipura maupun penghargaan di bidang inovasi daerah. Dampak akhirnya adalah terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan serta

		meningkatnya citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah yang bersih, hijau, sehat, dan berwawasan lingkungan.

3.9.12 GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT

Tabel 3.19 Profil Inovasi GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT

1	**Nama Inovasi**	GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT (Gerakan Layanan Sampah jadi Ibadah Dunia Akhirat)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dispera KPLH
3	**PIC/Narahubung**	Risa Maulida +62 812-2888-2448
4	**Kategori Asta Cita**	AC 8 - Keharmonisan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Lingkungan & Gotong Royong
6	**Uraian Singkat**	Rancang Bangun Inovasi GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT (Gerakan Layanan Sampah Jadi Ibadah Dunia Akhirat) GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT (Gerakan Layanan Sampah Jadi Ibadah Dunia Akhirat) merupakan inovasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai keagamaan. Inovasi ini merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya, yaitu PAH BUATI BAASUH (Sampah Buat Ibadah, Bukan Sebagai Musuh) yang telah diinisiasi sejak tahun 2017. Pengembangan inovasi dilakukan untuk memperkuat perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan religius sehingga kepedulian terhadap lingkungan tumbuh seiring dengan semangat berbagi kepada sesama. Latar belakang inovasi ini berangkat dari masih tingginya timbulan sampah rumah tangga serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya. Sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang yang tidak bernilai sehingga pengelolaannya belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pencemaran lingkungan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah. Melalui GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT, masyarakat diajak mengubah paradigma bahwa sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai ibadah. Sampah yang telah dipilah diserahkan kepada Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk ditimbang dan dinilai berdasarkan jenis serta harga yang berlaku. Nilai ekonomi hasil penjualan sampah tidak diberikan kepada penyetor, melainkan disalurkan sebagai sedekah kepada panti asuhan, masyarakat kurang mampu, maupun kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat beramal melalui sampah yang sebelumnya dianggap tidak bermanfaat.

		Pelaksanaan inovasi dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pembentukan jejaring bank sampah, layanan pengumpulan sampah pilah, penimbangan dan pencatatan, penyaluran hasil sedekah, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Implementasi inovasi melibatkan pemerintah daerah, Bank Sampah Induk, pemerintah desa dan kelurahan, lembaga keagamaan, sekolah, komunitas lingkungan, dunia usaha, media, dan masyarakat sebagai mitra kolaboratif. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah sejak dari sumbernya, memperkuat budaya memilah sampah, mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA, meningkatkan kepedulian sosial melalui program sedekah sampah, serta memperkuat nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Dalam jangka panjang, GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, penguatan ekonomi sirkular, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial, serta terwujudnya tata kelola persampahan yang berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini menjadi contoh bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan manfaat lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memberikan nilai spiritual yang mampu membangun perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Manfaat Inovasi GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT Pelaksanaan inovasi GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT (Gerakan Layanan Sampah Jadi Ibadah Dunia Akhirat) memberikan manfaat yang luas bagi aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Manfaat yang dihasilkan antara lain sebagai berikut: 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Inovasi ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memilah dan menyetorkan sampah sejak dari sumbernya sehingga pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 2. Mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Melalui pendekatan nilai-nilai keagamaan, masyarakat didorong untuk memandang sampah bukan sebagai barang yang tidak berguna, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi sarana beribadah melalui sedekah sampah. 3. Mengurangi timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Semakin banyak sampah yang dipilah, didaur ulang, dan dimanfaatkan melalui Bank Sampah Induk, semakin berkurang volume sampah yang harus ditangani di TPA. Hal ini mendukung pengelolaan persampahan yang lebih efisien dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Hasil penjualan sampah yang disalurkan sebagai sedekah kepada panti asuhan

		dan masyarakat yang membutuhkan memberikan manfaat sosial secara langsung. Program ini memperkuat budaya gotong royong, kepedulian, dan semangat berbagi antarwarga. 5. Mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Berkurangnya sampah yang dibuang sembarangan berdampak pada lingkungan yang lebih bersih, sehat, indah, dan nyaman. Kondisi tersebut turut mendukung peningkatan kualitas air, kebersihan permukiman, serta kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. 6. Membangun karakter masyarakat yang peduli lingkungan dan berakhlak sosial. Integrasi nilai keagamaan dengan pengelolaan sampah membentuk kebiasaan positif yang berkelanjutan, sehingga kepedulian terhadap lingkungan berjalan seiring dengan kepedulian terhadap sesama. 7. Memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Inovasi ini mempererat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Sampah Induk, pemerintah desa dan kelurahan, lembaga keagamaan, sekolah, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola persampahan yang partisipatif dan berkelanjutan. 8. Mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT berkontribusi terhadap pencapaian target pengurangan sampah, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penguatan ekonomi sirkular, serta terwujudnya masyarakat yang peduli lingkungan, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai religius. Dampak Inovasi GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT Implementasi inovasi GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT (Gerakan Layanan Sampah Jadi Ibadah Dunia Akhirat) telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 1. Terwujudnya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat yang sebelumnya memandang sampah sebagai limbah yang tidak bernilai kini mulai terbiasa memilah sampah dari sumbernya, menyetorkan sampah ke Bank Sampah Induk, serta menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup sehari-hari. 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah. Pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan mampu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program sedekah sampah. Partisipasi ini memperkuat gerakan pengurangan sampah dari sumbernya sehingga volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat ditekan.

		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Berkurangnya sampah yang dibuang sembarangan berdampak pada lingkungan permukiman yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Selain itu, risiko pencemaran tanah, air, dan saluran drainase juga menurun sehingga mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. 4. Terwujudnya manfaat sosial melalui sedekah sampah. Hasil penjualan sampah yang didonasikan kepada panti asuhan dan masyarakat yang membutuhkan menciptakan manfaat sosial yang nyata. Inovasi ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen kepedulian sosial dan penguatan nilai gotong royong. 5. Mendukung pengembangan ekonomi sirkular. Sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai kini menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses pemilahan dan daur ulang. Hal ini meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 6. Meningkatnya kolaborasi lintas sektor. Pelaksanaan inovasi memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Sampah Induk, pemerintah desa dan kelurahan, lembaga keagamaan, dunia usaha, sekolah, komunitas, media, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menciptakan tata kelola persampahan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. 7. Mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah. Inovasi ini berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pengurangan timbulan sampah, peningkatan pelayanan persampahan, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada pengelolaan kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta perlindungan ekosistem daratan. 8. Terbangunnya budaya "Sampah Menjadi Ibadah". Dampak utama dari inovasi ini adalah lahirnya budaya baru di masyarakat, yaitu menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Pendekatan ini menciptakan perubahan perilaku yang lebih kuat dan berkelanjutan karena didorong oleh kesadaran moral, nilai keagamaan, dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata karena kewajiban administratif.

3.9.13 1000 BIOPORI

Tabel 3.20 Profil Inovasi 1000 BIOPORI

1	**Nama Inovasi**	1000 BIOPORI
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara

3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Kategori Asta Cita**	AC 8 - Keharmonisan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Lingkungan & Gotong Royong
6	**Uraian Singkat**	Inovasi berorientasi lingkungan hidup dan mitigasi bencana melalui pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) secara masif dan terstruktur di permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta lingkungan perkantoran. Program ini mengombinasikan pemanfaatan sampah organik rumah tangga sebagai pengisi lubang resapan guna mempercepat laju resapan air hujan ke dalam tanah, menjaga kelembaban tanah, serta mengolah sampah organik menjadi kompos secara alami berbasis partisipasi masyarakat.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Mitigasi Bencana Genangan & Banjir: Meningkatkan daya serap air tanah secara signifikan sehingga efektif mengurangi risiko genangan air hujan dan banjir lokal di permukiman. Pencegahan Kekeringan & Konservasi Air Tanah: Membantu cadangan air bawah tanah (aquifer) terisi kembali saat musim hujan guna menjaga ketersediaan air bersih di musim kemarau. Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Sumber: Mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan mengalihkannya menjadi bahan pembuat pupuk kompos alami di dalam lubang biopori. Peningkatan Kesadaran Lingkungan Masyarakat: Mendorong keterlibatan aktif warga, sekolah, dan instansi dalam aksi nyata pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim.

3.9.14 LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu Pintu untuk Administrasi Keluarga Terpadu

Tabel 3.21 Profil Inovasi LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu

1	**Nama Inovasi**	LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu Pintu untuk Administrasi Keluarga Terpadu
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Loksado
3	**PIC/Narahubung**	Karmila
4	**Kategori Asta Cita**	AC 7 - Reformasi birokrasi (lintas kategori)
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Hak Identitas Kelompok Rentan
6	**Uraian Singkat**	Membantu masyarakat memiliki legalitas hukum yang kuat atas identitas mereka yang penting untuk akses pendidikan, kesehatan, dan perbankan serta menjamin penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat mendapatkan identitas resmi secara kolektif tanpa biaya perjalanan yang mahal.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	inovasi ini memastikan bahwa "aliran" kinerja dari tingkat kabupaten hingga ke seksi di kecamatan (CKS) berjalan efektif karena hambatan geografis dan administratif warga berhasil dipangkas melalui layanan terpadu ini serta berkontribusi positif terhadap nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten HSS, yang merupakan salah satu poin penilaian penting dalam laporan kinerja pemerintah daerah (LPPD)

3.9.15 MENTANG-MENTANG

Tabel 3.22 Profil Inovasi MENTANG-MENTANG

1	**Nama Inovasi**	MENTANG-MENTANG (MELAHIRKAN TENANG, DOKUMEN DATANG) V2
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	**PIC/Narahubung**	Eko
4	**Kategori Asta Cita**	AC 7 - Reformasi birokrasi (lintas kategori)
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Hak Identitas Kelompok Rentan
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik terpadu di bidang administrasi kependudukan dan kesehatan yang merupakan pengembangan (upgrading) dari versi sebelumnya. Program ini memberikan kemudahan bagi ibu melahirkan di fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, maupun klinik bersalin) untuk langsung mendapatkan paket dokumen kependudukan secara terintegrasi—seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) baru, dan Kartu Identitas Anak (KIA)—sebelum pulang ke rumah. Versi kedua (V2) menghadirkan pemutakhiran sistem integrasi data yang lebih cepat, perluasan cakupan mitra faskes, serta kemudahan pengiriman dokumen secara langsung demi kenyamanan dan ketenangan keluarga baru.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Kemudahan & Ketenangan Bagi Orang Tua Baru: Ibu dan keluarga dapat fokus pada proses pemulihan dan perawatan bayi (melahirkan tenang) tanpa perlu repot mengurus administrasi ke kantor dinas kependudukan. Penerbitan Dokumen Terintegrasi & Cepat (3-in-1): Sekali proses, warga langsung mendapatkan beberapa dokumen kependudukan sekaligus (Akta Kelahiran, KK terbaru, dan KIA) secara akurat. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Anak: Mengakselerasi persentase kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA sejak bayi baru lahir guna menjamin hak-hak sipil anak di daerah. Penguatan Sinergi Faskes & Disdukcapil: Memperkuat kolaborasi sistemik dan pengintegrasian data layanan antara fasilitas kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.9.16 PERJAKA HSS SEMANGAT

Tabel 3.23 Profil Inovasi PERJAKA HSS SEMANGAT

1	**Nama Inovasi**	PERJAKA HSS SEMANGAT (Program Perlindungan Tenaga Kerja Kab. Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi dan Teknologis)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**PIC/Narahubung**	Hafis Anshari
4	**Kategori Asta Cita**	AC 4 - Pembangunan SDM (lintas kategori)

5	**Klaster Kohesi Sosial**	Perlindungan Pekerja Rentan
6	**Uraian Singkat**	Best Practise dalam upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja yang mencakup tiga kategori: pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/pekerja informal atau rentan dan pekerja jasa konstruksi
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Merupakan amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2, salah satu sasaran ASTA CITA dan program strategis nasional dan merupakan IKU Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM Kab. HSS yaitu peningkatan perlindungan tenaga kerja.

3.9.17 KADER ANDALAN

Tabel 3.24 Profil Inovasi KADER ANDALAN

1	**Nama Inovasi**	KADER ANDALAN
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Kategori Asta Cita**	AC 4 - Pembangunan SDM (lintas kategori)
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Kader & Modal Sosial
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kader masyarakat (kader Posyandu, kesehatan, dan pembangunan) secara berkelanjutan. Program ini berfokus pada pelatihan keterampilan klinis/sosial dasar, penyusunan alur kerja terpadu, pendampingan lapangan, serta pemberian apresiasi bagi kader sebagai garda terdepan (frontliner) dalam mendeteksi masalah kesehatan, gizi, dan sosial warga di tingkat desa/kelurahan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Peningkatan Kualitas Layanan Dasaran: Meningkatkan kompetensi, keaktifan, dan ketepatan kader dalam melakukan pendataan, deteksi dini (skrining), serta penyuluhan kepada masyarakat. Optimalisasi Kegiatan Posyandu & Masyarakat: Memperkuat keandalan kader dalam mendampingi pelayanan kesehatan ibu, balita, lansia, dan pencegahan stunting di tingkat RT/RW. Meningkatkan Kepercayaan Warga: Masyarakat menjadi lebih nyaman dan responsif saat mendapatkan edukasi serta pendampingan langsung dari kader yang terlatih. Mendukung Sinergi Lintas Sektor: Mempermudah koordinasi antara petugas puskesmas/pemerintah desa dengan kader dalam pelaksanaan program-program strategis daerah.

3.9.18 MOBIL GERIATRI

Tabel 3.25 Profil Inovasi MOBIL GERIATRI

1	**Nama Inovasi**	MOBIL GERIATRI
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi

4	**Kategori Asta Cita**	AC 4 - Pembangunan SDM (lintas kategori)
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Perlindungan Lansia
6	**Uraian Singkat**	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan adalah rumah sakit berbasis syariah yang terus meningkatkan dan menambah pelayanannya tahap demi tahap, yang diharapkan bisa makin membantu masyarakat. Geriatri adalah cabang disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan dan kedokteran pada warga Lanjut Usia termasuk pelayanan kesehatan kepada Lanjut Usia dengan mengkaji semua aspek kesehatan berupa promosi, pencegahan, pemeriksaan kondisi, pengobatan, dan rehabilitasi. Pasien Geriatri adalah pasien Lanjut Usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan Multidisiplin yang bekerja secara Interdisiplin. Kemudian terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis, psikologis, ekonomi,dan sosial sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap warga lanjut usia dan dengan kondisi multi penyakit, berbagai penurunan fungsi organ, gangguan psikologis, dan sosial ekonomi serta lingkungan pada warga lanjut usia, pelayanan terhadap warga lanjut usia di rumah sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri terpadu yang paripurna dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas dan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatanyang menyelenggarakan pelayanan kesehatanperorangan secara paripurna yang menyediakanpelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawatdarurat. Pelayanan Geriatri diberikan kepada pasien Lanjut Usia dengan kriteria: 1. memiliki lebih dari 1 (satu) penyakit fsik dan/atau psikis; atau 2. memiliki 1 (satu) penyakit dan mengalami gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit bertujuan untuk: 1. meningkatkan kualitas hidup,kualitas pelayanan,dan keselamatan Pasien Geriatri di Rumah Sakit; dan 2. memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan Geriatri di Rumah Sakit.

		Inovasi ini sangat penting untuk dikembangkan mengingat masyarakat lanjut usia yang kini semakin meningkat, baik dari segi jumlah maupun proporsinya. Di sisi lain, masalah kesehatan pada mereka yang berusia lanjut, secara kuantitatif dan kualitatif sangat kompleks dan membutuhkan perhatian khusus
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Adapun Manfaat yang diperoleh: 1. Meningkatnya jenis dan mutu pelayanan kesehatan lansia 2. Terlaksananya kegiatan kerjasama dengan posyandu lansia di seluruh wilayah Hulu Sungai Selatan. 3. Meningkatkan cakupan pelayanan geriatric rumah sakit.

3.9.19 Loket Prioritas

Tabel 3.26 Profil Inovasi Loket Prioritas

1	**Nama Inovasi**	Loket Prioritas (Untuk Lansia,Ibu Hamil,Anak Balita)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi
4	**Kategori Asta Cita**	AC 4 - Pembangunan SDM (lintas kategori)
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Layanan Ramah Kelompok Rentan
6	**Uraian Singkat**	Keperdulian terhadap pasien dan mengutamakan kenyamanan pasien dengan adanya layanan dari seluruh lini RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan dapat di tunjang dengan inovasi inovasi dari bidang pelayanan. salah satu concern kami adalah pasien yang sudah lanjut usia (Lansia), Ibu Hamil dan Anak Anak. Inovasi yang dapat dikembangkan adalah menyediakan Loket pendaftaran Poliklinik Khusus Lansia,Ibu Hamil dan Anak Anak.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Hasil dari inovasi adalah sangat membantu pasien prioritas saat pendaftaran ke poliklinik di RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan

3.9.20 SIJIWA BERDAYA

Tabel 3.27 Profil Inovasi SIJIWA BERDAYA

1	**Nama Inovasi**	SIJIWA BERDAYA (Sistem Layanan Kunjungan Rumah Kesehatan Jiwa dan Pendampingan Spesialis Menuju Pasien Jiwa Mandiri dan Berdaya)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	**PIC/Narahubung**	Arief Rahman
4	**Kategori Asta Cita**	AC 4 - Pembangunan SDM (lintas kategori)
5	**Klaster Kohesi Sosial**	Kesehatan Jiwa & Rentan

6	**Uraian Singkat**	SIJIWA BERDAYA merupakan inovasi pelayanan kesehatan jiwa yang bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan kesinambungan pelayanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) khusunya yang dipasung melalui pendekatan kunjungan rumah (home visit) yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama dokter spesialis kedokteran jiwa. Inovasi ini difokuskan pada pemantauan pengobatan, pemerataan pelayanan kesehatan, penanganan ODGJ dengan risiko pasung/ yang dipasung, edukasi keluarga sebagai caregiver utama, serta edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma. Selanjutnya nanti inovasi SIJIWA BERDAYA ini akan dikembangkan melalui pelatihan kemandirian dan pemberdayaan pasien gangguan jiwa, meliputi pelatihan aktivitas kehidupan sehari-hari dan keterampilan sederhana sesuai kemampuan pasien, dengan tujuan meningkatkan fungsi sosial dan kemandirian. Melalui pendekatan manyambangi (kunjungan langsung), inovasi ini diharapkan mampu mewujudkan ODGJ yang baampih dari pasung, mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak, serta tumbuh menjadi individu yang lebih mandiri dan berdaya di tengah masyarakat.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Inovasi SIJIWA BERDAYA ini mendukung kebijakan nasional Indonesia Bebas Pasung melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berbasis keluarga dan masyarakat. Melalui inovasi ini diharapkan seluruh pasien gangguan jiwa dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan merata serta meningkatkan awareness dan pengetahuan terkait kesehatan jiwa bagi masyarakat dan keluarga. *outcome* yang diharapkan dari inovasi ini adalah meningkatnya pasien ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa berkelanjutan menurunnya angka pasien ODGJ pasung meningkatnya kepatuhan minum obat pada pasien ODGJ meningkatnya peran keluarga dan masyarakat dalam perawatan pasien ODGJ meningkatnya peran dan fungsi (kemandirian) pasien ODGJ di masyarakat

BAB 4
ANALISIS MASALAH

PENGUATAN KOHESI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN MELALUI INOVASI TATA KELOLA SOSIAL-POLITIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB IV
ANALISIS PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

4.1 Gambaran Umum Permasalahan

Analisis lintas-inovasi terhadap keenam inovasi fokus kajian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bersifat sistemik dan berulang pada empat lapisan: pendataan kelompok sasaran (hulu), penyaluran dan keberlanjutan layanan (hilirisasi), kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta ketersediaan infrastruktur dan digitalisasi. Keempat lapisan ini saling memengaruhi: kelemahan pendataan di hulu akan menghambat akurasi penyaluran di hilir, sementara keterbatasan SDM dan infrastruktur digital memperlambat perbaikan pada kedua lapisan tersebut.

4.2 Permasalahan Hulu: Pendataan dan Verifikasi Kelompok Rentan

Permasalahan pada lapisan hulu terutama bersumber dari belum terintegrasinya basis data kelompok rentan lintas-program. SLRT Menyapa, Bakul Peduli, dan Pepenabat, misalnya, berpotensi melakukan pendataan warga yang sama tanpa mekanisme deduplikasi yang jelas, sehingga menimbulkan risiko duplikasi bantuan pada sebagian warga sekaligus celah layanan (service gap) pada warga rentan lain yang belum terjangkau program apa pun. Basis data kependudukan yang dihasilkan Loksado Inklusif juga belum terkonfirmasi terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga potensi sinergi antar program belum optimal.

4.3 Permasalahan Hilirisasi: Penyaluran dan Keberlanjutan Layanan

Pada lapisan hilirisasi, permasalahan utama adalah belum adanya standar waktu tanggap (response time) yang terukur dan dipublikasikan, khususnya pada Pepenabat dan SAPA HSS. Tanpa standar yang jelas, kinerja penyaluran bansos cepat tanggap maupun penyelesaian aduan masyarakat sulit dievaluasi secara objektif oleh publik maupun DPRD. Selain itu, keberlanjutan sejumlah layanan seperti Bakul Peduli sangat bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan tanpa kerangka pembiayaan jangka menengah yang jelas.

4.4 Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pelaksanaan keenam inovasi banyak bertumpu pada peran individu kunci (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, petugas Puskesos, aparat kecamatan) tanpa redundansi kelembagaan yang memadai. Ketiadaan SOP tertulis yang terpublikasi pada sebagian inovasi (Bakul Peduli, SAPA HSS) meningkatkan risiko inkonsistensi pelayanan apabila terjadi pergantian personel. Kapasitas digital aparat di tingkat desa/kelurahan untuk mengoperasikan sistem rujukan digital SLRT juga belum terkonfirmasi merata di seluruh 148 desa/kelurahan.

4.5 Permasalahan Infrastruktur dan Digitalisasi

Keterbatasan infrastruktur digital, khususnya konektivitas internet di wilayah kecamatan pegunungan seperti Loksado, menjadi tantangan tersendiri bagi upaya digitalisasi layanan. Hal ini menjelaskan mengapa model "jemput bola kolektif" — yang tidak sepenuhnya bergantung pada infrastruktur digital — menjadi pilihan rasional untuk Loksado Inklusif, namun pada saat yang sama membatasi potensi otomatisasi dan integrasi data secara *real-time*.

4.6 Analisis Mendalam Enam Inovasi Prioritas

Subbab berikut menyajikan analisis mendalam terhadap masing-masing dari enam inovasi fokus kajian, mencakup deskripsi program, analisis kekuatan dan tantangan spesifik, serta keterkaitannya dengan perlindungan kelompok rentan.

4.6.1 Bina Persada (Pembinaan dan Persatuan Bangsa di Kecamatan)

Tabel 4.1 Bina Persada

Unit Pelaksana:
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tibum), Kecamatan Kalumpang

Gambar 4.1 Ilustrasi Bina Persada — Pembinaan Persatuan Berbasis Dialog

Bina Persada merupakan inovasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tibum) Kecamatan Kalumpang yang difokuskan pada penguatan pembinaan

persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya preventif dalam menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam kegiatan pembinaan, dialog, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.

Dampak yang telah dilaporkan mencakup meningkatnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat, menurunnya potensi konflik sosial melalui penguatan pemahaman nilai persatuan dan kebhinekaan, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan secara swadaya dan berkelanjutan.

Tabel 4.2 Bina Persada (Kekuatan)

Kekuatan	**Tantangan/Kelemahan**
• Melibatkan tokoh multi-sektor (agama, adat, aparat) sehingga legitimasi sosial kuat • Pendekatan preventif-dialogis sejalan dengan prinsip pencegahan konflik berbasis komunitas • Berkontribusi langsung pada indikator kinerja strategis kecamatan	• Cakupan program masih terbatas pada satu kecamatan (Kalumpang) dan belum direplikasi ke 10 kecamatan lain di HSS • Belum ada mekanisme pendataan digital untuk memetakan titik rawan konflik secara *real-time* • Pelibatan jelas kelompok rentan (difabel, perempuan, pemuda marjinal) dalam forum dialog belum tergambar dalam dokumentasi

4.6.1.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.3 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	Bina Persada (Pembinaan dan Persatuan Bangsa di Kecamatan)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap; identitas visual mengacu pada Gambar 4.1 Ilustrasi Bina Persada.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tibum), Kecamatan Kalumpang
Kategori Asta Cita	Asta Cita 9 - kohesi sosial, harmoni, dan persatuan bangsa

4.6.1.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Memperkuat pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya preventif menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan partisipatif berbasis dialog komunitas.

Sasaran Penerima Manfaat: Masyarakat Kecamatan Kalumpang, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

4.6.1.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan unsur Forkopimcam.
- Kegiatan pembinaan, dialog, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.4 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Seksi Tibum Kecamatan Kalumpang	Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, dialog, dan sosialisasi.
Tokoh masyarakat dan tokoh agama	Berpartisipasi dalam dialog dan memperkuat legitimasi sosial program.
Forkopimcam	Mendukung koordinasi lintas unsur keamanan dan ketertiban tingkat kecamatan.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Seksi Tibum mengidentifikasi isu ketenteraman dan potensi konflik sosial di wilayah kecamatan.
- Langkah 2: Tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan Forkopimcam dilibatkan dalam kegiatan pembinaan dan dialog.
- Langkah 3: Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan dilaksanakan secara partisipatif.
- Langkah 4: Masyarakat didorong menjaga ketenteraman lingkungan secara swadaya dan berkelanjutan.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Pendataan digital titik rawan konflik secara *real-time* dan pelibatan eksplisit kelompok rentan (difabel, perempuan, pemuda marjinal) dalam forum dialog.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Pendekatan preventif-dialogis berbasis pelibatan tokoh multi-sektor menjadi mekanisme utama; belum ada mekanisme pendataan digital untuk memetakan titik rawan konflik secara *real-time*.

e. Keluaran (Output)

Kegiatan pembinaan, dialog, dan sosialisasi nilai kebangsaan terlaksana di Kecamatan Kalumpang dengan pelibatan tokoh multi-sektor.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Meningkatnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan menurunnya potensi konflik sosial (jangka pendek, dilaporkan namun belum dalam angka terukur); replikasi model ke 10 kecamatan lain di HSS dengan pelibatan kelompok rentan yang lebih eksplisit (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Cakupan program masih terbatas pada satu kecamatan (Kalumpang) dan belum direplikasi ke 10 kecamatan lain di HSS. Belum ada mekanisme pendataan digital untuk memetakan titik rawan konflik secara *real-time*. Pelibatan jelas kelompok rentan (difabel, perempuan, pemuda marjinal) dalam forum dialog belum tergambar dalam dokumentasi.

4.6.1.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.5 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD belum diisi/tercatat "Belum Ada" oleh instansi pengampu sehingga kesiapan indikator ini belum dapat dinilai dari dokumen rekap.
Ketersediaan dan Peran SDM	Ada Indikasi Awal	Tokoh multi-sektor (agama, adat, aparat) teridentifikasi terlibat aktif, namun dokumen SK/penugasan formal belum tercantum dalam rekap.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran kegiatan pembinaan dan dialog belum tercantum dalam rekap SKPD.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Forum dialog dan sosialisasi tatap muka menjadi alat kerja utama yang sudah berjalan.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek/pelatihan fasilitator dialog belum tercatat dalam rekap.

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterangan program dalam RKPD/Rencana Kerja Kecamatan belum teridentifikasi pada dokumen rekap yang tersedia.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): Kolom status Data Dukung pada rekap SKPD (Kecamatan Kalumpang) kosong/tidak diisi, sama seperti lima inovasi lain dari kecamatan yang sama (Kordinasi Aman, Pepenabat, Padumasal, Mr.SPPD, Susan Lainten).

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.6 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah kegiatan dialog/pembinaan terlaksana	Rutin tiap triwulan	Belum tersedia dalam angka	Perlu pencatatan rutin oleh Seksi Tibum.
Cakupan pelibatan kelompok rentan dalam dialog	Terwakili secara eksplisit	Belum tergambar dalam dokumentasi	Kesenjangan utama yang teridentifikasi kajian.
Replikasi ke kecamatan lain	Direplikasi bertahap ke 10 kecamatan	Baru di 1 kecamatan (Kalumpang)	Peluang perluasan model preventif ke wilayah lain.
Mekanisme pendataan titik rawan konflik	Digital dan *real-time*	Belum tersedia	Prasyarat penguatan deteksi dini konflik sosial.

4.6.1.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Sebagai satu-satunya kecamatan yang menjalankan program ini, Bina Persada berisiko dipandang sebagai inisiatif lokal semata tanpa payung kebijakan kabupaten yang mendorong replikasi, sehingga kontribusinya terhadap kohesi sosial daerah secara keseluruhan masih terbatas skalanya.

4.6.1.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan Bina Persada (Pembinaan dan Persatuan Bangsa di Kecamatan) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.7 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 7)

1. Masalah yang Diselesaikan	Potensi konflik sosial dan menurunnya pemahaman nilai persatuan-kebhinekaan di tingkat kecamatan yang memerlukan upaya pencegahan sejak dini.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Masyarakat Kecamatan Kalumpang, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa.
3. Titik Masuk	Kegiatan pembinaan, dialog, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan Seksi Tibum.
4. Langkah-Langkah Kunci	Identifikasi isu ketenteraman → pelibatan tokoh multi-sektor → dialog dan sosialisasi kebangsaan → penguatan swadaya masyarakat.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Warga yang mengikuti dialog merasa lebih didengar dan dilibatkan langsung oleh tokoh yang mereka percayai (tokoh agama, tokoh adat), bukan sekadar menerima instruksi dari atas; aparat desa merasa terbantu memiliki forum resmi untuk meredakan ketegangan sosial sebelum membesar menjadi konflik terbuka.
6. Efek Terukur	Kegiatan pembinaan, dialog, dan sosialisasi terlaksana dengan pelibatan tokoh multi-sektor (jumlah kegiatan dan peserta belum tersedia dalam angka).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Meningkatnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat, menurunnya potensi konflik sosial, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan secara swadaya.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Model pembinaan persatuan berbasis dialog komunitas direplikasi ke seluruh 11 kecamatan di Kabupaten HSS, didukung sistem deteksi dini titik rawan konflik yang inklusif terhadap kelompok rentan.
Asumsi Kunci	Tokoh multi-sektor bersedia terus terlibat aktif; Forkopimcam mendukung keberlanjutan program; kecamatan lain memiliki kapasitas serupa untuk mereplikasi model.
Pemangku Kepentingan	Seksi Tibum Kecamatan Kalumpang, tokoh masyarakat dan agama, aparat desa, Forkopimcam, Kesbangpol Kabupaten HSS (potensi pembina replikasi).

4.6.1.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mendokumentasikan jumlah kegiatan dan peserta dialog secara sistematis, serta memetakan pelibatan kelompok rentan secara eksplisit dalam forum.
- Jangka menengah (6–18 bulan): merintis mekanisme pendataan digital titik rawan konflik dan mengusulkan replikasi model ke kecamatan lain melalui payung kebijakan Kesbangpol.
- Keterhubungan model: menjadi simpul preventif kohesi sosial yang idealnya terhubung dengan SAPA HSS sebagai kanal deteksi dini keluhan masyarakat.

4.6.2 SLRT Menyapa

Tabel 4.8 SLRT Menyapa (Unit Pelaksana:)

Unit Pelaksana:
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terintegrasi dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) tingkat desa/kelurahan

Gambar 4.2 Ilustrasi SLRT Menyapa — Simpul Rujukan Terpadu Layanan Sosial

SLRT Menyapa merupakan pengembangan dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) nasional yang diadaptasi secara lokal oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Kabupaten HSS, Puskesos-SLRT berperan sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi warga yang membutuhkan layanan sosial di tingkat desa dan kelurahan, untuk kemudian dirujuk dan ditindaklanjuti oleh petugas SLRT di tingkat kabupaten. Pada Juni 2025, Pemerintah Kabupaten HSS meresmikan Ruang Pelayanan SLRT "Rakat Mufakat" di Kantor Dinas Sosial sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan menjelang evaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN-RB dan Ombudsman RI.

Tujuan utama SLRT Menyapa adalah memastikan setiap warga yang membutuhkan pelayanan sosial dapat teridentifikasi dengan baik, memperoleh rujukan, dan mendapatkan bantuan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi lintas perangkat daerah.

Tabel 4.9 SLRT Menyapa (Kekuatan)

Kekuatan	**Tantangan/Kelemahan**
• Berbasis kerangka SLRT nasional sehingga memiliki standar dan dukungan teknis dari Kementerian Sosial • Memiliki ruang layanan fisik permanen (Rakat Mufakat) yang memudahkan akses tatap muka • Struktur dua tingkat (Puskesos desa – SLRT kabupaten) memungkinkan jangkauan hingga akar rumput	• Uraian singkat dan manfaat program belum terdokumentasi secara rinci dalam basis data rekapitulasi inovasi daerah • Tingkat digitalisasi rujukan antara Puskesos desa dan SLRT kabupaten belum terkonfirmasi menggunakan sistem informasi terintegrasi • Capaian kuantitatif (jumlah warga terlayani, waktu rujukan rata-rata) belum dipublikasikan secara berkala

4.6.2.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.10 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	SLRT Menyapa
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap; identitas visual mengacu pada Gambar 4.2 Ilustrasi SLRT Menyapa.
Tahun Mulai	Ruang Pelayanan SLRT "Rakat Mufakat" diresmikan Juni 2025 di Kantor Dinas Sosial.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terintegrasi dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) tingkat desa/kelurahan
Kategori Asta Cita	Asta Cita 9 - kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan

4.6.2.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Memastikan setiap warga yang membutuhkan pelayanan sosial teridentifikasi dengan baik, memperoleh rujukan, dan mendapatkan bantuan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi lintas perangkat daerah, sebagai adaptasi lokal dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) nasional.

Sasaran Penerima Manfaat: Warga Kabupaten HSS yang membutuhkan layanan sosial, diidentifikasi mulai tingkat desa/kelurahan melalui Puskesos.

4.6.2.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Struktur dua tingkat: Puskesos desa/kelurahan dan SLRT kabupaten.
- Ruang Pelayanan SLRT "Rakat Mufakat" di Kantor Dinas Sosial (diresmikan Juni 2025).
- Kerangka standar teknis SLRT nasional dari Kementerian Sosial.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.11 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Puskesos desa/kelurahan	Menjadi garda terdepan mengidentifikasi warga yang membutuhkan layanan sosial.
Petugas SLRT kabupaten	Menindaklanjuti rujukan dari Puskesos dan mengoordinasikan lintas perangkat daerah.
Dinas Sosial	Mengelola Ruang Pelayanan Rakat Mufakat dan memastikan koordinasi lintas OPD.
Kementerian Sosial	Membina standar teknis SLRT nasional.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Puskesos desa/kelurahan mengidentifikasi warga yang membutuhkan layanan sosial di tingkat akar rumput.
- Langkah 2: Kasus dirujuk ke petugas SLRT tingkat kabupaten melalui Ruang Pelayanan Rakat Mufakat.
- Langkah 3: Petugas SLRT kabupaten menindaklanjuti rujukan secara terkoordinasi lintas perangkat daerah.
- Langkah 4: Warga memperoleh bantuan sosial sesuai kebutuhan yang teridentifikasi.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Digitalisasi rujukan antara Puskesos desa dan SLRT kabupaten melalui sistem informasi terintegrasi.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Struktur dua tingkat (Puskesos desa – SLRT kabupaten) dengan ruang layanan fisik permanen (Rakat Mufakat) menjadi kekuatan utama; tingkat

digitalisasi rujukan antara Puskesos desa dan SLRT kabupaten belum terkonfirmasi menggunakan sistem informasi terintegrasi.

e. Keluaran (Output)

Ruang Pelayanan SLRT "Rakat Mufakat" beroperasi sejak Juni 2025 sebagai simpul rujukan terpadu layanan sosial tingkat kabupaten.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Warga yang membutuhkan layanan sosial teridentifikasi lebih baik dari tingkat desa (jangka pendek); rujukan dan penyaluran bantuan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi penuh lintas OPD dengan dukungan sistem digital (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Uraian singkat dan manfaat program belum terdokumentasi secara rinci dalam basis data rekapitulasi inovasi daerah. Tingkat digitalisasi rujukan antara Puskesos desa dan SLRT kabupaten belum terkonfirmasi menggunakan sistem informasi terintegrasi. Capaian kuantitatif (jumlah warga terlayani, waktu rujukan rata-rata) belum dipublikasikan secara berkala.

4.6.2.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.12 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Tim kajian memakai status agregat pada rekap SKPD; rincian dokumen per indikator berada pada instansi pengampu dan belum diverifikasi lapangan secara independen.
Ketersediaan dan Peran SDM	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Petugas Puskesos desa/kelurahan dan SLRT kabupaten teridentifikasi sebagai pelaksana; rincian jumlah dan peran belum dirinci.

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Dukungan Anggaran	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Anggaran operasional Ruang Pelayanan Rakat Mufakat belum dirinci dalam dokumen kajian.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Ruang layanan fisik permanen (Rakat Mufakat) menjadi alat kerja utama; sistem digital rujukan terintegrasi belum terkonfirmasi.
Bimtek Inovasi	Ada Indikasi Awal	Kerangka SLRT nasional mengindikasikan adanya standar dan dukungan teknis dari Kementerian Sosial, termasuk pembinaan/bimtek.
Integrasi dalam RKPD	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Program tercatat sebagai kegiatan Dinas Sosial; halaman spesifik RKPD belum dikutip dalam laporan ini.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Sudah Lengkap" pada rekap SKPD (Dinas Sosial), sejajar dengan BERSEMANGAT, Bakul Peduli, dan Program Rumah Sejahtera dari dinas yang sama.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.13 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah warga teridentifikasi via Puskesos	Meningkat dari *baseline*	Belum dipublikasikan	Indikator dasar jangkauan program di tingkat desa.
Waktu rujukan rata-rata Puskesos ke SLRT kabupaten	Dipercepat dan terukur	Belum dipublikasikan	Kesenjangan data yang perlu ditutup.
Digitalisasi sistem rujukan	Terintegrasi penuh	Belum terkonfirmasi	Peluang penguatan koordinasi lintas OPD.
Evaluasi kinerja pelayanan Kemenpan-RB/Ombudsman	Skor baik	Persiapan menjelang evaluasi (per Juni 2025)	Momentum peningkatan mutu layanan yang sedang berjalan.

4.6.2.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Peresmian Ruang Pelayanan Rakat Mufakat pada Juni 2025 menjelang evaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN-RB dan Ombudsman RI menunjukkan momentum penguatan mutu layanan, namun keberlanjutan program pasca-evaluasi perlu dipastikan agar tidak sekadar persiapan seremonial.

4.6.2.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan SLRT Menyapa disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.14 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 14)

1. Masalah yang Diselesaikan	Warga yang membutuhkan layanan sosial di tingkat akar rumput sulit teridentifikasi dan dirujuk secara cepat dan terkoordinasi ke layanan yang tepat.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Warga Kabupaten HSS yang membutuhkan layanan sosial, terutama di tingkat desa/kelurahan.
3. Titik Masuk	Identifikasi warga oleh Puskesos di tingkat desa/kelurahan.
4. Langkah-Langkah Kunci	Identifikasi warga oleh Puskesos → rujukan ke SLRT kabupaten via Ruang Pelayanan Rakat Mufakat → tindak lanjut terkoordinasi lintas OPD.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Warga merasa lebih mudah mengakses layanan sosial karena ada garda terdepan (Puskesos) yang mengenal kondisi mereka langsung di desa, tidak perlu mencari sendiri instansi mana yang harus dituju; warga yang datang ke Ruang Pelayanan Rakat Mufakat merasakan layanan yang lebih manusiawi dan terkoordinasi dibanding harus berpindah-pindah kantor OPD.
6. Efek Terukur	Ruang Pelayanan Rakat Mufakat beroperasi sejak Juni 2025 (jumlah warga terlayani dan waktu rujukan rata-rata belum dipublikasikan).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Struktur dua tingkat memungkinkan jangkauan hingga akar rumput, didukung standar dan dukungan teknis dari Kementerian Sosial melalui kerangka SLRT nasional.

8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Seluruh warga HSS yang membutuhkan layanan sosial dapat teridentifikasi, dirujuk, dan dilayani secara cepat dan terkoordinasi penuh melalui sistem digital yang menghubungkan Puskesos desa dengan SLRT kabupaten.
Asumsi Kunci	Puskesos di seluruh desa/kelurahan aktif mengidentifikasi warga rentan; petugas SLRT kabupaten responsif menindaklanjuti rujukan; koordinasi lintas OPD berjalan konsisten.
Pemangku Kepentingan	Dinas Sosial, Puskesos desa/kelurahan, Kementerian Sosial (kerangka SLRT nasional), Kementerian PAN-RB dan Ombudsman RI (evaluasi kinerja pelayanan publik).

4.6.2.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): melengkapi uraian dan manfaat program dalam basis data rekapitulasi inovasi daerah serta mempublikasikan capaian kuantitatif awal (jumlah warga terlayani).
- Jangka menengah (6–18 bulan): membangun sistem informasi digital yang menghubungkan rujukan Puskesos desa dengan SLRT kabupaten secara *real-time*.
- Keterhubungan model: menjadi simpul rujukan utama yang menghubungkan Bakul Peduli, Pepenabat, dan layanan sosial lain agar tidak terjadi duplikasi sasaran.

4.6.3 Bakul Peduli (Bantuan Kesejahteraan untuk Lanjut Usia)

Tabel 4.15 Bakul Peduli (Unit Pelaksana:)

Unit Pelaksana: *Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan*

Gambar 4.3 Ilustrasi Bakul Peduli — Perlindungan Kesejahteraan Lanjut

Bakul Peduli merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten HSS untuk memberikan perlindungan kesejahteraan kepada warga lanjut usia, khususnya melalui skema Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi lansia. Berdasarkan penelusuran informasi resmi, program perlindungan lansia di Kabupaten HSS diwujudkan antara lain melalui pemberian tunjangan hidup periodik (misalnya penyaluran Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1.125.000 untuk periode lima bulan) kepada lansia asuh binaan Pemerintah Daerah, serta kunjungan langsung pejabat daerah dalam momentum Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) sebagai bentuk kehadiran negara pada kelompok rentan tertua.

Dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah, entri Bakul Peduli tercatat sebagai nama program program tanpa uraian dan manfaat yang terdokumentasi secara rinci, sehingga substansi teknis operasionalnya (mekanisme pendataan, kriteria penerima, frekuensi penyaluran) belum dapat dianalisis secara menyeluruh dalam kajian ini.

Tabel 4.16 Bakul Peduli (Kekuatan)

Kekuatan	**Tantangan/Kelemahan**
• Menyasar kelompok rentan yang paling jelas, yaitu lanjut usia, sejalan dengan tema nasional "Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat" • Melibatkan kehadiran langsung pimpinan daerah (Bupati/Wakil Bupati) yang memperkuat aspek penghargaan sosial bagi lansia • Terhubung dengan skema bantuan sosial daerah yang telah berjalan (tunjangan hidup lansia asuh)	• Dokumentasi resmi pada basis data inovasi daerah paling minim di antara enam inovasi fokus (hanya berupa judul program) • Mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat belum terpublikasi • Belum tergambar integrasi dengan layanan kesehatan lansia (geriatri, kunjungan rumah) yang sudah berjalan di RSUD Brigjend H. Hasan Basry

4.6.3.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.17 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	Bakul Peduli (Bantuan Kesejahteraan untuk Lanjut Usia)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap; identitas visual mengacu pada Gambar 4.3 Ilustrasi Bakul Peduli.
Tahun Mulai	Penyaluran Tahap I Tahun 2025 telah dilaksanakan; tahun mulai program tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	Asta Cita 9 - perlindungan kelompok rentan (lanjut usia)

4.6.3.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Memberikan perlindungan kesejahteraan kepada warga lanjut usia melalui tunjangan hidup periodik dan kehadiran langsung pejabat daerah pada momentum Hari Lanjut Usia Nasional, sejalan dengan tema nasional "Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat".

Sasaran Penerima Manfaat: Warga lanjut usia (lansia asuh binaan) Kabupaten HSS, khususnya penerima skema Bantuan Sosial Jaminan Hidup.

4.6.3.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Skema Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi lansia asuh binaan.
- Anggaran tunjangan hidup periodik (Tahap I 2025: Rp1.125.000 untuk periode lima bulan).
- Momentum Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) untuk kunjungan langsung pejabat daerah.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.18 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Dinas Sosial	Mengelola penyaluran tunjangan hidup dan pendataan lansia asuh binaan.
Bupati/Wakil Bupati	Melakukan kunjungan langsung pada momentum HLUN sebagai bentuk kehadiran negara.
Lansia asuh binaan	Menerima tunjangan hidup periodik dan kunjungan kesejahteraan.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Dinas Sosial mendata lansia asuh binaan yang memenuhi kriteria penerima.
- Langkah 2: Tunjangan hidup periodik disalurkan secara bertahap (Tahap I 2025: Rp1.125.000 untuk lima bulan).
- Langkah 3: Pejabat daerah melakukan kunjungan langsung pada momentum Hari Lanjut Usia Nasional.
- Langkah 4: (Tahap yang belum berjalan) Mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat dipublikasikan secara berkala.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Integrasi dengan layanan kesehatan lansia (geriatri, kunjungan rumah) yang sudah berjalan di RSUD Brigjend H. Hasan Basry.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Skema tunjangan hidup periodik dan kunjungan simbolik pejabat daerah menjadi mekanisme utama; dalam dokumen rekapitulasi, entri Bakul Peduli tercatat sebagai nama program tanpa uraian dan manfaat yang terdokumentasi secara rinci, sehingga substansi teknis operasionalnya belum dapat dianalisis menyeluruh.

e. Keluaran (Output)

Penyaluran Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1.125.000 untuk periode lima bulan kepada lansia asuh binaan; kunjungan pejabat daerah pada momentum HLUN terlaksana.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Lansia asuh binaan memperoleh dukungan finansial dan pengakuan sosial (jangka pendek); seluruh lansia rentan di HSS memperoleh perlindungan kesejahteraan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan geriatri (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Dokumentasi resmi pada basis data inovasi daerah paling minim di antara enam inovasi fokus (hanya berupa judul program). Mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat belum terpublikasi. Belum tergambar integrasi dengan layanan kesehatan lansia (geriatri, kunjungan rumah) yang sudah berjalan di RSUD Brigjend H. Hasan Basry.

4.6.3.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.19 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Tim kajian memakai status agregat pada rekap SKPD; rincian dokumen per indikator berada pada instansi pengampu dan belum diverifikasi lapangan secara independen.

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Ketersediaan dan Peran SDM	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Petugas pendataan lansia asuh binaan teridentifikasi aktif; rincian jumlah dan peran personil belum dirinci.
Dukungan Anggaran	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Anggaran tunjangan hidup periodik terealisasi (Tahap I 2025: Rp1.125.000/5 bulan per penerima), namun total pagu keseluruhan belum dirinci.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Skema penyaluran tunjangan periodik dan kunjungan pejabat menjadi alat kerja utama yang sudah terbukti berjalan.
Bimtek Inovasi	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Frekuensi bimtek/pelatihan petugas pendata lansia belum dirinci dalam dokumen kajian.
Integrasi dalam RKPD	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Program tercatat sebagai kegiatan Dinas Sosial; halaman spesifik RKPD belum dikutip dalam laporan ini.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Sudah Lengkap" pada rekap SKPD (Dinas Sosial), sejajar dengan BERSEMANGAT, SLRT Menyapa, dan Program Rumah Sejahtera dari dinas yang sama.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.20 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Nilai tunjangan hidup Tahap I 2025	Sesuai pagu ditetapkan	Rp1.125.000/5 bulan per penerima	Realisasi tercatat untuk Tahap I 2025.
Jumlah lansia asuh binaan penerima	Seluruh lansia rentan terdata	Belum tersedia dalam angka	Kesenjangan data yang perlu ditutup.
Mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data	Dipublikasikan berkala	Belum terpublikasi	Prasyarat akuntabilitas penyaluran bantuan.
Integrasi dengan layanan kesehatan geriatri RSUD	Terintegrasi penuh	Belum tergambar	Peluang penguatan layanan lansia yang holistik.

4.6.3.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Sebagai program dengan dokumentasi paling minim di antara enam inovasi fokus (hanya judul tanpa uraian teknis), Bakul Peduli berisiko sulit dievaluasi efektivitasnya meski secara substansi menyasar kelompok rentan yang jelas dan telah menyalurkan bantuan riil pada 2025.

4.6.3.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan Bakul Peduli (Bantuan Kesejahteraan untuk Lanjut Usia) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.21 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 21)

1. Masalah yang Diselesaikan	Warga lanjut usia di Kabupaten HSS, khususnya yang rentan secara ekonomi, membutuhkan jaminan hidup dan pengakuan sosial yang belum sepenuhnya terlayani.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Warga lanjut usia (lansia asuh binaan) Kabupaten HSS.
3. Titik Masuk	Pendataan lansia asuh binaan oleh Dinas Sosial.
4. Langkah-Langkah Kunci	Pendataan lansia → penyaluran tunjangan hidup periodik → kunjungan pejabat daerah pada momentum HLUN.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Lansia penerima merasakan langsung meringannya beban ekonomi lewat tunjangan yang benar-benar disalurkan (Rp1.125.000 untuk lima bulan pada Tahap I 2025); kunjungan langsung Bupati/Wakil Bupati pada momentum HLUN membuat lansia merasa dihargai dan diperhatikan oleh negara, bukan sekadar penerima bantuan administratif.
6. Efek Terukur	Penyaluran Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1.125.000 untuk periode lima bulan kepada lansia asuh binaan (jumlah total penerima belum dipublikasikan).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Menyasar kelompok rentan yang paling jelas (lanjut usia), sejalan dengan tema nasional "Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat", terhubung dengan skema bantuan sosial daerah yang telah berjalan.

8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Seluruh lansia rentan di Kabupaten HSS memperoleh jaminan hidup yang konsisten dan terintegrasi dengan layanan kesehatan geriatri, menjadikan HSS daerah yang benar-benar ramah lansia.
Asumsi Kunci	Anggaran tunjangan hidup tersedia berkelanjutan setiap tahap; data penerima manfaat diverifikasi dan dimutakhirkan secara berkala; RSUD bersedia mengintegrasikan layanan geriatri dengan program ini.
Pemangku Kepentingan	Dinas Sosial, Bupati/Wakil Bupati, lansia asuh binaan dan keluarganya, RSUD Brigjend H. Hasan Basry (layanan geriatri).

4.6.3.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): melengkapi dokumentasi program (mekanisme pendataan, kriteria penerima, frekuensi penyaluran) yang saat ini paling minim di antara enam inovasi fokus.
- Jangka menengah (6–18 bulan): mempublikasikan mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data penerima secara berkala, serta mengintegrasikan program dengan layanan kesehatan geriatri RSUD.
- Keterhubungan model: menjadi bagian dari jejaring perlindungan sosial bersama SLRT Menyapa dan Pepenabat agar data penerima lansia rentan tidak terfragmentasi.

4.6.4 Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat)

Tabel 4.22 Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat)

Unit Pelaksana: *Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan*

Gambar 4.4 Ilustrasi Pepenabat — Respons Cepat Penyaluran Bantuan Sosial

Pepenabat merupakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendataan dan

verifikasi langsung di lapangan serta koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait, sehingga warga yang mengalami kondisi darurat sosial ekonomi dapat memperoleh bantuan tanpa proses birokrasi yang berlarut-larut.

Tabel 4.23 Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat)

Kekuatan	Tantangan/Kelemahan
• Pendekatan verifikasi lapangan langsung memperkecil risiko salah sasaran (exclusion/inclusion error) • Koordinasi dengan pemerintah desa memperkuat validitas data penerima di tingkat akar rumput • Responsif terhadap kondisi darurat sosial (cepat tanggap)	• Kolom manfaat/dampak dalam basis data rekapitulasi belum terisi, sehingga hasil kuantitatif program belum terukur • Standar waktu tanggap (response time) resmi belum dipublikasikan sehingga sulit dievaluasi kinerjanya • Potensi tumpang tindih sasaran dengan SLRT Menyapa dan Bakul Peduli belum memiliki mekanisme deduplikasi data yang jelas

4.6.4.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.24 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap; identitas visual mengacu pada Gambar 4.4 Ilustrasi Pepenabat.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025; kolom status Data Dukung pada rekap SKPD (Kecamatan Kalumpang) kosong/tidak diisi.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	Asta Cita 9 - perlindungan sosial dan penanganan darurat sosial ekonomi

4.6.4.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Memastikan bantuan sosial tersalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan bagi warga dalam kondisi darurat sosial ekonomi, tanpa proses birokrasi yang berlarut-larut.

Sasaran Penerima Manfaat: Warga yang mengalami kondisi darurat sosial ekonomi di Kabupaten HSS.

4.6.4.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

• Pendataan dan verifikasi langsung di lapangan.

• Koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.25 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Dinas Sosial/Kecamatan	Melakukan pendataan dan verifikasi lapangan serta menyalurkan bantuan.
Pemerintah desa	Berkoordinasi memvalidasi data warga dalam kondisi darurat.
Warga penerima	Menerima bantuan sosial cepat tanggap sesuai kondisi darurat yang dialami.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Warga yang mengalami kondisi darurat sosial ekonomi teridentifikasi melalui laporan atau pemantauan lapangan.
- Langkah 2: Petugas melakukan pendataan dan verifikasi langsung di lapangan.
- Langkah 3: Koordinasi dilakukan dengan pemerintah desa dan instansi terkait untuk memvalidasi data.
- Langkah 4: Bantuan sosial disalurkan secara cepat tanpa proses birokrasi berlarut-larut.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Standar waktu tanggap (response time) resmi dipublikasikan dan mekanisme deduplikasi data dengan SLRT Menyapa dan Bakul Peduli diterapkan.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Verifikasi lapangan langsung dan koordinasi dengan pemerintah desa menjadi mekanisme utama untuk memperkecil risiko salah sasaran; belum ada standar waktu tanggap resmi maupun mekanisme deduplikasi data dengan program bansos lain.

e. Keluaran (Output)

Bantuan sosial tersalurkan secara cepat tanggap kepada warga dalam kondisi darurat sosial ekonomi (data jumlah kasus dan penerima belum dipublikasikan).

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Warga dalam kondisi darurat memperoleh bantuan tanpa menunggu proses birokrasi panjang (jangka pendek); sistem cepat tanggap yang terukur waktu responsnya dan terintegrasi data dengan program bansos lain untuk mencegah duplikasi (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Kolom manfaat/dampak dalam basis data rekapitulasi belum terisi, sehingga hasil kuantitatif program belum terukur. Standar waktu tanggap (response time)

resmi belum dipublikasikan sehingga sulit dievaluasi kinerjanya. Potensi tumpang tindih sasaran dengan SLRT Menyapa dan Bakul Peduli belum memiliki mekanisme deduplikasi data yang jelas.

4.6.4.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.26 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD (Kecamatan Kalumpang) kosong/tidak diisi.
Ketersediaan dan Peran SDM	Ada Indikasi Awal	Petugas verifikasi lapangan teridentifikasi aktif, namun dokumen SK/penugasan formal belum tercantum dalam rekap.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran penyaluran bansos cepat tanggap belum tercantum dalam rekap SKPD.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Verifikasi lapangan langsung dan koordinasi desa menjadi alat kerja utama yang sudah terbukti berjalan.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek petugas verifikasi lapangan belum tercatat dalam rekap.
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterangan program dalam RKPD belum teridentifikasi pada dokumen rekap yang tersedia.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): Kolom status Data Dukung pada rekap SKPD kosong/tidak diisi (tercatat pada rekap Kecamatan Kalumpang bersama Bina Persada dan Kordinasi Aman), meski unit pelaksana menurut narasi laporan adalah Dinas Sosial — perbedaan atribusi ini perlu diklarifikasi.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.27 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	**Target**	**Realisasi**	**Keterangan**
Jumlah kasus darurat sosial ditangani	Tercatat dan dipublikasikan	Belum tersedia	Kolom manfaat/dampak pada rekap belum terisi.
Standar waktu tanggap (response time)	Ditetapkan dan dipublikasikan	Belum tersedia	Kesenjangan utama untuk evaluasi kinerja.
Mekanisme deduplikasi data dengan SLRT/Bakul Peduli	Tersedia dan diterapkan	Belum tersedia	Risiko tumpang tindih sasaran antarprogram.
Ketepatan sasaran (exclusion/inclusion error)	Minimal	Diklaim rendah via verifikasi lapangan, belum diukur	Pendekatan verifikasi langsung berpotensi kuat namun perlu data pendukung.

4.6.4.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Perbedaan atribusi unit pelaksana antara narasi laporan (Dinas Sosial) dan rekap SKPD (Kecamatan Kalumpang) mengindikasikan program ini mungkin dijalankan bersama di dua tingkat pemerintahan, sehingga kejelasan penanggung jawab utama perlu dipastikan agar akuntabilitas dan pelaporan data tidak tumpang tindih.

4.6.4.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap (Pepenabat) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.28 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 28)

1. Masalah yang Diselesaikan	Warga yang mengalami kondisi darurat sosial ekonomi berisiko tidak memperoleh bantuan tepat waktu akibat proses birokrasi yang panjang.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Warga Kabupaten HSS yang mengalami kondisi darurat sosial ekonomi.
3. Titik Masuk	Identifikasi kondisi darurat melalui laporan atau pemantauan lapangan.

4. Langkah-Langkah Kunci	Pendataan dan verifikasi lapangan → koordinasi dengan pemerintah desa → penyaluran bantuan cepat tanggap.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Warga dalam kondisi darurat merasakan langsung kecepatan respons karena petugas datang memverifikasi kondisi mereka secara langsung, bukan meminta mereka mengurus berkas berlapis di kantor; keluarga yang mengalami musibah mendadak merasa lebih terbantu karena bantuan tidak menunggu proses administratif yang panjang.
6. Efek Terukur	Bantuan sosial tersalurkan secara cepat tanggap melalui verifikasi lapangan langsung (jumlah kasus dan waktu tanggap rata-rata belum dipublikasikan).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Pendekatan verifikasi lapangan langsung memperkecil risiko salah sasaran, dan koordinasi dengan pemerintah desa memperkuat validitas data penerima di tingkat akar rumput.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Sistem respons cepat darurat sosial ekonomi yang terukur standar waktu tanggapnya dan terintegrasi datanya dengan seluruh program bantuan sosial daerah, sehingga tidak ada warga darurat yang terlewat maupun menerima bantuan ganda.
Asumsi Kunci	Petugas lapangan responsif dan tersedia menjangkau seluruh wilayah; pemerintah desa aktif berkoordinasi; data kasus darurat tercatat secara sistematis.
Pemangku Kepentingan	Dinas Sosial, Kecamatan Kalumpang, pemerintah desa, warga penerima bantuan darurat, SLRT Menyapa dan Bakul Peduli (potensi deduplikasi data).

4.6.4.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mengklarifikasi penanggung jawab utama program (Dinas Sosial atau kecamatan) dan mengisi kolom manfaat/dampak pada basis data rekapitulasi inovasi daerah.
- Jangka menengah (6–18 bulan): menetapkan dan mempublikasikan standar waktu tanggap resmi serta membangun mekanisme deduplikasi data dengan SLRT Menyapa dan Bakul Peduli.
- Keterhubungan model: menjadi simpul respons cepat yang terhubung dengan SLRT Menyapa sebagai rujukan lanjutan bagi kasus yang memerlukan penanganan berkelanjutan.

4.6.5 SAPA HSS (Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan)

Tabel 4.29 SAPA HSS (Unit Pelaksana:)

Unit Pelaksana: *Sekretariat Daerah/Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan*

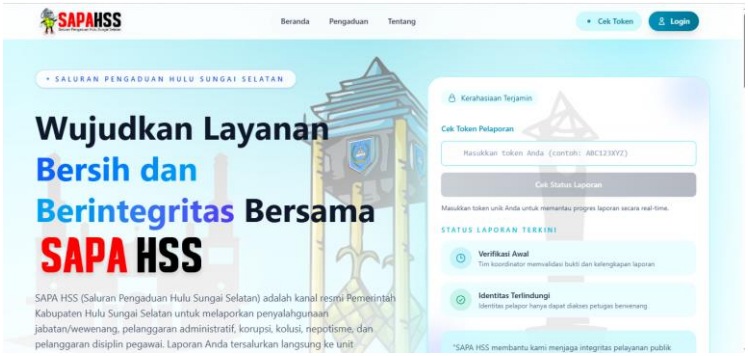

Gambar 4.5 Ilustrasi SAPA HSS — Kanal Pengaduan dan Partisipasi Publik

SAPA HSS merupakan inovasi yang tergolong dalam kategori Asta Cita "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba," yang berfungsi sebagai saluran pengaduan resmi bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai instrumen partisipasi publik, SAPA HSS berperan penting dalam membuka ruang bagi warga—termasuk kelompok rentan yang selama ini sulit menyuarakan keluhan melalui jalur konvensional—untuk menyampaikan aduan, masukan, atau laporan terkait pelayanan publik.

Dalam dokumen rekapitulasi, entri SAPA HSS juga hanya tercatat sebagai nama program program tanpa uraian teknis mengenai kanal pengaduan yang digunakan (aplikasi, situs web, atau nomor kontak), mekanisme disposisi ke perangkat daerah terkait, maupun standar waktu penyelesaian aduan (service level agreement).

Tabel 4.30 SAPA HSS (Kekuatan)

Kekuatan	**Tantangan/Kelemahan**
• Menjadi instrumen akuntabilitas dan partisipasi publik yang relevan dengan prinsip *good governance* • Berpotensi menjadi kanal deteksi dini bagi keluhan kelompok rentan terkait aksesibilitas layanan publik • Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi tingkat daerah	• Dokumentasi program paling minim di antara enam inovasi fokus, sehingga mekanisme kerja teknis belum dapat dikaji • Belum ada informasi mengenai aksesibilitas kanal pengaduan bagi penyandang disabilitas (misalnya dukungan bahasa isyarat atau format mudah dibaca) • Tingkat keterbukaan status tindak lanjut aduan kepada publik belum terkonfirmasi

4.6.5.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.31 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	SAPA HSS (Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap; identitas visual mengacu pada Gambar 4.5 Ilustrasi SAPA HSS.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Sekretariat Daerah/Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tercatat pula pada rekap SKPD di bawah Inspektorat Daerah)
Kategori Asta Cita	Asta Cita 8 - reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

4.6.5.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Menjadi saluran pengaduan resmi bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan, untuk menyampaikan aduan, masukan, atau laporan terkait pelayanan publik, sebagai instrumen partisipasi dan akuntabilitas publik.

Sasaran Penerima Manfaat: Seluruh masyarakat Kabupaten HSS, termasuk kelompok rentan yang selama ini sulit menyuarakan keluhan melalui jalur konvensional.

4.6.5.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Kanal pengaduan SAPA HSS (jenis kanal spesifik belum terdokumentasi).
- Keterhubungan konseptual dengan agenda reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi daerah.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.32 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	**Peran Utama**
Sekretariat Daerah/Diskominfo	Mengelola kanal pengaduan (berdasarkan uraian narasi laporan).
Inspektorat Daerah	Tercatat sebagai pengampu pada rekap SKPD IGA 2025.
Masyarakat, termasuk kelompok rentan	Menyampaikan aduan, masukan, atau laporan terkait pelayanan publik.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Masyarakat, termasuk kelompok rentan, menyampaikan aduan melalui kanal SAPA HSS.
- Langkah 2: (Mekanisme selanjutnya belum terdokumentasi) Aduan didisposisikan ke perangkat daerah terkait.
- Langkah 3: (Belum terdokumentasi) Perangkat daerah menindaklanjuti aduan sesuai standar waktu penyelesaian (SLA).
- Langkah 4: (Belum terdokumentasi) Status tindak lanjut dipublikasikan kembali kepada pelapor/publik.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Kanal pengaduan menjadi alat kerja dasar; namun dalam dokumen rekapitulasi, entri SAPA HSS hanya tercatat sebagai nama program tanpa uraian teknis mengenai kanal (aplikasi, situs web, nomor kontak), mekanisme disposisi, maupun SLA — dokumentasi program paling minim di antara enam inovasi fokus.

e. Keluaran (Output)

Kanal pengaduan resmi tingkat kabupaten yang membuka ruang partisipasi bagi warga, termasuk kelompok rentan.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki saluran resmi menyampaikan keluhan (jangka pendek, belum terverifikasi tingkat pemanfaatannya oleh kelompok rentan secara khusus); SAPA HSS menjadi kanal deteksi dini keluhan kelompok rentan terkait aksesibilitas layanan publik dengan dukungan format yang inklusif (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Dokumentasi program paling minim di antara enam inovasi fokus, sehingga mekanisme kerja teknis belum dapat dikaji. Belum ada informasi mengenai aksesibilitas kanal pengaduan bagi penyandang disabilitas (misalnya dukungan bahasa isyarat atau format mudah dibaca). Tingkat keterbukaan status tindak lanjut aduan kepada publik belum terkonfirmasi.

4.6.5.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.33 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD belum diisi/tercatat "Belum Ada" oleh instansi pengampu sehingga kesiapan indikator ini belum dapat dinilai dari dokumen rekap.
Ketersediaan dan Peran SDM	Belum Ada Bukti	Pengelola/petugas penanggung jawab kanal pengaduan belum didokumentasikan dalam rekap.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran pengelolaan kanal pengaduan belum tercantum.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Kanal pengaduan sudah tersedia sebagai alat kerja dasar, meski minim dokumentasi mekanisme kerja.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek pengelola kanal pengaduan belum tercatat.
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterangan program dalam RKPD belum teridentifikasi pada dokumen rekap yang tersedia.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Ada" pada rekap SKPD (tercatat di bawah Inspektorat Daerah bersama SEHATI dan PETA SI APIP), konsisten dengan temuan kajian ini bahwa dokumentasi program SAPA HSS paling minim di antara enam inovasi fokus.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.34 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah aduan diterima dari kelompok rentan	Tercatat dan dipublikasikan	Belum dipublikasikan	Dokumentasi program paling minim di antara 6 inovasi fokus.

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Aksesibilitas kanal bagi penyandang disabilitas	Tersedia format inklusif (bahasa isyarat/mudah dibaca)	Belum tersedia informasi	Kesenjangan penting dari perspektif kohesi sosial dan kelompok rentan.
Standar waktu penyelesaian aduan (SLA)	Ditetapkan dan dipatuhi	Belum tersedia	Kesenjangan utama yang teridentifikasi kajian.
Tingkat transparansi status tindak lanjut	Terbuka bagi publik	Belum terkonfirmasi	Perlu mekanisme pelaporan balik ke pelapor.

4.6.5.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Dari perspektif kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan, kesenjangan paling mendesak pada SAPA HSS adalah ketiadaan informasi mengenai aksesibilitas kanal bagi penyandang disabilitas, padahal berpotensi menjadi kanal deteksi dini keluhan kelompok rentan terkait aksesibilitas layanan publik.

4.6.5.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan SAPA HSS (Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.35 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 35)

1. Masalah yang Diselesaikan	Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sulit menyuarakan keluhan pelayanan publik melalui jalur konvensional, dan belum jelas apakah kanal pengaduan resmi daerah dapat diakses secara inklusif.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Seluruh masyarakat Kabupaten HSS, dengan penekanan pada kelompok rentan yang selama ini sulit bersuara.
3. Titik Masuk	Penyampaian aduan melalui kanal SAPA HSS.
4. Langkah-Langkah Kunci	Penyampaian aduan → (mekanisme disposisi dan tindak lanjut belum terdokumentasi secara publik).

5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Warga kelompok rentan yang mengetahui SAPA HSS berpotensi merasa akhirnya memiliki saluran resmi untuk didengar, namun tanpa kepastian aksesibilitas (bahasa isyarat, format mudah dibaca) dan kejelasan tindak lanjut, kelompok rentan berisiko tetap merasa suaranya tidak benar-benar sampai atau ditindaklanjuti.
6. Efek Terukur	Kanal pengaduan tersedia dan dapat diakses masyarakat (jumlah aduan dari kelompok rentan, aksesibilitas kanal, dan status tindak lanjut belum terdokumentasi).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Menjadi instrumen akuntabilitas dan partisipasi publik yang relevan dengan prinsip *good governance*, berpotensi menjadi kanal deteksi dini keluhan kelompok rentan terkait aksesibilitas layanan publik.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	SAPA HSS menjadi kanal pengaduan yang benar-benar inklusif dan dapat diakses seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dengan SLA yang jelas dan status tindak lanjut yang transparan.
Asumsi Kunci	Masyarakat, termasuk kelompok rentan, mengetahui keberadaan kanal ini; format aksesibel bagi disabilitas dikembangkan; instansi terkait menindaklanjuti aduan secara konsisten.
Pemangku Kepentingan	Sekretariat Daerah/Diskominfo, Inspektorat Daerah, organisasi penyandang disabilitas, masyarakat pelapor termasuk kelompok rentan.

4.6.5.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): melengkapi dokumentasi mekanisme kerja SAPA HSS dan mengkaji aksesibilitas kanal bagi penyandang disabilitas sebagai prioritas dari perspektif kohesi sosial.
- Jangka menengah (6–18 bulan): mengembangkan format pengaduan yang inklusif (bahasa isyarat, format mudah dibaca) serta menetapkan SLA dan transparansi status tindak lanjut.
- Keterhubungan model: menjadi kanal deteksi dini keluhan kelompok rentan yang terhubung dengan Loksado Inklusif dan Bina Persada dalam memperkuat kohesi sosial daerah.

4.6.6 Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif)

Tabel 4.36 Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif) (Nama Resmi:)

Nama Resmi: *LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu Pintu untuk Administrasi Keluarga Terpadu — Kecamatan Loksado/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Gambar 4.6 Ilustrasi Loksado Inklusif — Layanan Adminduk Kolektif bagi

Loksado Inklusif dirancang untuk membantu masyarakat memiliki legalitas hukum yang kuat atas identitas mereka, yang penting untuk akses pendidikan, kesehatan, dan perbankan, serta secara jelas menjamin penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat adat mendapatkan identitas resmi secara kolektif tanpa biaya perjalanan yang mahal. Program ini menjawab tantangan geografis Kecamatan Loksado yang berada di kawasan pegunungan Meratus dengan aksesibilitas terbatas.

Inovasi ini memastikan bahwa alur kinerja dari tingkat kabupaten hingga ke seksi di kecamatan (Camat, Kepala Seksi/CKS) berjalan efektif karena hambatan geografis dan administratif warga berhasil dipangkas melalui layanan terpadu ini, serta berkontribusi positif terhadap nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten HSS, yang merupakan salah satu poin penilaian penting dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Tabel 4.37 Layanan Adminduk Inklusif (Loksado Inklusif) (Kekuatan)

Kekuatan	**Tantangan/Kelemahan**
• Merupakan satu-satunya di antara enam inovasi fokus yang secara jelas menyebut tiga kelompok rentan sekaligus (disabilitas, lansia, masyarakat adat) dalam dokumentasi resminya • Model "jemput bola kolektif" efektif mengatasi hambatan geografis wilayah pegunungan tanpa memerlukan infrastruktur digital mahal	• Cakupan wilayah masih terbatas pada Kecamatan Loksado dan berpotensi belum direplikasi ke kecamatan lain dengan tantangan geografis serupa (Daha Barat, Padang Batung) • Integrasi data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan program bansos (SLRT, Pepenabat) belum tergambar secara jelas

Kekuatan	Tantangan/Kelemahan
• Memiliki keterkaitan jelas dengan indikator kinerja LPPD dan Indeks Inovasi Daerah, sehingga keberlanjutan politisnya relatif terjamin	• Frekuensi pelaksanaan layanan kolektif (berkala/insidental) belum terpublikasi

4.6.6.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.38 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu Pintu untuk Administrasi Keluarga Terpadu
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap; identitas visual mengacu pada Gambar 4.6 Ilustrasi Loksado Inklusif.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Kecamatan Loksado/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kategori Asta Cita	Asta Cita 9 - kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan (disabilitas, lansia, masyarakat adat)

4.6.6.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Membantu masyarakat memiliki legalitas hukum atas identitas mereka secara kolektif tanpa biaya perjalanan yang mahal, menjawab tantangan geografis kawasan pegunungan Meratus, sehingga akses pendidikan, kesehatan, dan perbankan menjadi lebih terbuka.

Sasaran Penerima Manfaat: Masyarakat Kecamatan Loksado, dengan penekanan eksplisit pada penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat adat.

4.6.6.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Model layanan “jemput bola kolektif” di kawasan pegunungan Meratus.
- Koordinasi alur kinerja dari kabupaten hingga seksi kecamatan (Camat, Kepala Seksi/CKS).

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.39 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Kecamatan Loksado/Disdukcapil	Menyelenggarakan layanan adminduk kolektif langsung ke wilayah warga.

Aktor	Peran Utama
Camat dan Kepala Seksi (CKS)	Memastikan alur kinerja dari kabupaten hingga kecamatan berjalan efektif.
Penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat	Memperoleh identitas resmi secara kolektif tanpa biaya perjalanan mahal.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Kecamatan Loksado bersama Disdukcapil mengidentifikasi warga, khususnya kelompok rentan, yang belum memiliki identitas resmi.
- Langkah 2: Layanan adminduk kolektif dilaksanakan langsung mendekati lokasi warga di kawasan pegunungan Meratus.
- Langkah 3: Camat dan Kepala Seksi memastikan alur kinerja kabupaten-kecamatan berjalan efektif memangkas hambatan geografis dan administratif.
- Langkah 4: Warga memperoleh identitas resmi (dokumen kependudukan) secara kolektif.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Replikasi model ke kecamatan lain dengan tantangan geografis serupa (Daha Barat, Padang Batung) dan integrasi data dengan DTKS/program bansos.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Model "jemput bola kolektif" menjadi mekanisme utama yang efektif mengatasi hambatan geografis tanpa memerlukan infrastruktur digital mahal; namun cakupan masih terbatas pada Kecamatan Loksado dan integrasi data dengan DTKS serta program bansos (SLRT, Pepenabat) belum tergambar jelas.

e. Keluaran (Output)

Warga Kecamatan Loksado, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat, memperoleh identitas resmi secara kolektif; berkontribusi positif terhadap nilai Indeks Inovasi Daerah dan LPPD Kabupaten HSS.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Warga rentan di kawasan pegunungan Meratus memiliki legalitas identitas untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan perbankan (jangka pendek); model direplikasi ke kecamatan lain dengan tantangan geografis serupa dan terintegrasi dengan DTKS/program bansos (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Cakupan wilayah masih terbatas pada Kecamatan Loksado dan berpotensi belum direplikasi ke kecamatan lain dengan tantangan geografis serupa (Daha Barat, Padang Batung). Integrasi data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan program bansos (SLRT, Pepenabat) belum tergambar secara jelas. Frekuensi pelaksanaan layanan kolektif (berkala/insidental) belum terpublikasi.

4.6.6.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.40 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD belum diisi/tercatat "Belum Ada" oleh instansi pengampu sehingga kesiapan indikator ini belum dapat dinilai dari dokumen rekap.
Ketersediaan dan Peran SDM	Ada Indikasi Awal	Camat, Kepala Seksi, dan petugas Disdukcapil teridentifikasi terlibat aktif dalam alur kinerja kabupaten-kecamatan, namun dokumen formal belum tercantum.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran layanan jemput bola kolektif belum tercantum dalam rekap SKPD.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Model jemput bola kolektif menjadi alat kerja utama yang efektif tanpa memerlukan infrastruktur digital mahal.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek petugas pelaksana layanan kolektif belum tercatat.
Integrasi dalam RKPD	Ada Indikasi Awal	Kontribusi terhadap Indeks Inovasi Daerah dan LPPD menunjukkan keterkaitan dengan RKPD, meski halaman spesifik belum dikutip.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Ada" pada rekap SKPD (Kecamatan Loksado), sama seperti SISTER, SI LOWIS, dan GOFO AMAN TERTIB dari kecamatan yang sama.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.41 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	**Target**	**Realisasi**	**Keterangan**
Jumlah warga rentan memperoleh identitas resmi	Meningkat tiap pelaksanaan	Belum tersedia dalam angka	Perlu pencatatan rutin per kegiatan kolektif.
Frekuensi pelaksanaan layanan kolektif	Berkala dan terjadwal	Belum terpublikasi (berkala/insidental)	Kesenjangan data yang perlu ditutup.
Replikasi ke kecamatan geografis serupa	Direplikasi ke Daha Barat, Padang Batung, dll.	Baru di Kecamatan Loksado	Peluang perluasan model ke wilayah pegunungan lain.
Integrasi data dengan DTKS/program bansos	Terintegrasi penuh	Belum tergambar	Peluang penguatan sinergi dengan SLRT Menyapa dan Pepenabat.

4.6.6.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Sebagai satu-satunya di antara enam inovasi fokus yang secara jelas menyebut tiga kelompok rentan sekaligus (disabilitas, lansia, masyarakat adat), Loksado Inklusif memiliki nilai strategis tinggi bagi agenda kohesi sosial, namun keterbatasan cakupan wilayah dan ketiadaan data dukung IGA membatasi pengakuan formal atas capaian ini.

4.6.6.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu Pintu untuk Administrasi Keluarga Terpadu disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.42 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 42)

1. Masalah yang Diselesaikan	Warga di kawasan pegunungan Meratus, khususnya penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat, kesulitan mengurus dokumen identitas resmi akibat hambatan geografis dan biaya perjalanan yang mahal.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat adat di Kecamatan Loksado.
3. Titik Masuk	Identifikasi warga rentan yang belum memiliki identitas resmi oleh Kecamatan Loksado dan Disdukcapil.

4. Langkah-Langkah Kunci	Identifikasi warga rentan → layanan adminduk kolektif jemput bola → koordinasi alur kinerja kabupaten-kecamatan → penerbitan identitas resmi.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Warga rentan merasakan langsung hilangnya beban biaya dan waktu perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten untuk mengurus dokumen; penyandang disabilitas dan lansia merasa benar-benar diperhatikan karena layanan datang mendekati mereka, bukan sebaliknya, sementara masyarakat adat merasa identitas dan keberadaan mereka diakui secara resmi oleh negara.
6. Efek Terukur	Warga Kecamatan Loksado, termasuk kelompok rentan, memperoleh identitas resmi secara kolektif (jumlah pasti dan frekuensi pelaksanaan belum dipublikasikan).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Legalitas identitas yang diperoleh membuka akses pendidikan, kesehatan, dan perbankan bagi warga rentan; berkontribusi positif terhadap Indeks Inovasi Daerah dan LPPD Kabupaten HSS.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Seluruh kecamatan dengan tantangan geografis serupa (Daha Barat, Padang Batung, dan lainnya) mereplikasi model jemput bola kolektif, terintegrasi dengan DTKS dan program bansos, sehingga tidak ada warga rentan di wilayah terpencil HSS yang tanpa identitas resmi.
Asumsi Kunci	Kecamatan dan Disdukcapil konsisten menjadwalkan layanan kolektif; warga rentan bersedia dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan kolektif; replikasi ke kecamatan lain mendapat dukungan kebijakan kabupaten.
Pemangku Kepentingan	Kecamatan Loksado, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat setempat, Dinas Sosial (potensi integrasi DTKS).

4.6.6.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): melengkapi status data dukung IGA dan mempublikasikan jumlah warga rentan yang telah memperoleh identitas resmi serta frekuensi pelaksanaan layanan kolektif.

- Jangka menengah (6–18 bulan): merintis replikasi model ke kecamatan dengan tantangan geografis serupa (Daha Barat, Padang Batung) dan mengintegrasikan data dengan DTKS serta program bansos (SLRT Menyapa, Pepenabat).
- Keterhubungan model: menjadi rujukan utama model layanan inklusif berbasis kelompok rentan bagi kohesi sosial daerah, melengkapi SAPA HSS dan Bina Persada dari sisi pemenuhan hak dasar identitas.

4.7 Analisis Komparatif Enam Inovasi

Untuk memperoleh gambaran pembanding yang transparan, tim kajian menyajikan kembali penilaian kualitatif berskala 1 (rendah) hingga 5 (tinggi) terhadap empat dimensi evaluatif yang telah digunakan sebagai dasar skoring pada Bab III: jangkauan kelompok rentan, tingkat digitalisasi, kejelasan kelembagaan/SOP, dan keterbukaan data publik.

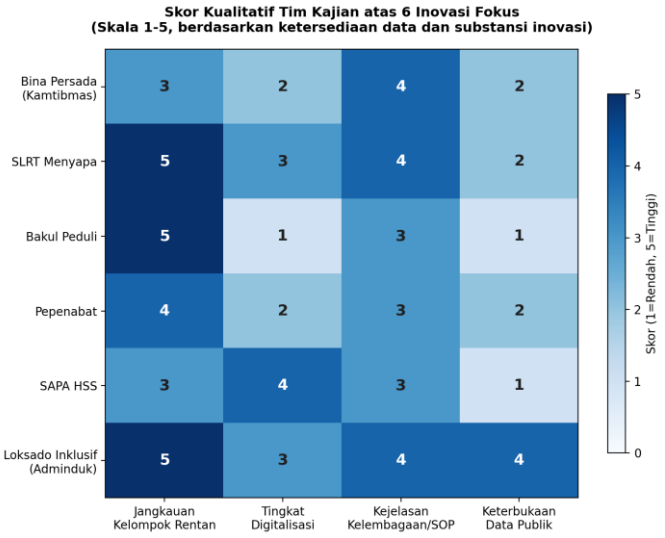

Gambar 4.7 Skor Kualitatif Tim Kajian atas Enam Inovasi Fokus

Hasil pemetaan menunjukkan Loksado Inklusif dan SLRT Menyapa memperoleh skor komposit tertinggi, didukung oleh kejelasan kelembagaan dan orientasi jelas terhadap kelompok rentan. Sebaliknya, Bakul Peduli dan SAPA HSS memperoleh skor terendah pada dimensi keterbukaan data publik, yang mengonfirmasi temuan pada subbab 4.6.3 dan 4.6.5 bahwa kedua inovasi ini memerlukan penguatan dokumentasi dan pelaporan capaian secara mendesak. SAPA HSS memperoleh skor relatif baik pada dimensi digitalisasi karena sifat dasarnya sebagai saluran pengaduan yang lazim berbasis kanal digital, namun tetap lemah pada aspek kelembagaan dan keterbukaan data akibat minimnya dokumentasi resmi yang dapat ditelusuri.

4.8 Analisis SWOT Gabungan

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) disusun secara keseluruhan terhadap keseluruhan portofolio enam inovasi fokus kajian, untuk melihat pola kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berlaku lintas-inovasi sebagai basis perumusan strategi pada Bab V.

Gambar 4.8 Analisis SWOT Gabungan Inovasi Tata Kelola Sosial-Politik

Analisis SWOT menegaskan bahwa kekuatan utama portofolio inovasi terletak pada cakupan spektrum kelompok rentan yang luas dan dukungan regulasi yang jelas, namun kelemahan struktural pada dokumentasi dan integrasi data menjadi penghambat utama optimalisasi. Peluang terbesar terletak pada keselarasan dengan visi RPJMD dan ketersediaan platform digital SENADA PLUS yang dapat menjadi basis integrasi, sementara ancaman utama adalah risiko keberlanjutan program tanpa payung perencanaan formal serta kesenjangan geografis yang memperlambat replikasi.

4.9 Rangkuman Pemeriksaan kondisi

Rangkuman dari keseluruhan analisis pada Bab IV menunjukkan bahwa tantangan utama penguatan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bukan terletak pada ketiadaan program — keenam inovasi fokus kajian telah menjangkau spektrum kelompok rentan yang luas — melainkan pada lemahnya integrasi data lintas-program, minimnya standar kinerja yang terukur dan terpublikasi, serta terbatasnya replikasi inovasi unggulan ke seluruh wilayah kabupaten. Temuan ini menjadi basis perumusan visi dan arah strategis pada Bab V, serta desain model tata kelola terpadu pada Bab VI.

BAB 5
VISI DAN ARAH

PENGUATAN KOHESI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN MELALUI INOVASI TATA KELOLA SOSIAL-POLITIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB V
VISI DAN ARAH PENGUATAN KOHESI SOSIAL 2026–2030

5.1 Arah Umum Penguatan Kohesi Sosial

Berdasarkan rangkuman pemeriksaan kondisi pada Bab IV, arah umum penguatan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2026–2030 diarahkan pada tiga agenda besar: (1) konsolidasi data dan digitalisasi layanan sosial-politik, (2) perluasan cakupan wilayah melalui replikasi inovasi unggulan, dan (3) penguatan partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

5.2 Visi Penguatan Kohesi Sosial dan Perlindungan Kelompok Rentan 2030

"Terwujudnya Hulu Sungai Selatan sebagai kabupaten dengan tata kelola sosial-politik yang inklusif, responsif, dan berbasis data, yang mengayomi seluruh kelompok rentan tanpa terkecuali."

Visi ini dirumuskan selaras dengan pilar Mengayomi dan Teknologis dalam visi RPJMD Kabupaten HSS "SEMANGAT", serta menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana kelompok rentan — lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan masyarakat adat — turut merasakan manfaat pembangunan secara setara.

5.3 Prinsip Pengembangan

- Berbasis data (data-driven): setiap keputusan penyaluran layanan didasarkan pada data yang terverifikasi dan termutakhirkan secara berkala;
- Tidak ada yang tertinggal (no one left behind): seluruh kecamatan memperoleh akses terhadap inovasi unggulan tata kelola sosial-politik;
- Kolaboratif lintas-sektor: melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama/adat, dunia usaha, dan lembaga filantropi;
- Transparan dan akuntabel: capaian setiap inovasi dapat diakses dan dipantau publik secara berkala;
- Berkelanjutan: setiap inovasi memiliki payung kelembagaan dan pembiayaan yang terjamin lintas tahun anggaran.

5.4 Strategi per Klaster Tematik

Tabel 5.1 Strategi Penguatan per Klaster Tematik

Klaster Tematik	Strategi Utama 2026–2030
Kamtibmas & Persatuan Bangsa	Replikasi model Bina Persada ke kecamatan prioritas; digitalisasi basis data kerawanan sosial
Perlindungan Sosial & Bansos	Integrasi data SLRT-Bakul Peduli-Pepenabat; penetapan standar waktu tanggap
Reformasi Politik, Hukum & Adminduk	Penguatan SLA pengaduan SAPA HSS; replikasi Loksado Inklusif ke kecamatan lain
Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan	Integrasi data lansia/ODGJ dengan program perlindungan sosial
Pendidikan Inklusif & SDM	Perluasan literasi inklusif berbasis komunitas ke seluruh kecamatan
Lingkungan, Sanitasi & Toleransi	Penguatan forum toleransi antarumat beragama tingkat kecamatan

5.5 Model Pengembangan Terpadu

Model pengembangan yang diusulkan kajian ini adalah sistem tata kelola sosial-politik terintegrasi tiga tingkat: tingkat desa/kelurahan sebagai basis deteksi dan pendataan awal (melalui Puskesos, RT/RW, dan kader masyarakat), tingkat kecamatan sebagai simpul koordinasi dan penyaluran layanan (melalui Forkopimcam dan unit pelayanan terpadu kecamatan), serta tingkat kabupaten sebagai pusat integrasi data, evaluasi, dan perumusan kebijakan (melalui *dashboard* SIGAP-KOHESI yang diusulkan pada Bab VI). Model ini konsisten dengan struktur yang telah berjalan pada SLRT (Puskesos desa – SLRT kabupaten) namun diperluas mencakup seluruh enam inovasi fokus kajian.

5.6 Tahapan Pengembangan

5.6.1 Fase I (2026–2027): Konsolidasi dan Perbaikan Dasar

Fase I difokuskan pada perbaikan dokumentasi, penetapan standar kinerja, dan deduplikasi data lintas-program bansos, sebagai fondasi sebelum ekspansi wilayah dan digitalisasi lanjutan dilakukan.

5.6.2 Fase II (2028–2030): Ekspansi dan Integrasi

Fase II difokuskan pada replikasi inovasi unggulan ke kecamatan yang belum terjangkau, pengembangan *dashboard* digital terpadu (SIGAP-KOHESI), serta pembentukan forum partisipasi kelompok rentan (FORTAS) di seluruh kecamatan.

5.7 Dampak yang Diharapkan

- Meningkatnya cakupan kelompok rentan yang terlindungi oleh minimal satu program perlindungan sosial di seluruh 11 kecamatan;
- Menurunnya potensi duplikasi dan celah layanan bansos melalui integrasi basis data;
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap tata kelola sosial-politik daerah melalui keterbukaan data dan standar waktu tanggap yang terukur;
- Terwujudnya mekanisme partisipasi kelompok rentan yang melembaga dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

5.8 Integrasi Kebijakan Daerah (Kesesuaian dengan RPJMD)

5.8.1 Visi "SEMANGAT" dan Keterkaitan dengan Kohesi Sosial

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 mengusung visi "Membangun Desa, Menata Kota, untuk Mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)." Kelima pilar visi ini memiliki keterkaitan konseptual yang kuat dengan agenda kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan, khususnya pilar Mengayomi dan Teknologis.

Catatan metodologis: *pemetaan pada bab ini disusun berdasarkan informasi visi RPJMD yang telah dipublikasikan secara resmi. Rincian misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja RPJMD secara utuh berada di luar cakupan data yang tersedia bagi tim kajian, sehingga pemetaan bersifat kesesuaian tingkat visi (visi-level alignment) dan disarankan untuk diverifikasi lebih lanjut terhadap dokumen RPJMD final beserta Renstra Perangkat Daerah terkait.*

5.8.2 Pemetaan Inovasi terhadap Pilar Visi

Tabel 5.2 Pemetaan Enam Inovasi Fokus terhadap Pilar Visi SEMANGAT

Pilar Visi	Makna Kebijakan	Inovasi Terkait
Sejahtera	Pemenuhan kebutuhan dasar warga	SLRT Menyapa, Bakul Peduli, Pepenabat

Pilar Visi	Makna Kebijakan	Inovasi Terkait
Mandiri	Kemandirian sosial-ekonomi kelompok rentan	Loksado Inklusif (kemandirian legal-administratif)
Agamis	Nilai keagamaan sebagai landasan bermasyarakat	Bina Persada (pelibatan tokoh agama)
Mengayomi	Perlindungan negara terhadap kelompok rentan	Bakul Peduli, SLRT Menyapa, Pepenabat, Loksado Inklusif
Teknologis	Transformasi digital pelayanan publik	SAPA HSS, potensi digitalisasi SLRT Menyapa

5.8.3 Catatan Kesenjangan dan Peluang Penguatan

- Pilar Teknologis relatif kurang terwakili merata; hanya SAPA HSS yang inheren berbasis digital, sementara SLRT Menyapa, Bakul Peduli, dan Pepenabat masih manual;
- Pilar Mandiri masih minim representasi pada inovasi perlindungan sosial yang cenderung berorientasi pemberian bantuan (charity-based);
- Belum ditemukan dokumen resmi yang mencantumkan keenam inovasi secara jelas dalam matriks kinerja RPJMD atau Renstra Perangkat Daerah, sehingga terdapat risiko keberlanjutan program;
- Peluang penguatan melalui pencantuman jelas keenam inovasi sebagai indikator kinerja urusan Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Renstra Perangkat Daerah 2025–2029.

BAB 6
DESAIN MODEL

PENGUATAN KOHESI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN MELALUI INOVASI TATA KELOLA SOSIAL-POLITIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB VI
DESAIN MODEL TATA KELOLA TERPADU

6.1 Model Sistem Tata Kelola Sosial-Politik Terpadu

Berangkat dari model pengembangan yang dirumuskan pada Bab V, desain model tata kelola terpadu disusun dalam tiga tingkat yang saling terhubung: tingkat desa/kelurahan sebagai basis deteksi dan pendataan awal, tingkat kecamatan sebagai simpul koordinasi dan penyaluran layanan, serta tingkat kabupaten sebagai pusat integrasi data, evaluasi, dan perumusan kebijakan.

Gambar 6.1 Model Sistem Tata Kelola Sosial-Politik Terpadu Tiga Tingkat

Model tiga tingkat ini menjadi kerangka payung (umbrella *framework*) yang menaungi model optimalisasi masing-masing dari enam inovasi fokus kajian, sebagaimana dijabarkan pada subbab 6.2.

6.2 Model Optimalisasi per Inovasi

Setiap model optimalisasi disajikan dalam bentuk alur proses (process flow) lima tahap yang menggambarkan siklus ideal dari deteksi kebutuhan hingga evaluasi dampak, dilengkapi dengan rekomendasi aksi prioritas yang bersifat konkret dan dapat ditindaklanjuti dalam jangka pendek hingga menengah.

6.2.1 Model Penguatan Bina Persada

Model optimalisasi Bina Persada mengusulkan penguatan pendekatan preventif berbasis komunitas menjadi sistem deteksi dini yang lebih sistematis, dengan pelibatan jelas kelompok rentan dalam forum dialog, serta pembentukan

basis data kerawanan sosial sederhana di tingkat kecamatan untuk memudahkan replikasi ke kecamatan lain.

Gambar 6.2 Model Alur Optimalisasi — Model Penguatan Bina Persada

Penanggung jawab implementasi: *Camat Kalumpang bersama Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten HSS, direplikasi oleh Bagian Pemerintahan Umum Setda untuk kecamatan lain.*

Tabel 6.1 Model Penguatan Bina Persada

Rekomendasi Aksi Prioritas

→ Menyusun basis data kerawanan sosial sederhana (spreadsheet/formulir digital) di tingkat kecamatan yang mencatat isu, lokasi, dan tindak lanjut pembinaan;
→ Mereplikasi model Bina Persada ke minimal 3 kecamatan prioritas lain pada tahun pertama, dipilih berdasarkan riwayat kerawanan sosial;
→ Melibatkan secara jelas perwakilan penyandang disabilitas, perempuan, dan pemuda dalam forum dialog persatuan bangsa, tidak hanya tokoh formal;
→ Menyusun laporan evaluasi semesteran yang dipublikasikan pada portal SENADA PLUS.

6.2.2 Model Optimalisasi SLRT Menyapa

Model optimalisasi SLRT Menyapa mengusulkan transformasi dari sistem rujukan manual menjadi sistem rujukan digital dengan skoring kerentanan terstandardisasi, sehingga proses identifikasi, verifikasi, dan rujukan warga dapat dilakukan lebih cepat dan terlacak, sekaligus terintegrasi dengan program bansos lain seperti Pepenabat dan Bakul Peduli untuk mencegah duplikasi maupun celah layanan.

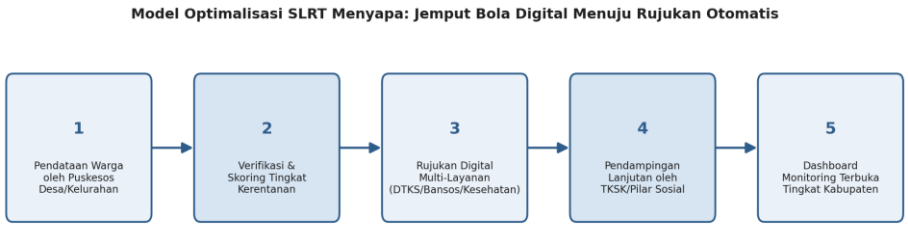

Gambar 6.3 Model Alur Optimalisasi — Model Optimalisasi SLRT Menyapa

Penanggung jawab implementasi: *Dinas Sosial Kabupaten HSS bersama Puskesos tingkat desa/kelurahan dan Dinas Kominfo untuk dukungan sistem informasi.*

Tabel 6.2 Model Optimalisasi SLRT Menyapa (Bagian 2)

Rekomendasi Aksi Prioritas
→ Mengembangkan sistem informasi rujukan digital sederhana yang menghubungkan Puskesos desa/kelurahan dengan Ruang Layanan SLRT Rakat Mufakat di Kandangan; → Menyusun instrumen skoring kerentanan terstandardisasi untuk memprioritaskan penanganan kasus yang paling mendesak; → Melakukan deduplikasi data penerima antara SLRT Menyapa, Bakul Peduli, dan Pepenabat secara berkala (triwulanan); → Mempublikasikan capaian jumlah warga terlayani dan rata-rata waktu rujukan setiap semester.

6.2.3 Model Bakul Peduli

Model optimalisasi Bakul Peduli mengusulkan penguatan pendataan lansia rentan berbasis komunitas (RT/Posyandu Lansia), penetapan kriteria penerima yang transparan, serta integrasi dengan layanan kesehatan geriatri yang telah berjalan di RSUD Brigjend H. Hasan Basry agar perlindungan lansia bersifat komprehensif, tidak hanya berupa bantuan tunai.

Gambar 6.4 Model Alur Optimalisasi — Model Bakul Peduli

Penanggung jawab implementasi: *Dinas Sosial Kabupaten HSS bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.*

Tabel 6.3 Model Bakul Peduli (Bagian 3)

Rekomendasi Aksi Prioritas
→ Menyusun dan mempublikasikan kriteria serta mekanisme penetapan penerima manfaat Bakul Peduli secara terbuka; → Mengintegrasikan data penerima Bakul Peduli dengan Posyandu Lansia dan layanan Geriatri RSUD Brigjend H. Hasan Basry untuk pemantauan kesehatan berkelanjutan; → Menambahkan komponen kunjungan rumah (home visit) berkala, tidak hanya penyaluran bantuan tunai/barang tahunan; → Melengkapi dokumentasi program pada basis data rekapitulasi inovasi daerah dengan uraian dan manfaat yang lengkap.

6.2.4 Model Pepenabat

Model optimalisasi Pepenabat mengusulkan penetapan standar waktu tanggap (response time) yang terukur, penguatan koordinasi dengan lembaga filantropi lokal (BAZNAS, lembaga zakat), serta pelaporan dampak bantuan secara sistematis untuk memastikan akuntabilitas penyaluran bansos darurat.

Gambar 6.5 Model Alur Optimalisasi — Model Pepenabat

Penanggung jawab implementasi: *Dinas Sosial Kabupaten HSS bersama Pemerintah Desa/Kelurahan dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).*

Tabel 6.4 Model Pepenabat (Bagian 4)

Rekomendasi Aksi Prioritas
→ Menetapkan standar waktu tanggap maksimal (misalnya 1x24 jam sejak laporan diterima hingga verifikasi lapangan selesai); → Memperkuat kemitraan dengan BAZNAS dan lembaga filantropi lokal untuk memperluas sumber pendanaan bansos cepat tanggap; → Melakukan deduplikasi data penerima dengan SLRT Menyapa dan Bakul Peduli untuk mencegah tumpang tindih sasaran; → Mendokumentasikan setiap kasus penanganan beserta dampaknya sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran kebijakan.

6.2.5 Model SAPA HSS

Model optimalisasi SAPA HSS mengusulkan penguatan mekanisme disposisi aduan ke perangkat daerah terkait dengan batas waktu penyelesaian yang jelas (service level agreement), serta publikasi status tindak lanjut aduan kepada publik untuk memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat, termasuk memastikan aksesibilitas kanal pengaduan bagi penyandang disabilitas.

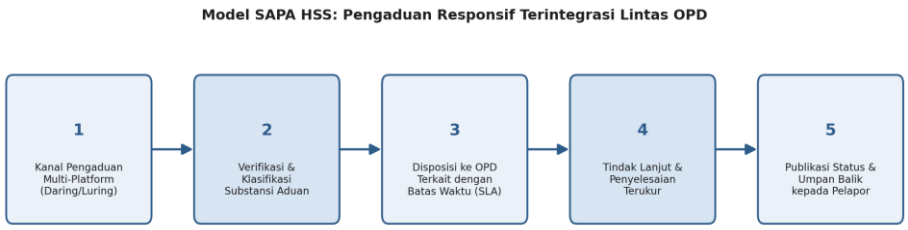

Gambar 6.6 Model Alur Optimalisasi — Model SAPA HSS

Penanggung jawab implementasi: *Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Bagian Organisasi Setda dan seluruh OPD sebagai unit penerima disposisi.*

Tabel 6.5 Model SAPA HSS (Bagian 5)

Rekomendasi Aksi Prioritas
→ Menetapkan dan mempublikasikan standar waktu penyelesaian aduan (SLA) untuk setiap kategori aduan; → Memastikan kanal pengaduan SAPA HSS dapat diakses penyandang disabilitas (kompatibel pembaca layar, opsi pengaduan melalui pendamping/keluarga); → Membangun *dashboard* status aduan yang dapat dipantau publik secara daring melalui portal SENADA PLUS; → Melakukan survei kepuasan pelapor secara berkala untuk mengevaluasi responsivitas tindak lanjut.

6.2.6 Model Loksado Inklusif

Model optimalisasi Loksado Inklusif mengusulkan replikasi model layanan kolektif jemput bola ke kecamatan lain dengan tantangan geografis serupa, serta integrasi data adminduk dengan DTKS dan program bansos agar kelompok rentan yang telah memiliki dokumen kependudukan dapat langsung diarahkan ke program perlindungan sosial yang relevan.

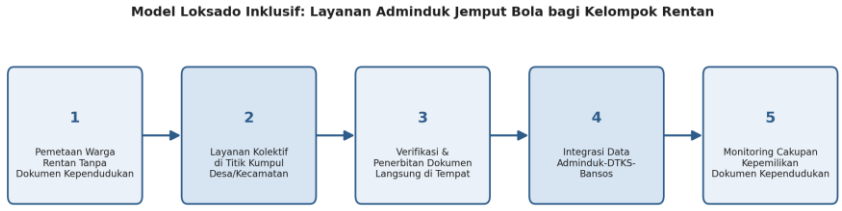

Gambar 6.7 Model Alur Optimalisasi — Model Loksado Inklusif

Penanggung jawab implementasi: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Kecamatan Loksado dan direplikasi oleh kecamatan lain yang relevan.*

Tabel 6.6 Model Loksado Inklusif (Bagian 6)

Rekomendasi Aksi Prioritas
→ Mereplikasi model layanan kolektif satu pintu ke Kecamatan Daha Barat dan Padang Batung yang memiliki tantangan geografis serupa; → Mengintegrasikan data hasil layanan Loksado Inklusif dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan basis data SLRT/Bakul Peduli; → Menetapkan jadwal layanan kolektif berkala (misalnya triwulanan) agar warga dapat merencanakan kehadiran; → Menjadikan capaian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan kelompok rentan sebagai indikator kinerja Disdukcapil yang dipublikasikan tahunan.

6.3 Skema Kelembagaan Lintas OPD

Implementasi model tata kelola terpadu memerlukan kejelasan pembagian peran antar-perangkat daerah. Tabel 6.1 menyajikan skema kelembagaan yang diusulkan untuk mendukung koordinasi lintas-OPD dalam penguatan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan.

Tabel 6.7 Skema Peran Kelembagaan Lintas OPD

Perangkat Daerah	**Peran Utama dalam Model Terpadu**
Dinas Sosial	Koordinator utama perlindungan sosial (SLRT, Bakul Peduli, Pepenabat); pengelola basis data kelompok rentan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyedia layanan identitas hukum inklusif (Loksado Inklusif) dan integrasi data adminduk
Satpol PP & Kecamatan	Pelaksana pembinaan ketenteraman dan ketertiban berbasis komunitas (Bina Persada)
Diskominfo & Bagian Organisasi Setda	Pengelola kanal pengaduan (SAPA HSS) dan *dashboard* integrasi data (SIGAP-KOHESI)
Bappeda/Bapperida	Integrator kebijakan ke dalam RPJMD, Renstra, dan RKPD
Kecamatan (seluruh 11 kecamatan)	Simpul koordinasi tingkat wilayah dan penyelenggara FORTAS

6.4 Rekomendasi Inovasi Baru

Selain optimalisasi terhadap enam inovasi eksisting, kajian ini mengidentifikasi dua kesenjangan struktural yang memerlukan pengembangan inovasi baru: (1) tidak adanya instrumen pemantauan lintas-inovasi yang terintegrasi, dan (2) minimnya mekanisme partisipasi langsung kelompok rentan dalam perumusan kebijakan.

6.4.1 SIGAP-KOHESI: Sistem Informasi Terpadu Gawat-Darurat dan Perlindungan Kohesi Sosial

SIGAP-KOHESI diusulkan sebagai *dashboard* digital terpadu yang mengonsolidasikan data dari SLRT Menyapa, Bakul Peduli, Pepenabat, dan Loksado Inklusif ke dalam satu basis data warga rentan tunggal (single source of truth). Sistem ini memungkinkan Pemerintah Kabupaten HSS memantau secara *real-time* cakupan perlindungan sosial per kecamatan, mendeteksi celah layanan (warga yang belum tersentuh program apa pun), serta menghasilkan peringatan dini (early warning) bagi kasus yang memerlukan penanganan cepat tanggap.

- Fitur utama: peta sebaran kelompok rentan per kecamatan, status keikutsertaan program per individu/keluarga, dan modul pelaporan otomatis untuk kebutuhan LPPD dan RPJMD;
- Manfaat strategis: mencegah duplikasi bantuan, mengidentifikasi kecamatan dengan cakupan perlindungan terendah, dan menyediakan basis data untuk evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy);
- Kesesuaian RPJMD: mendukung pilar Teknologis dan Mengayomi secara simultan.

6.4.2 Forum Partisipasi Kelompok Rentan Tingkat Kecamatan (FORTAS)

FORTAS diusulkan sebagai forum musyawarah berkala tingkat kecamatan yang secara khusus menghadirkan perwakilan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya untuk menyampaikan masukan langsung terhadap perencanaan pembangunan desa/kecamatan (Musrenbang), sebagai pelengkap terhadap forum dialog persatuan bangsa seperti Bina Persada yang selama ini lebih banyak melibatkan tokoh formal.

- Fitur utama: pertemuan berkala minimal dua kali setahun, terintegrasi dengan siklus Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
- Manfaat strategis: memastikan suara kelompok rentan terdengar langsung dalam perencanaan pembangunan, bukan hanya menjadi objek program bantuan;
- Kesesuaian RPJMD: mendukung pilar Mengayomi dan prinsip pembangunan inklusif “membangun desa, menata kota” sebagaimana termaktub dalam visi SEMANGAT.

BAB 7
RENCANA AKSI

PENGUATAN KOHESI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN MELALUI INOVASI TATA KELOLA SOSIAL-POLITIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB VII
RENCANA AKSI DAN MATRIKS IMPLEMENTASI

7.1 Program Fase I (2026–2027): Konsolidasi dan Quick Wins

Program Fase I difokuskan pada langkah-langkah yang berbiaya relatif rendah namun berdampak tinggi terhadap akuntabilitas dan efektivitas layanan, sebagai fondasi sebelum ekspansi wilayah dan digitalisasi lanjutan dilakukan pada Fase II.

- P1 — Perbaikan dokumentasi dan basis data 20 inovasi, khususnya Bakul Peduli dan SAPA HSS;
- P2 — Penetapan standar waktu tanggap (SLA) untuk Pepenabat dan SAPA HSS;
- P3 — Deduplikasi data penerima manfaat antara SLRT Menyapa, Bakul Peduli, dan Pepenabat;
- P4 — Replikasi awal Bina Persada ke 3 kecamatan prioritas.

7.2 Program Fase II (2028–2030): Ekspansi dan Integrasi

Program Fase II difokuskan pada perluasan cakupan wilayah dan pengembangan sistem digital terpadu yang membutuhkan waktu persiapan dan investasi lebih besar.

- P5 — Replikasi Loksado Inklusif ke Kecamatan Daha Barat dan Padang Batung;
- P6 — Pembentukan Forum Partisipasi Kelompok Rentan Tingkat Kecamatan (FORTAS) di seluruh 11 kecamatan;
- P7 — Pengembangan dan peluncuran *dashboard* SIGAP-KOHESI;
- P8 — Integrasi penuh data Adminduk-DTKS-Bansos lintas seluruh perangkat daerah terkait.

7.3 Peta Jalan Implementasi

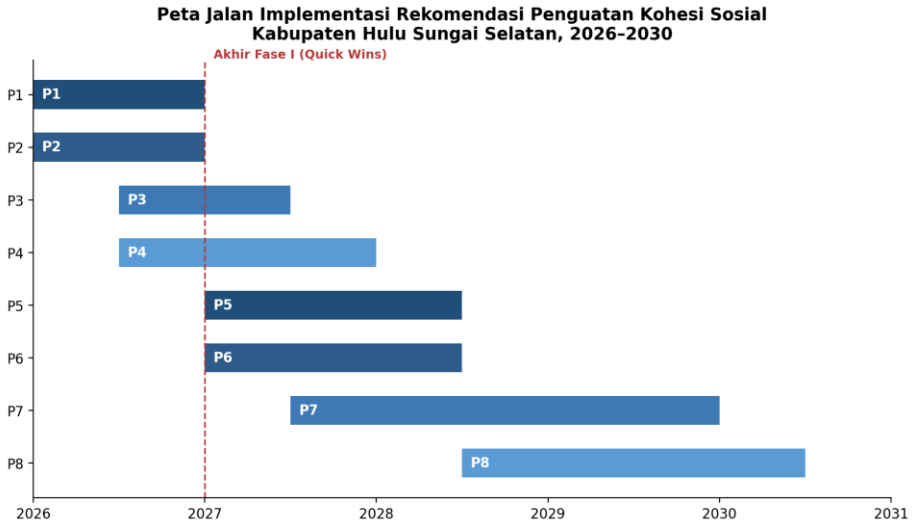

Gambar 7.1 Peta Jalan Implementasi Rekomendasi Penguatan Kohesi Sosial

Tabel 7.1 Legenda Program pada Peta Jalan Implementasi

Kode	Program
P1	Perbaikan Dokumentasi & Basis Data 48 Inovasi
P2	Standar Waktu Tanggap (SLA) Pepenabat & SAPA HSS
P3	Deduplikasi Data SLRT–Bakul Peduli–Pepenabat
P4	Replikasi Bina Persada ke 3 Kecamatan Prioritas
P5	Replikasi Loksado Inklusif (Daha Barat, Padang Batung)
P6	Pembentukan FORTAS Tingkat Kecamatan
P7	Pengembangan *Dashboard* SIGAP-KOHESI
P8	Integrasi Penuh Adminduk-DTKS-Bansos

7.4 Matriks Prioritas Implementasi

Tabel 7.2 Matriks Prioritas Implementasi Rekomendasi

Rekomendasi	Urgensi	Kompleksitas	Jangka Waktu
Perbaikan dokumentasi Bakul Peduli & SAPA HSS	Tinggi	Rendah	Pendek (0–6 bulan)
Standar waktu tanggap & SLA Pepenabat, SAPA HSS	Tinggi	Sedang	Pendek (0–6 bulan)
Deduplikasi data SLRT-Bakul Peduli-Pepenabat	Tinggi	Sedang	Menengah (6–12 bulan)
Replikasi Bina Persada & Loksado Inklusif	Sedang	Sedang	Menengah (6–12 bulan)
Pengembangan SIGAP-KOHESI	Sedang	Tinggi	Panjang (1–2 tahun)
Pembentukan FORTAS	Sedang	Rendah	Menengah (6–12 bulan)

7.5 Risiko dan Mitigasi Implementasi

Tabel 7.3 Risiko dan Strategi Mitigasi

Risiko	Strategi Mitigasi
Resistensi perubahan dari petugas lapangan terhadap digitalisasi sistem rujukan	Pelatihan bertahap dan pendampingan teknis intensif bagi petugas Puskesos dan TKSK
Keterbatasan anggaran daerah untuk pengembangan *dashboard* SIGAP-KOHESI	Pemanfaatan platform SENADA PLUS yang sudah tersedia sebagai basis pengembangan, mengurangi kebutuhan investasi baru
Keterbatasan konektivitas internet di kecamatan pegunungan (Loksado)	Model layanan kolektif jemput bola tetap dipertahankan sebagai solusi non-digital, dengan sinkronisasi data periodik saat konektivitas tersedia
Kurangnya komitmen politik untuk mencantumkan inovasi dalam Renstra/RKPD	Advokasi kepada Bappeda/Bapperida melalui forum sinkronisasi perencanaan yang telah rutin dilaksanakan
Pergantian personel kunci (TKSK, petugas kecamatan) mengganggu keberlanjutan	Penyusunan SOP tertulis dan mekanisme alih pengetahuan (knowledge transfer) yang terdokumentasi

BAB 8
PROYEKSI DAMPAK

PENGUATAN KOHESI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN MELALUI INOVASI TATA KELOLA SOSIAL-POLITIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB VIII
PROYEKSI DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN

8.1 Pendahuluan

Bab ini menyajikan proyeksi dampak implementasi rekomendasi kajian secara kualitatif-skenario, mengingat keterbatasan data kuantitatif historis (time-series) capaian keenam inovasi yang terdokumentasi secara terbuka pada saat kajian disusun sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dan Bab IV. Proyeksi disusun dalam bentuk pita kualitatif (rendah–sedang–tinggi) dan tiga skenario keberlanjutan, bukan dalam bentuk angka persentase definitif, untuk menjaga akurasi dan kehati-hatian metodologis kajian.

8.2 Proyeksi Dampak terhadap Cakupan Perlindungan Kelompok Rentan

Apabila rekomendasi Fase I dan Fase II diimplementasikan secara konsisten, kajian ini memproyeksikan peningkatan cakupan perlindungan kelompok rentan pada tiga dimensi utama: perluasan wilayah (dari 2 kecamatan dengan inovasi unggulan terdokumentasi menjadi seluruh 11 kecamatan), penurunan celah layanan (melalui deduplikasi dan integrasi data SIGAP-KOHESI), dan peningkatan kecepatan penanganan (melalui penetapan standar waktu tanggap pada Pepenabat dan SAPA HSS).

8.3 Proyeksi Dampak Kelembagaan dan Tata Kelola

Tabel 8.1 Proyeksi Dampak Kelembagaan (Pita Kualitatif)

Dimensi	**Kondisi Saat Ini**	**Proyeksi Pasca-Implementasi (2030)**
Integrasi Data Lintas-Program	Rendah (basis data terpisah per inovasi)	Tinggi (terintegrasi melalui SIGAP-KOHESI)
Keterbukaan Capaian Publik	Rendah–Sedang (sebagian besar belum terpublikasi)	Sedang–Tinggi (*dashboard* terbuka & laporan berkala)
Cakupan Wilayah Inovasi Unggulan	Terbatas (2 dari 11 kecamatan)	Luas (replikasi ke seluruh kecamatan prioritas)
Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan	Minim (belum ada forum khusus)	Terlembagakan (FORTAS di seluruh kecamatan)

8.4 Kontribusi terhadap RPJMD dan LPPD

Implementasi rekomendasi kajian ini diproyeksikan memberikan kontribusi terhadap dua instrumen akuntabilitas utama pemerintah daerah. Pertama, terhadap capaian visi RPJMD "SEMANGAT", khususnya pilar Mengayomi dan Teknologis, melalui peningkatan cakupan dan digitalisasi layanan sosial-politik. Kedua, terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indeks Inovasi Daerah, mengingat inovasi seperti Loksado Inklusif telah terkonfirmasi berkontribusi pada penilaian tersebut, sehingga replikasi dan penguatan inovasi serupa berpotensi meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten HSS secara keseluruhan.

8.5 Skenario Keberlanjutan

Tabel 8.2 Skenario Keberlanjutan Implementasi Rekomendasi

Skenario	Asumsi Utama	Dampak
Optimis	Seluruh rekomendasi Fase I & II diintegrasikan ke Renstra/RKPD dengan dukungan anggaran memadai	Kabupaten HSS menjadi rujukan tata kelola sosial-politik inklusif di Kalimantan Selatan
Moderat	Sebagian rekomendasi Fase I diimplementasikan; Fase II tertunda karena keterbatasan anggaran/SDM	Perbaikan dokumentasi dan SLA tercapai, namun integrasi data dan replikasi wilayah berjalan lambat
Pesimis	Rekomendasi tidak diintegrasikan ke dokumen perencanaan resmi; bergantung pada inisiatif individual OPD	Risiko stagnasi inovasi, ketergantungan pada figur pimpinan, dan potensi terhentinya sejumlah program pasca pergantian pejabat

Kajian ini merekomendasikan skenario Optimis sebagai target capaian, dengan skenario Moderat sebagai data awal realistis apabila keterbatasan sumber daya daerah menjadi kendala utama. Skenario Pesimis perlu diantisipasi secara aktif melalui advokasi kebijakan sebagaimana direkomendasikan pada Bab VII subbab 7.5.

8.6 Ringkasan Dampak Utama

- Perluasan cakupan kelompok rentan yang terlindungi dari basis wilayah terbatas menjadi seluruh 11 kecamatan Kabupaten HSS;
- Peningkatan akuntabilitas publik melalui keterbukaan data capaian dan standar waktu tanggap yang terukur;
- Penguatan basis bukti (evidence base) bagi perumusan kebijakan sosial-politik daerah melalui *dashboard* SIGAP-KOHESI;

- Terlembagakannya partisipasi kelompok rentan dalam siklus perencanaan pembangunan melalui FORTAS;
- Kontribusi positif terhadap capaian visi RPJMD SEMANGAT dan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB 9
PENUTUP

PENGUATAN KOHESI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN MELALUI INOVASI TATA KELOLA SOSIAL-POLITIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB IX
KESIMPULAN DAN SARAN

9.1 Kesimpulan

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 20 inovasi daerah yang relevan dengan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan, tersebar pada lima kategori Asta Cita yang berbeda. Penyebaran ini menyulitkan pelaporan kinerja yang utuh.
- Melalui matriks penilaian berbobot, keenam inovasi fokus kajian — Bina Persada, SLRT Menyapa, Bakul Peduli, Pepenabat, SAPA HSS, dan Loksado Inklusif — terkonfirmasi secara empiris sebagai inovasi dengan relevansi tertinggi terhadap agenda kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan, dengan Loksado Inklusif dan SLRT Menyapa menempati peringkat tertinggi;
- Analisis permasalahan menunjukkan tantangan sistemik pada empat lapisan: pendataan (hulu), penyaluran layanan (hilirisasi), sumber daya manusia dan kelembagaan, serta infrastruktur dan digitalisasi, dengan analisis SWOT gabungan menegaskan bahwa kelemahan struktural utama terletak pada dokumentasi dan integrasi data, bukan pada ketiadaan program;
- Keenam inovasi tersebut secara konseptual selaras dengan visi RPJMD Kabupaten HSS 2025–2029 “SEMANGAT,” khususnya pilar Mengayomi, namun keselarasan tersebut belum sepenuhnya terformalisasi dalam dokumen perencanaan dan indikator kinerja resmi;
- Model tata kelola terpadu tiga tingkat (desa-kecamatan-kabupaten) dirumuskan sebagai kerangka payung bagi enam model optimalisasi spesifik, disertai dua usulan inovasi baru: SIGAP-KOHESI sebagai *dashboard* pemantauan terpadu, dan FORTAS sebagai forum partisipasi langsung kelompok rentan;
- Rencana aksi disusun dalam dua fase (2026–2027 dan 2028–2030) dengan delapan program prioritas, dilengkapi matriks urgensi-kompleksitas dan strategi mitigasi risiko implementasi;
- Proyeksi dampak menunjukkan potensi perluasan cakupan perlindungan kelompok rentan ke seluruh 11 kecamatan, dengan skenario keberlanjutan yang sangat bergantung pada integrasi formal rekomendasi ke dalam dokumen perencanaan daerah (Renstra/RKPD).

9.2 Saran

9.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Melengkapi dokumentasi capaian kuantitatif seluruh inovasi kohesi sosial, karena sebagian besar baru memuat penjelasan manfaat tanpa angka penerima manfaat dan nilai layanan.
- Mengintegrasikan keenam inovasi fokus kajian secara jelas ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terkait dan dokumen RKPD tahun berjalan;
- Mempertimbangkan pengembangan SIGAP-KOHESI sebagai prioritas jangka menengah untuk memperkuat basis data perlindungan sosial terpadu, memanfaatkan platform SENADA PLUS yang sudah tersedia;
- Membentuk FORTAS sebagai mekanisme partisipasi kelompok rentan yang terintegrasi dengan siklus Musrenbang kecamatan.

9.2.2 Bagi Perangkat Daerah Pengampu Inovasi

- Dinas Sosial agar melakukan deduplikasi data penerima manfaat antara SLRT Menyapa, Bakul Peduli, dan Pepenabat secara berkala;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mereplikasi model Loksado Inklusif ke kecamatan dengan tantangan geografis serupa;
- Dinas Komunikasi dan Informatika agar memperkuat aksesibilitas dan transparansi SAPA HSS bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas;
- Kecamatan Kalumpang dan kecamatan lain agar memperluas pelibatan kelompok rentan dalam forum dialog persatuan bangsa seperti Bina Persada.

9.2.3 Bagi Penelitian Lanjutan

- Diperlukan kajian lanjutan dengan akses terhadap dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah secara utuh untuk memperdalam analisis kesesuaian kebijakan pada level sasaran dan indikator kinerja;
- Diperlukan survei lapangan langsung kepada penerima manfaat keenam inovasi untuk memvalidasi capaian dampak yang saat ini belum terdokumentasi secara kuantitatif dalam basis data resmi, guna menggantikan proyeksi kualitatif pada Bab VIII dengan proyeksi kuantitatif yang lebih presisi.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2026). Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita [Dokumen rekapitulasi 214 inovasi daerah menurut delapan kategori Asta Cita].

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2022). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2022). Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Ranperda RPJMD 2025–2029 Disetujui DPRD HSS, Bupati Apresiasi Sinergi Eksekutif dan Legislatif. hulusungaiselatankab.go.id.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Wakil Bupati HSS Sampaikan Ranperda RPJMD 2025–2029 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS. hulusungaiselatankab.go.id.

Kalimantan Post. (2025). RPJMD HSS 2025–2029 Disepakati Jadi Perda. kalimantanpost.com.

ANTARA News Kalimantan Selatan. (2025). Bupati HSS Sebut Puskesos-SLRT Perkuat Layanan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Bupati HSS Buka Bimtek Puskesos-SLRT untuk Perkuat Pelayanan Sosial di Daerah.

Kalimantan Post. (2025). Ruang SLRT Dinsos HSS Diresmikan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Wakil Bupati HSS Kunjungi Lansia Asuh dan Serahkan Bantuan Sosial di Hari Lanjut Usia Nasional 2025.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2023). Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2023 di Kab. HSS dengan Berbagi Kebahagiaan Kepada 163 Lansia Asuhnya.

Koranbanjar.net. (2025). Bupati HSS Serahkan Bantuan Sosial Program Rumah Sejahtera.

ANTARA News Kalimantan Selatan. (2025). PRS HSS Bentuk Nyata Komitmen Pemerintah Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025.

Data.go.id. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

SENADA PLUS. Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. senada.hulusungaiselatankab.go.id.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

OECD. Perspectives on Global Development: Social Cohesion in a Shifting World.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Lengkap 48 Inovasi agenda kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan

Tanda (*) menunjukkan tiga inovasi yang dalam dokumen rekapitulasi asli Pemerintah Kabupaten HSS tercatat pada Perspektif Tata Kelola dan Pelayanan Publik, namun dimasukkan ke dalam populasi kajian ini karena relevansi substansinya terhadap perlindungan sosial dan reformasi tata kelola inklusif (lihat Bab I subbab 1.6.2).

Tabel 8.3 Lampiran 1. Rekapitulasi Lengkap 48 Inovasi agenda kohesi

No	Nama Inovasi	Klaster Tematik
1	Bina Persada (Kamtibmas)	Kamtibmas & Persatuan Bangsa
2	Patangga Raman Anum	Kamtibmas & Persatuan Bangsa
3	SIDAKAT (Sistem Database Asal Tumbuhan)	Kamtibmas & Persatuan Bangsa
4	Kordinasi Aman	Kamtibmas & Persatuan Bangsa
5	Si Jamil Kamtib	Kamtibmas & Persatuan Bangsa
6	SISKA (Sistem Informasi Perkawinan)	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
7	Gelorakan Lanting	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
8	Si Midun Chating Dengan Dina	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
9	ASTUTI	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
10	HSS Tuntas Stunting	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
11	SIJIWA BERDAYA	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
12	PRO-HERO	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
13	Cerdas Cegah Anemia Remaja & Stunting	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan

No	Nama Inovasi	Klaster Tematik
14	Keluarga Mendukung Cemara MPE	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
15	Tawa Stunting	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
16	Peri Ceting	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
17	Cinlok	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
18	Bingkai	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
19	Sabuk Tua Mendunia	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
20	Melati	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
21	Sobat PRB	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
22	BAKU (Pengantaran Obat Warga Kandangan Utara)	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
23	Lanjung (Langsung Julung)	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
24	Mobil Geriatri	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
25	Bangji Sehati	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
26	Loket Prioritas (Lansia, Ibu Hamil, Anak Balita)	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
27	SANTAPAN	Kesehatan Inklusif & Kelompok Rentan
28	Kader Andalan	Pendidikan Inklusif & SDM
29	Pustaka Ceria Inklusif	Pendidikan Inklusif & SDM
30	BERKEMAS	Pendidikan Inklusif & SDM

No	Nama Inovasi	Klaster Tematik
31	Tahfidz Taman Pendidikan Al Quran	Pendidikan Inklusif & SDM
32	Gebrak Sehati	Lingkungan, Sanitasi & Toleransi
33	BERSEMANGAT	Perlindungan Sosial & Bansos
34	Bakul Peduli	Perlindungan Sosial & Bansos
35	Program Rumah Sejahtera (PRS)	Perlindungan Sosial & Bansos
36	SLRT Menyapa	Perlindungan Sosial & Bansos
37	Sahabat Simpur	Perlindungan Sosial & Bansos
38	LUNA MAYA	Perlindungan Sosial & Bansos
39	ELPUJI Subsidi Tepat Sasaran	Perlindungan Sosial & Bansos
40	Media Pengamanan & Pengawalan Kepala Daerah	Reformasi Politik, Hukum & Adminduk
41	ParlemenGO!	Reformasi Politik, Hukum & Adminduk
42	SEHATI (Sinergitas Pencegahan Gratifikasi)	Reformasi Politik, Hukum & Adminduk
43	BERANAK (Berkas Lahir Untuk Anak)	Reformasi Politik, Hukum & Adminduk
44	Gerak Mas Darling	Lingkungan, Sanitasi & Toleransi
45	1000 Biopori	Lingkungan, Sanitasi & Toleransi
46	**Pepenabat (Pendampingan Penyaluran Bansos Cepat Tanggap)***	Perlindungan Sosial & Bansos
47	**SAPA HSS (Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan)***	Reformasi Politik, Hukum & Adminduk
48	**Loksado Inklusif (Layanan Adminduk Inklusif)***	Reformasi Politik, Hukum & Adminduk

Lampiran 2. Instrumen Penilaian Kualitatif Enam Inovasi

- Dimensi 1 – Jangkauan Kelompok Rentan: skala 1 (tidak menyasar kelompok rentan secara jelas) hingga 5 (menyasar kelompok rentan secara jelas dan spesifik);
- Dimensi 2 – Tingkat Digitalisasi: skala 1 (sepenuhnya manual) hingga 5 (terintegrasi sistem informasi digital);
- Dimensi 3 – Kejelasan Kelembagaan/SOP: skala 1 (tidak ada uraian mekanisme kerja) hingga 5 (mekanisme kerja terstandardisasi dan terdokumentasi lengkap);
- Dimensi 4 – Keterbukaan Data Publik: skala 1 (tidak ada data capaian yang dipublikasikan) hingga 5 (capaian dipublikasikan secara berkala dan dapat diverifikasi);
- Bobot kriteria untuk skoring komposit (Bab III): Jangkauan Kelompok Rentan 40%, Kejelasan Kelembagaan/SOP 30%, Tingkat Digitalisasi 15%, Keterbukaan Data Publik 15%.

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAPPERIDA

HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa

HRP
HAFECS
Research & Publication

2026
LAPORAN KAJIAN